

APLIKASI ADMINISTRASI

Media Analisa Masalah Administrasi

TASK SKILL APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG, JAWA TIMUR, INDONESIA)

Abdurahman, R.A Ratih Sonia Paradita, Dewi Casmiwati, Wildan Taufik Raharja 1-8

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN E-TILANG SURABAYA

Fierda Nurany, Indriani, Amara Nasya Damayanti, Ferra Aetika Wulandari, Fadillah Nuzul Furqonia, Akhmad Sulthon A.H.K 9-22

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI LON MALANG KABUPATEN SAMPANG

Rina Nur Azizah, Nurhaliza Fardayanti 23-33

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Herlambang Bagus Pangarsa 34-52

INOVASI PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS RAPID TRANSIT RUTE UTARA – SELATAN

Sela Febrina 53-59

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PERTANIAN MINAPADI DI DESA BANJARASRI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Alfredo Putra Pratama, Sri Wahyuni, Agus Wahyudi 60-73

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Basic Industry dan Chemicals yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)

Maulia Mustafani, Chasan Azari, Setya Prihatiningtyas 74-82

ANALISIS REAKSI PASAR PRA DAN PASCA PUBLIKASI UNQUALIFIED OPINION (Studi Pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2017-2019)

Lailatul Qomaria, Chasan Azari, Yanda Bara Kusuma 83-95

**JURNAL APLIKASI ADMINISTRASI
MEDIA ANALISA MASALAH ADMINISTRASI**

Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Mei dan Desember. Berisi hasil penelitian, analisis kritis konsep dan tinjauan buku dalam bidang Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Ilmu-Ilmu Sosial

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Dewi casmiwati (scopus ID: 57224510545)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Managing Editor

Elli setiyo wahyuni (SINTA ID: 6148208)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

IT & Website Support

Muhammad Syarifudin

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Administration

Chaliem Mubayanah

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Diterbitkan oleh

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Alamat Redaksi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Gedung Pulau Bras Lantai 1 Ruang MAP

Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya – 60111

Website

<https://jaa.hangtuah.ac.id/>

Email

Jaa.journal@hangtuah.ac.id

Editor in board:

Daniel Mohammad Rosyid (SCOPUS ID: 6507223604)

Institut Teknologi Sepuluh November, Indonesia

Mas Roro Lilik Ekowanti (SINTA ID: 5997220)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Agus Subianto (SCOPUS ID: 57217912018)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

M. Husni Tamrin (SINTA ID: 6137471)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Reviewer:

Bagong Suyanto (SCOPUS ID: 57193081790)

Universitas Airlangga

V. Rudy Handoko (SINTA ID: 6000096)

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abdurahman (SINTA ID: 6029143)

Universitas Madura

Soedarso (SINTA ID: 6117002)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

TASK SKILL APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG, JAWA TIMUR, INDONESIA)

Abdurahman^{1*}, R.A Ratih Sonia Paradita², Dewi Casmiwati³, Wildan Taufik Raharja⁴

¹Universitas Madura, Indonesia

²Universitas Madura, Indonesia

³Universitas Hang Tuah, Indonesia

⁴Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: abdurahman@unira.ac.id

Abstract

The state civil apparatus as the government administrator, service, and development is required to have adaptability in the 4.0 era, especially in organizing population administration service to explore the task skills of the state civil apparatus in the Department of Population and Civil Registration in Sampang, East Java, Indonesia. This study uses descriptive qualitative with interactive model data analysis techniques (Miles, Huberman, and Saldana, 2014: 8). Meanwhile, the theoretical study of task skills Fleishman, et al. (1991) include; knowledge dimension, the apparatus does not master the standard operating procedures that have been set by the Department of Population and Civil Registration; physical agility dimension, most of the apparatus only "know" how to operate a computer, and they are the expert; The interpersonal capacity dimension of the apparatus still does not have good interpersonal skill, as can be seen from public complaints regarding the attitude of the apparatus that is considered less friendly and communicative; Meanwhile, the dimension of intellectual ability level of creativity, innovation, problem solving in completing task demands are still not optimal, such as in manual services. They tend to apply the old pattern, so that the employee work target is not achieved

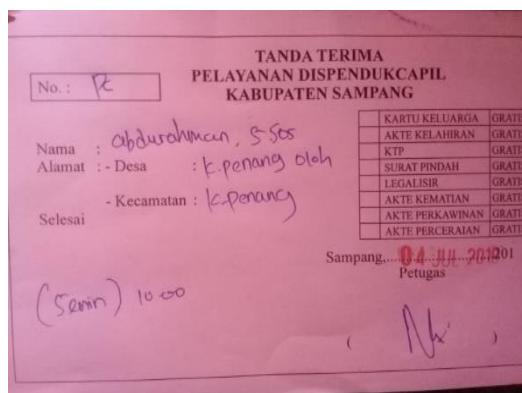
Keywords: Task skills, the state civil apparatus

I. Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia dianggap sebagai komponen utama pengelola sistem.

Rudito *et al.*, (2016:64) secara spesifik mendefinisikan aparatur sipil negara sebagai media pemerintah dalam menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Aparatur sipil negara selaku pelayan publik seringkali menuai citra negatif. Salah satunya yaitu ketidakmampuan aparatur menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang diharapkan, sebagaimana terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia.

Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”. Namun, yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pengalaman penulis saat mengurus dokumen kependudukan pada tanggal 4 Juli 2019, waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan dokumen kependudukan yaitu 4 hari, di mana dokumen baru bisa diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 10.00 sebagaimana bukti di bawah ini.



Gambar 1.1 Bukti tanda terima pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Sampang

Sellang (2019:20) yang menyatakan bahwa sistem yang baik yang dikelola atau dikerjakan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelayanan dapat melahirkan kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan *output* yang berkualitas pula.

II. Landasan Teori

Aprinto & Jacob (2013:192), *task skills* merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rangkaian aktivitas pekerjaan sesuai standar yang diharapkan. Agar lebih mudah dipahami, Wart (2005:36) mengklasifikasi 4 (empat) dimensi *task skill* menurut Fleishman, *et al.* dalam Wart (2005:36), sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan, pengetahuan teknis aparatur mencerminkan profesionalisme aparatur. Penting bagi setiap aparatur untuk menerapkan sistem berbagi pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran bersama, serta memperluas kepemilikan terhadap pengetahuan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pelayanan publik (Dwiyanto (2011:338).
- 2) Ketangkasan fisik (keterampilan), merupakan keahlian yang bersifat spesifik yang dapat diajarkan dan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang bersifat aktual.
- 3) Kapasitas interpersonal, Horton, *et al.* dalam Abdurrahman (2019:55) memetakan kapasitas interpersonal aparatur dalam 3 (tiga) hal, yaitu *listening*, *interpersonal sensitivity*, dan *flexible behaviour*.
- 4) Kemampuan intelektual, Sanghi (1961:30) mendefinisikan kemampuan intelektual merupakan kemampuan sumber daya manusia dalam mengumpulkan informasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah, berpikir kreatif dan inovatif, menghadapi tuntutan tugas, dan sebagainya.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokus penelitian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dengan fokus penelitian “task skill aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang”. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan enam (6) orang informan, hasil observasi, dan sumber data sekunder, meliputi; arsip ASN dispindukcapil, dokumen resmi berupa: SOP pelayanan administrasi kependudukan, sasaran kerja pegawai, dan data keluhan masyarakat serta dokumen pendukung yang relevan. Teknik analisis data model interaktif merujuk pada (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:8). Teknik pemeriksaan keabsahan data: triangulasi sumber.

IV. Hasil dan Pembahasan

Penulisan Calibri font 12, single space. Tahap pertama dimulai dengan membuat folder perusahaan yang berisi data lengkap perusahaan serta menentukan periode akuntansi selama 1 tahun dimulai pada 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019, kemudian membuat kode akun sesuai nomor yang dibutuhkan. Setelah itu memasukkan jurnal umum, buku besar, kemudian menghasilkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca saldo, laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.

1) Pengetahuan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, diketahui bahwa pengetahuan aparatur terkait prosedur atau proses pelayanan cenderung kurang maksimal, sehingga hal tersebut menyebabkan inkonsistensi antara standar operasional prosedur dan regulasi administrasi kependudukan dengan proses pelayanan yang terjadi di Dispindukcapil Kabupaten Sampang, hal tersebut terlihat dari ungkapan Bapak Imam selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dispindukcapil Kabupaten Sampang berikut.

“...Kan kadang terkendala kondisi jaringan lemot, gangguan. Jadi, SOPnya sendiri memang dibikin 3 (tiga) hari, tapi rata-rata 1-2 hari selesai...” (08/1/ 2020)

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa proses pembuatan dokumen kependudukan yang tercantum dalam standar operasional prosedur pada dasarnya memang 3 (tiga) hari. Padahal apabila mengacu pada standar operasional prosedur tercantum bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan satu dokumen kependudukan yaitu ±15 (lima belas) menit.

Standar operasional prosedur (SOP) memiliki beberapa manfaat, khususnya bagi aparatur negara selaku pelayan publik sebagaimana diungkapkan Zulkarnain & Sumarsono (2015:224), diantaranya: (1) sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; (2) mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; (3) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, di samping minimnya pemahaman aparatur terkait standar operasional prosedur (SOP), pemahaman aparatur terkait konsep dasar pelayanan dapat dikatakan cukup memadai karena pelayanan merupakan suatu hal yang sederhana dan mudah dipelajari, sehingga adanya bimtek, diklat, dan *transfer of knowledge* dinilai cukup membantu dalam mengembangkan pemahaman aparatur terkait konsep dasar pelayanan.

2) Ketangkasan fisik (Keterampilan)

Secara garis besar, tugas pokok aparatur bidang pelayanan kependudukan bersentuhan langsung dengan komputer.

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa *digital skill* aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang masih terbatas atau dapat dikatakan belum berada pada level “ahli (*expert*)” sebagaimana ungkapan Bapak Ahmadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengungkapkan hal sebagai berikut.

“...Ya cukup tau komputer lah, bukan ahli, tapi tau. Paling nggak ya bisa menghidupkan komputer lah, jadi ketika kita kasih aplikasinya, bisa menjalankan. Kebetulan jurusan SMK.nya banyak di sini. Itu sekarang sarjana semua. Tapi mulai SMK kerja di sini. Ada yang sekarang masih kuliah sambil kerja. Dulu dari SMK, magang di sini dulu, dan setelah itu meneruskan kerja di sini...” (21/1/2020)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa *digital skill* aparatur di Dispendukcapil Kabupaten Sampang telah cukup memadai, meskipun belum dapat dikatakan “ahli”. Sebagaimana ungkapan Bapak Edi Subinto selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Sampang berikut.

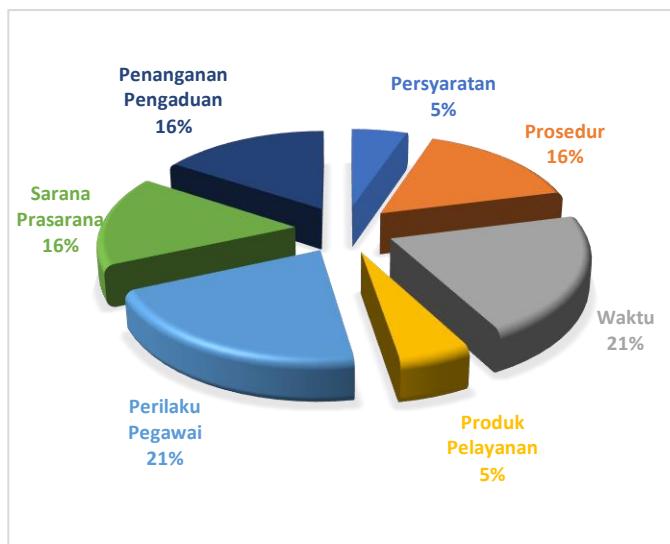
“...Karena kita mencari SDM yang spesialisasi informatika ini ga mudah. Se-Kabupaten Sampang aja bisa dihitung yang UPT-nya punya S.Kom. Saya punya S.Kom 3 (orang), tapi yang 1 (orang) belum PNS...” (30/1/2020)

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Sampang, termasuk Dispendukcapil Kabupaten Sampang mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga ahli dikarenakan minimnya ketersediaan sumber daya manusia lulusan pendidikan spesialisasi informatika di Kabupaten Sampang, sehingga *digital skill* yang dimiliki oleh aparatur di lingkungan Dispendukcapil Kabupaten Sampang cenderung sebatas tahu, bukan ahli sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Menyikapi kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, Wibowo (2019:30) menyatakan bahwa *digital skill* merupakan salah satu hal tantangan untuk menyongsong era industri 4.0 bagi para aparatur, terutama aparatur milenial. Selain itu, *digital skill* merupakan alat untuk mempercepat laju kerja birokrasi, sehingga wajah birokrasi Indonesia akan menjadi birokrasi yang bukan hanya sekedar melayani masyarakat, melainkan juga melayani masyarakat dengan cepat tanggap.

3) Kapasitas Interpersonal

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kapasitas interpersonal yang dimiliki oleh aparatur sipil negara di Dispendukcapil Kabupaten Sampang cenderung minim. Hal itu terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat terkait sikap atau perilaku aparatur yang terkesan kurang sabar dalam menghadapi masyarakat juga membuktikan bahwa aparatur kurang memiliki kapasitas interpersonal, sebagaimana diagram berikut.



Terdapat 7 (tujuh) hal yang hingga saat ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Salah satunya yaitu perilaku atau sikap pegawai. Hal tersebut merupakan komponen yang mendapat persentase tertinggi yaitu 21% dalam data keluhan masyarakat. Salah satu penyebab tingginya angka keluhan terkait sikap aparatur yaitu aparatur di Dispendukcapil Kabupaten Sampang terkesan masih menerapkan pola-pola paradigma lama.

Pada titik ini, akibat tradisi lama pelayanan publik berdampak terhadap enggannya masyarakat berurusan dengan birokrasi, sehingga lebih memilih menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, hal ini diungkapkan Bapak Ahmadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berikut.

“...Calo masih sangat kental sekali di sini. Itu (permasalahan) yang masih belum bisa kita atasi sampai saat ini. Itu (calo) dari LSM, tapi bawanya nggak satu. Tujuh, lima (berkas). Akhirnya saya berkesimpulan kalau orang Madura ini kaya-kaya. Kayak gitu aja dia nyuruh orang. Kalau calo ini dicegah, saya juga butuh sebenarnya ke orang-orang ini untuk membawa orang-orang itu ke sini. Ya artinya bawa pemohon ke sini. Tanpa dia harus jalan sendiri, dia sudah dapat menerima. Jadi, memang saya galakkan dari tahun 2017 sampai 2018. Karena apa? Saya malu. Jadi pada tahun 2017 bulan Februari saya diundang ke Gorontalo. Persentase penduduk ber-KTP hanya 41%, paling rendah nomor 2, setelah Papua. Tapi Papua kan warganya hanya 450 ribu orang, sedangkan di sini sudah sekitar juta. Masa Sampang kalah sama Papua...” (21/1/ 2020)

Polemik “menjamurnya” calo sebagaimana dijelaskan informan di atas merupakan permasalahan yang hingga saat ini belum dapat teratasi. Hal itu dikarenakan adanya hubungan simbiosis mutualisme (saling membutuhkan) antara calo dan Dispendukcapil Kabupaten Sampang. Keberadaan calo sengaja dibiarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk meningkatkan persentase penduduk ber-KTP.

Dwiyanto (2017:84) bahwa membengkaknya jumlah pengguna calo dalam pelayanan publik menunjukkan sistem pelayanan publik tidak berjalan secara wajar. Penyebab utamanya adalah adanya ketidakpastian yang sering dihadapi oleh masyarakat selaku

pengguna layanan birokrasi pemerintah, terutama menyangkut biaya, waktu, dan cara pelayanan. Ketika berinteraksi dengan birokrasi pelayanan mereka tidak pernah mengetahui secara pasti kapan pelayanan yang mereka perlukan akan dapat diselesaikan, berapa total biaya yang harus mereka bayar untuk mendapatkan suatu pelayanan, serta bagaimana sikap dan perilaku aparatur ketika melayaninya, yaitu apakah aparatur birokrasi akan melayaninya dengan baik dan penuh perhatian ataukah akan bersikap acuh, cuek, atau bahkan bersikap galak.

Di samping itu, berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 5 Agustus 2019 ditemukan adanya kecenderungan diskriminasi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang, di mana masyarakat yang tidak memiliki kedekatan dengan pemberi layanan akan sulit mendapatkan pelayanan. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang dekat dengan pemberi layanan akan lebih mudah mendapatkan pelayanan. Hal itu terbukti dari adanya pejabat yang mengajukan perubahan KTP bisa diselesaikan dalam satu hari, disisi lain terdapat masyarakat yang juga mengajukan perubahan KTP, namun petugas menyatakan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari dikarenakan ketidaktersediaan stok blanko.

Saleh, *et al.* (2013:122) bahwa kapasitas interpersonal yang baik merupakan modal dasar dalam menciptakan netralitas pelayanan publik, karena seorang sumber daya aparatur yang memiliki karakter seperti itu kemungkinan besar dapat menjalin hubungan secara baik, jujur, penuh rasa tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk bertindak netral terhadap pihak-pihak yang membutuhkan jasa layanannya. Mulyadi (2016:228) yang menyatakan bahwa paradigma *New Public Service* berusaha memanusiakan kembali pemerintah dengan memandang masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, kelas sosial, dan lain-lain.

4) Kemampuan Intelektual

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat beberapa temuan terkait kemampuan intelektual aparatur. *Pertama*, aparatur dinilai kurang kreatif dikarenakan hingga saat ini aparatur di Dispendukcapil Kabupaten Sampang belum mampu menciptakan inovasi pelayanan berbasis *online*, sehingga sistem pelayanan yang dilaksanakan masih bersifat manual. Dwiyanto (2011:338) menyatakan bahwa aparatur birokrasi terbiasa bekerja secara rutin dan memperlakukan segala sesuatunya *taken for granted*, atau *rule oriented*.

Kedua, dalam pelayanan administrasi kependudukan, aparatur sipil negara di Dispendukcapil Kabupaten Sampang cenderung masih menerapkan nilai dan pola-pola lama, sehingga pelayanan terkesan lama sebagaimana diungkapkan informan berikut.

“...Cuma kadang pegawai-pegawai yang di depan itu masih menggunakan pola-pola lama, seperti selesai 2 hari, 3 hari. Aslinya sehari selesai. Mungkin itu karena khawatir takut gak selesai...” (30/1/2020)

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa aparatur di lingkungan Dispendukcapil Kabupaten Sampang belum mampu melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 yang menjelaskan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik.

Ketiga, permasalahan lain yang hingga saat ini belum terselesaikan yaitu aparatur tidak mampu memenuhi beberapa target kerja. Secara sederhana, definisi masalah yaitu kesenjangan antara apa yang diharapkan (target) dengan apa yang senyatanya (realisasi). sebagaimana tercantum dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2018.

V. Kesimpulan dan Saran

- Data temuan di lapangan berdasarkan empat dimensi, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan, ditemukan bahwa aparatur kurang menguasai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, kuat dugaan dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga aparatur belum sepenuhnya memahamii standar waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan mulai dari penerimaan berkas sampai penerbitan.
 2. Ketangkasan fisik (keterampilan) menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur hanya sekedar “tahu” mengoperasikan komputer bukan ahli. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah aparatur yang memiliki *background* pendidikan informatika.
 3. Kapasitas interpersonal ditemukan bahwa aparatur masih belum memiliki kapasitas interpersonal yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat terkait sikap aparatur yang dinilai kurang ramah dan komunikatif.
 4. Kemampuan intelektual ditemukan bahwa tingkat kreativitas, inovasi, serta *problem solving* aparatur dalam menyelesaikan tuntutan tugas belum maksimal. Hal itu terlihat dari beberapa hal, seperti pelayanan yang bersifat manual (belum berbasis *online*); aparatur cenderung masih menerapkan pola-pola lama, sehingga berdampak pada ketidakpastian waktu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. "Capacity Building Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Democratic Local Governance". Disertasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya:2019
- Aprinto, B., Jacob, F.A. *Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia*. PPM Manajemen. Jakarta:2013.
- Dwiyanto, A. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:2011.
- Dwiyanto, A. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta:2017.
- Mulyadi, D. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung:2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- Rudito, B, et al. *Aparatur Sipil Negara: Pendukung Reformasi Birokrasi*. Penerbit Kencana. Jakarta:2016.
- Saleh, C., et al. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. UB Press. Malang:2013.
- Sanghi, S. *The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing, Implementing Competency Models in Organizations*. Sage Publications India Pvt Ltd. New Delhi:2007.
- Sellang, K., Jamaluddin., Mustanir, A. *Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Qiara Media Partner. Pasuruan:2019.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wart, V. M. *Dynamics of Leadership in Public Service: Theory and Practice*. M.E. Sharpe, Inc. New York:2005.

Wibowo, P. *Desainer Baru Birokrasi: Menyambut Gelombang ASN Milenial di Birokrasi.* Phoenix Publisher. Yogyakarta:2019.

Zulkarnain, W., Sumarsono, R. B. *Manajemen Perkantoran Profesional.* Penerbit Gunung Samudera. Malang:2015.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN E-TILANG SURABAYA

Fierda Nurany, Indriani^{1*}, Amara Nasya Damayanti², Ferra Aetika Wulandari³, Fadillah Nuzul Furqonia⁴, Akhmad Sulthon A.H.K⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: fierdanurany@ubhara.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the public service quality of e-traffic ticket in Surabaya. This E-ticket program was issued by District Attorney, due to the large number of complaints from the public regarding the less effective and efficient system. Therefore, the application of e-traffic ticket helps the community (the offender) in paying the fines. It will also facilitate data management of traffic violation cases for the police, the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and Attorney General's Office of Indonesia. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The research data were obtained through interview, observation, documentation, and related triangulation in the administration of e-traffic ticket. The results show that the e- traffic ticket innovation is appropriate, good and profitable for the people in Surabaya, especially people enthusiasm who think positively and agree with this policy, but there are some difficulties experienced by the community due to lack of socialization from the authorities, but the solution is found as by the parties who issued this e-traffic ticket innovation so that the public will not be disappointed.

Keywords: Quality, services, e-traffic ticket.

I. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Menurut Ratnawati (2009) Pelayanan publik, adalah: Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kegitan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Seperti yang diketahui bahwa, masyarakat selalu menuntut adanya pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, dan memiliki sifat ketidakpastian. Keadaan yang demikian terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani (Hardiyansyah, 2018).

Menurut Dahyar (2019) Keluhan dari masyarakat tersebut dapat memberikan motivasi kepada pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal, yang

berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka dari itu, di era sekarang sudah banyak instansi pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan menciptakan inovasi pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien. Inovasi di sektor publik pada saat ini menjadi sebuah keharusan untuk membuat ketersediaan layanan yang semakin mudah, murah, terjangkau, dan merata.

Namun pada kenyataannya, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah masih jauh dari harapan masyarakat. Contohnya saja keluhan mengenai pemberian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang kurang efektif. Keluhan tersebut diantaranya dapat berbentuk demonstrasi maupun protes. Protes biasanya dilakukan masyarakat melalui pengaduan atau laporan terkait pelayanan publik kepada instansi atau lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia sendiri lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ialah ombudsman. Banyak masyarakat yang memberikan pengaduan mengenai pelayanan yang buruk kepada ombudsman (Ombudsman, 2020).

Masyarakat banyak mengeluhkan tentang pelayanan yang tidak efektif dan efisien, seperti pada pelayanan tilang sendiri dimana biasanya mendapatkan waktu sidang yang bertabrakan dengan kesibukannya seperti bekerja, selain itu juga pelayanannya yang lama dan berbelit-belitse, sehingga diperlukannya sebuah inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif prinsipal dan/atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan hal ini maka diperlukannya pemanfaatan dari *e-Government* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam hal informasi maupun implementasi serta membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Menurut Dwiyanto (2015) Pemerintah sendiri memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pasal 1 undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Masyarakat menghendaki pelayanan publik yang berkualitas dari pihak pemerintah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang optimal.

Pada era modern seperti ini, sebuah negara tidak akan bisa terlepas dari pengaruh globalisasi, yang mana globalisasi ini merupakan proses mendunia dengan adanya peningkatan suatu ekonomi global secara terintegrasi melalui *free trade*, *free flow of capital*, dan *cheaper foreign labor markets* (sumber daya manusia yang lebih murah). Kemunculan globalisasi yang semakin meluas ini justru mempengaruhi pada kemajuan bidang teknologi dan informasi modern. Menurut Nurany (2018) Pada dasarnya kemajuan bidang teknologi ini merupakan sebuah tujuan dimana untuk dapat membantu kebutuhan hidup manusia agar lebih mudah, efisien, dan efektif dalam bekerja dan juga beraktivitas. Dengan begitu penggunaan teknologi dan informasi ini yang semakin maju maka akan semakin gencar dilakukan disebuah negara. Pemerintah atau birokrasi yang dianggap lamban, ribet, dan kaku akan dapat diperbaiki dengan bantuan kemajuan teknologi modern ini.

Dengan adanya kemajuan teknologi ini maka, kita perlu untuk memanfaatkannya dalam bidang pemerintahan yang akrab disebut sebagai *electronic government*, *digital government*, atau *online government* mulai diterapkan oleh berbagai negara dalam menunjang perannya sebagai pelayan masyarakat. *E-Government* sendiri merupakan kependekan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian

sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Menurut Wirtz & Daiser (2018) E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Pemanfaatannya sendiri dalam birokrasi merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas hidup masyarakatnya.

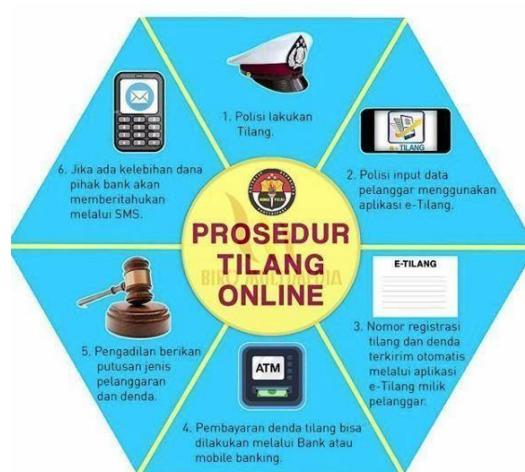
Undang-undang Republik Indonesia No 11B Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik menegaskan “globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa”. Undang-undang Republik Indonesia No 11D Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik menegaskan bahwa “penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan mempertukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional” (Wirtz & Daiser, 2018).

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah juga dialami di kota surabaya. Sehingga sebagian besar instansi pemerintah yang berada di kota surabaya mulai menciptakan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dimana salah satu instansi yang berada di kota surabaya yang menciptakan inovasi pelayanan e-tilang. E- tilang merupakan inovasi pelayanan satu satunya yang ada di indonesia. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena tilang, agar tidak perlu mendatangi kejaksaaan negeri Surabaya untuk mengambil dokumen tilang yang berupa stnk atau sim, namun cukup dengan mengirim sms atau whatsapp ke kejaksaaan negeri Surabaya dan pihak kejaksaaan negeri Surabaya akan mengantar dokumen tilang ke alamat yang bersangkutan. Program etilang ini dikeluarkan oleh kejaksaaan negeri Surabaya, karena banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengambil dokumen tilang. Keluhan dari masyarakat antara lain karena pekerjaan, malas untuk mengambil, dan waktu yang lama pada saat pengambilan dokumen tilang (Arifin et al., 2020).

Menurut Yusuf et al., (2021) Sebelum adanya layanan e-tilang, prosedur pengambilan dokumen tilang yaitu pada waktu terkena tilang akan diberikan surat bukti tilang bewarna merah oleh pihak kepolisian. Dalam surat bukti tilang tertulis nama pelanggar, pelanggaran yang dilakukan, ruang sidang, nama pihak kepolisian, waktu sidang. Didaerah surabaya sidang dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya. Kemudian di waktu sidang yang sudah ditentukan pelanggar harus ke pengadilan negeri surabaya. Jam 9 pagi harus ada di pengadilan negeri surabaya supaya tidak antri panjang. Di pengadilan negeri surabaya pelanggar memasuki ruang sidang yang sudah tertuliskan di surat bukti tilang. Ribuan orang saling berdesak-desakan untuk memasuki ruang siding, Diruang sidang pelanggar mengumpulkan surat bukti tilang. Membutuhkan waktu yang lama guna menunggu hakim datang dan memanggil nama pelanggar. Setelah dipanggil oleh hakim pelanggar diarahkan ke loket pembayaran. Dimana loket pembayaran ini dikelola oleh koperasi adhyaksa. Koperasi adhyaksa merupakan koperasi yang dimiliki oleh kejaksaaan negeri surabaya. Pelanggar juga bisa membayar denda melalui atm bri karena pihak kejaksaaan negeri surabaya bekerjasama dengan pihak BRI. Setelah pelanggar membayar denda yang sudah ditentukan. Pelanggar akan

mendapatkan dokumen tilang yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Proses pengambilan surat tilang diatas membutuhkan waktu yang sangat lama dan melelahkan (Prabowo, 2019).

Dengan melihat kondisi tersebut pihak kejaksanaan negeri Surabaya berupaya menciptakan inovasi pelayanan publik tersebut demi kesejahteraan bersama yaitu dengan e-tilang tadi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan sistem e-tilang di Kota Surabaya sebagai bentuk pelayanan publik dan dapat diketahui bagaimana kualitas pelayanan e-tilang yang telah berjalan ini (Niswah, 2018). Dengan pemaparan tersebut, maka dapat dilihat mengenai urgensi dan kualitas pelayanan publik mengenai adanya penerapan kebijakan sistem e-tilang ini. Sistem e-tilang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai hal, berikut prosedur dari layanan e-tilang :



Gambar 1. Prosedur Tilang Online

Sumber: Chaerani Nur (2021)

Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau e-Tilang sudah berjalan selama satu bulan di Surabaya. Polisi mencatat ada 6.035 pelanggar. Program ini diresmikan oleh Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan bersama Kakorlantas Polri Irjen Istiono. Dalam sebulan pertama, ada ribuan pengguna jalan yang tertangkap kamera melanggar lalu lintas. Total ada 6.035 pelanggaran dari program E-TLE yang sudah jalan sebulan. Namun dari jumlah pelanggaran itu, yang dilakukan penindakan yakni sebanyak 2.578 pelanggar (Nikmah et al., 2019). Dengan demikian dapat jelaskan bahwa pentingnya dilakukan penelitian mengenai bagaimana kualitas pelayanan publik pada layanan e-tilang ini. Berdasarkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada layanan e-tilang di Kota Surabaya.

II. Landasan Teori

1. Pelayanan Publik

Amanat Undang-undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada bab satu ayat satu ditegaskan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggaraan pelayanan public (Dwiyanto, 2015).

Maka Pelayanan Publik menurut Katharina & Jaweng (2020) dapat diartikan sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Erlianti, 2019).

Pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Kedua fungsi ini menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaanya dipercayakan kepada aparatur negara tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Kamaruddin et al., 2019).

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Suherman (2020), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Saputro (2016), mengemukakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hardiyansyah (2018), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik.

Menurut Erlianti (2019) mengungkapkan ada 22 faktor penentu service quality yang dirangkum ke dalam lima faktor dominan atau lebih dikenal dengan istilah SERVQUAL, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible.

1) Reliability.

Kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dalam arti luas, keandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janji-janjinya tentang penyediaan, penyelesaian masalah, dan harga. Jika dilihat dalam bidang usaha jasa asuransi, maka sebuah layanan yang handal adalah ketika seorang agent asuransi mampu memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh nasabah dengan cepat.

2) Responsiveness.

Kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini menekankan pada perhatian, dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan. Kemudian jika dilihat lebih mendalam pada layanan yang cepat tanggap di sebuah asuransi, bisa dilihat dari kemampuan agent asuransi yang cepat memberikan pelayanan kepada nasabah dan cepat menangani keluhan mereka.

3) Assurance.

Pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Dimensi ini mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat kepercayaan cukup tinggi. Contohnya seperti di bank, asuransi, dan dokter. Oleh karena itu dalam sebuah jasa asuransi, kepastian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat diberikan kepada nasabahnya seperti jaminan keamanan dan kemudahan di dalam mengikuti program asuransi.

4) Empathy.

Kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Inti dari dimensi empati adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu spesial, dan kebutuhan mereka dapat dimengerti dan dipenuhi. Dalam menjaga hubungan baik, tentu saja layanan yang diberikan oleh para agent harus dapat menunjukkan kepedulian mereka kepada nasabah.

5) Tangible.

Berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, staff dan bangunannya. Dimensi ini menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Contohnya seperti fasilitas kantor, kebersihan dan kenyamanan ruang yang digunakan untuk transaksi serta kerapian penampilan agent.

Berdasarkan penjelasan diatas, kami dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

3. E-Government

E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Katharina & Jaweng, 2020).

Istilah e-government atau electronic government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan e-government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah (Wirtz & Daiser, 2018).

Sedangkan menurut Indrajit (2017) secara konseptual konsep dasar dari e-government sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (e-services), seperti melalui internet, jaringan telepon seluler dan komputer serta multimedia. Melalui pengembangan egovernment ini dilakukan pula penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

4. E-Tilang

Ketentuan pada Pasal 177 ayat (2) tersebut diatas menyebutkan bahwa tugas pokok Ditlantas salah satunya adalah penegakkan hukum. Penegakkan hukum berdasarkan Pasal 183 ayat (1) membina ketertiban, penindakan dan pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah RI no. 80 tahun 2012 pasal 24 ayat 3 yang berisi prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dan penindakan bagi pelanggar lalu lintas dimana tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang. Secara harfiah e-tilang bisa diartikan proses penilangan yang tidak lagi di lakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik (Chaerani Nur, 2021).

Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Selain itu dengan danya E-tilang diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller (Prabowo, 2019).

Apriliana (2019) menyebutkan e-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem etilang ini juga melihat pengendara yang mengemudikan kendaraan yang membahayakan. E-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektornik (Maghnun, 2018). Dalam sistem penerapan e-tilang dibutuhkan kesadaran untuk mendukung penerapannya di Surabaya.

III. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2015), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci dari obyek penelitian dan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini dibutuhkan subjek penelitian, dimana sujek penelitian merupakan informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian yaitu penanggung jawab bagian urusan tilang di Kejaksaan Negeri Surabaya, staff pengatur, staff bagian pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Surabaya, serta masyarakat Surabaya yang ditilang maupun tidak, hal ini dikarenakan masyarakat merupakan subjek utama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pada layanan e-tilang di Surabaya. Informan atau subjek penelitian tersebut pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti.

Selanjutnya berhubungan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan di kota Surabaya khususnya di Kejaksaan Negeri Surabaya. Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi terkait dalam pengurusan e-tilang. Teknik analisis data yang digunakan lainnya yaitu model interaktif

interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip oleh Miles et al., (2014) diantaranya data collection, data reduction, data display, conclusion drawing and verification.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Inovasi adanya E-tilang di Surabaya

E-tilang merupakan inovasi pelayanan satu satunya yang ada di indonesia. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang terkena tilang, agar tidak perlu mendatangi kejaksan negeri Surabaya untuk mengambil dokumen tilang yang berupa STNK atau SIM, namun cukup dengan mengirim sms atau whatsapp ke kejaksaan negeri Surabaya dan pihak kejaksan negeri Surabaya akan mengantar dokumen tilang ke alamat yang bersangkutan.

Standar dan sasaran kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ukuran kebijakan e-Tilang yang menjadi sasaran adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga terjadi adanya kemudahan dan transparansi kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi yang tepat guna.

Faktor dibuatnya e-tilang ialah karena pada kenyataannya masyarakat malas dalam mengambil dokumen tilang. Faktor tersebut diantaranya, masyarakat harus jauh-jauh mendatangi kejaksan, dimana masyarakat harus mengorbankan waktunya, masyarakat harus mengikuti sidang, dan juga harus antri dan berdesak desakan. Melihat fenomena tersebut pihak kejaksan negeri surabaya berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan perkara tilang. Upaya yang dilakukan pihak kejaksan negeri surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan agar tercipta sistem kerja yang bebas pungli, kejaksan negeri surabaya telah membuat progam dalam bentuk layanan inovasi pelayanan publik, program andalannya yaitu layanan e-tilang.

Fungsi utama pengadaan pelayanan e-tilang ini ialah untuk mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum. Meski menjadi lebih mudah, kepolisian tetap berharap, masyarakat tidak melanggar aturan lalu lintas. Selain itu juga sebagai sistem yang berfungsi untuk mempermudah pihak kepolisian dan pelanggar serta dapat mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota satlantas berupa pungutan liar atau disebut juga dengan pungli. Dalam penerapannya e-tilang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelanggar, juga sebagai bentuk transparasi dan profesionalitas petugas dalam penegakan hukum.

Dasar hukum dari e-tilang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil dari penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi (Lestari et al., 2020).

Seperti yang diketahui bahwa e-tilang memiliki banyak sekali manfaat khususnya dari pihak pelanggar atau masyarakat. Menurut Wulandari (2020) berikut beberapa manfaat untuk pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem e-tilang adalah :

a) Transparency

Dengan adanya aplikasi berbasis android ini dapat memudahkan pihak masyarakat mengetahui proses dan regulasi tentang lalu lintas, dapat dikatakan sistem e-tilang memberikan mekanisme yang dapat memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses-

proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan terlihat lebih baik dan tidak akan ada praktik pungli yang dilakukan oleh aparat yang bertugas karena prosesnya telah jelas dan cenderung transparan.

b) Empowerment

Pemberdayaan bagi masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dengan melalui sistem e-tilang ini maka masyarakat dapat mengetahui semua informasi tindakan yang bisa dikategorikan kedalam pelanggaran lalu lintas serta juga hukuman yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Dengan ini diharapkan setelah mengetahui peraturan serta hukuman yang telah ada, masyarakat dapat menularkan sikap tertib berlalu lintas kepada orang sekelilingnya agar tidak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.

c) Responsif (Responsiveness)

Responsivitas pihak berwenang akan lebih tinggi dalam menangani pelanggaran tersebut dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik, maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsif terhadap aduan masyarakat dalam hal lalu lintas.

d) Keadilan (Equity)

Dalam layanan e-tilang setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama kemudian akan mendapatkan hukuman serta denda yang sama pula tanpa adanya pandang bulu. Karena dalam hal ini telah diatur dalam sistem yang ditentukan pihak yang memiliki wewenang. Tidak adanya tawar menawar antara pelanggar yang terkena tilang dengan pihak kepolisian walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat sekalipun, tentu dalam sistem e-tilang ini tetap akan mencatat pelanggaran secara otomatis pihak yang melakukan suatu pelanggaran akan terkena tilang.

Kefektifan dari adanya sistem e-tilang ini dapat dilihat dari tingkat intensitas pengguna jalan umum khususnya kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, diantaranya yaitu tingginya angka pelanggaran lalu lintas terutama di area traffic light yang dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas. Sistem E-Tilang yang diterapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk memastikan dan mendata setiap pelanggar lalu lintas yang dipantau melalui *Camera Closed Circuit Television (CCTV)*. Upaya ini dilakukan untuk mendukung keefektivitasan pemerintah dalam menindak pelanggar lalu lintas. Dengan adanya sistem E-Tilang diharapkan mampu memfasilitasi kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat yang konvensional.

Aplikasi e-tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), pembuatan aplikasi e-tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang dengan menggunakan aplikasi tilang online (e-tilang) (Y. Saputro, 2021).

Dengan penerapan e-tilang, akan sangat membantu masyarakat (pelanggar) untuk melakukan pembayaran denda tilang melalui jasa perbankan (atm, teller, e-banking) dan juga akan memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang baik bagi Polri, Makamah Agung RI., maupun Kejaksaan RI. Penerapan e-tilang merupakan pilihan efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas

walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia menguasai teknologi.

Agar e-tilang dapat berjalan lebih optimal maka diperlukannya adanya peningkatan kualitas pelayanan e-tilang ini. Peningkatkan kualitas pelayanan E-Tilang di Surabaya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pihak Kejaksaan Negeri Surabaya harus melakukan sosialisasi secara langsung yang melibatkan masyarakat agar seluruh masyarakat mengetahui program delivery tilang. Pihak kejaksaan juga bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian agar pada waktu tilang bisa mensosialisasikan delivery tilang kepada pelanggar. Dan sebisa mungkin jika sosialisasi berbentuk sticker, banner, maupun plakat sebaiknya ditulis secara jelas terkait waktu dan prosedur dalam pelayanan delivery tilang. hal ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami layanan delivery tilang dan memudahkan operator delivery tilang dalam membalsas pesan dari masyarakat.
- 2) Penambahan sumber daya manusia atau operator layanan delivery tilang agar dapat secara cepat membalsas pesan yang dikirim masyarakat. Karena setiap bulan pengguna layanan delivery tilang semakin meningkat.

2. Pendapat masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik e-tilang di Surabaya

Masyarakat disini adalah sebagai sasaran utama dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan publik pada layanan e-tilang di Surabaya. Karena masyarakat ini merupakan bagian yang paling penting dalam pelayanan publik, dimana masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan dan harus mendapatkan pelayanan publik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan kehidupan bermasyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan kebutuhan hidup dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Maka untuk mendapat kepuasan tersebut, salah satunya adalah bagaimana seseorang dapat memberikan pelayanan yang diharapkan semua orang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan yang diberikan terkadang bisa berbentuk jasa maupun non jasa. Oleh karena itu dengan adanya wadah sebagai pelayanan publik seperti Kejaksaan Negeri Surabaya ini, maka wadah tersebut dapat membantu mengurus apa yang dibutuhkan masyarakat.

Seperti halnya pelayaan pada e-tilang ini, hal ini juga sebagai inovasi baru dalam hal pelayanan masyarakat. Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang mana dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publiknya mulai menerapkan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam membuat kebijakan maupun dalam menjalankan suatu sistem dalam birokrasinya.

Jika dihubungkan dengan tahu tidaknya masyarakat mengenai adanya sistem etilang ini, pada faktanya masyarakat Surabaya mulai mengetahui akan adanya kebijakan E-Tilang yang telah diterapkan di Surabaya. Buktinya hampir mendekati setengah masyarakat Surabaya memberi opsi jawaban tahu terhadap kebijakan e-tilang tersebut. Sedangkan, sebagian dari responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui akan adanya kebijakan e- tilang tersebut. Masyarakat Surabaya mulai memiliki antisipasi dan kesadaran diri untuk memikirkan kemajuan dari perkembangan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman yang kian meningkat. Hanya saja, dari adanya pembaruan teknologi yang diciptakan dan diterapkan masyarakat masih tidak dapat mengikuti bagaimana perkembangan teknologi tersebut bergerak. Namun hampir sebagian besar dari masyarakat juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan adanya kebijakan e-tilang yang sudah lama diterapkan di Surabaya, penerapan e-tilang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ialah berupa CCTV yang

sudah terpasang di beberapa traffic light di setiap titik-titik wilayah di Surabaya. Sehingga terdapat keuntungan pula bagi pihak kepolisian untuk memantau pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, maupun marka jalan.

Beberapa masyarakat Surabaya berpendapat mengenai bagaimana kebijakan E-Tilang ini diberlakukan dan pendapat mereka pun begitu menarik. Dimana hampir sebagian masyarakat Surabaya berpendapat bahwa mereka setuju dengan adanya kebijakan e-tilang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa upaya dari pemerintah untuk mengadakan kebijakan e- tilang tersebut cukup mendapat banyak antusias dari masyarakat Surabaya. Masyarakat yang berpendapat setuju dengan adanya kebijakan e-tilang ini memberikan alasan bahwa kebijakan itu membuat lebih efektif dan efisien dalam penindakan pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan mengatakan bahwa dari sisi kesetujuan mereka dengan adanya e-tilang membuat kefektifan dalam proses penilangan sehingga tidak akan membuat kerugian secara langsung pada pengendara bermotor.

Di sisi lain pendapat masyarakat yang tidak setuju ini memberikan alasan yang mana dengan adanya kebijakan tersebut akan menambah pengeluaran tak terduga dimana masyarakat menganggap bahwa dengan adanya e-tilang tersebut akan semakin mempermudah akses penilangan agar tidak merepotkan masyarakat saat ada penilangan secara manual, namun ada pula masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya e-tilang tersebut akan membuat masyarakat semakin menderita pada saat ada tambahan biaya sewaktu membayar pajak. Tidak sedikit pula masyarakat Surabaya yang menganggap bahwa dengan adanya kebijakan e-tilang ini akan membuat polisi lalu lintas makin jengah. Dengan sistem E-Tilang juga lebih transparan karena ada bukti rekamannya dan uang tilang langsung mengalir ke negara. Berbeda jika ditilang oleh pihak kepolisian (polisi,red) seperti tilang manual, biasanya masih terdapat sogok menyogok. Selain itu tidak membuat efek jera dan bikin pengendara mengulangi kesalahannya lagi.

Dengan begitu masyarakat Surabaya ini pasti merasakan bagaimana pelayanan E- Tilang di Surabaya ini. Dan tentunya masyarakat sebagai orang yang menerima pelayanan ini pasti memiliki harapan kedepannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti layanan E-Tilang ini. Jadi masyarakat Surabaya yang menjadi narasumber kami ini menjawab bahwa masyarakat Surabaya menginginkan adanya penyuluhan atau sosialisasi mengenai e-tilang untuk warga yang tidak mengetahui akan adanya kebijakan e-tilang tersebut. Sedangkan, masyarakat Surabaya yang lain juga berpendapat bahwa menginginkan adanya peningkatan performa dari e-tilang tersebut, dan sisanya berharap bahwa pihak berwajib lebih tegas dalam keikutsertaan di kebijakan e-tilang tersebut. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan e-tilang membuat sebagian masyarakat Surabaya tidak mengetahui dengan adanya kebijakan tersebut, serta tertinggalnya performa e-tilang yang diterapkan di Surabaya semakin membuat masyarakat tidak mengetahui akan adanya e-tilang yang ada di tiap-tiap traffic light.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil uraian diatas mengenai inovasi layanan e-tilang yang dilakukan di daerah Surabaya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan e-tilang di kota Surabaya ini sudah berjalan dengan baik. Dimana e-tilang ini sebagai salah suatu inovasi pelayanan publik dibidang pemerintahan yang akrab disebut inovasi electronic government. Program e-tilang ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mengambil dokumen tilang dengan alasan pekerjaan, malas untuk mengambil, dan waktu yang lama pada saat pengambilan dokumen tilang. Maka dari

itu, keuntungan e-tilang ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengambil dokumen tilang. Inovasi delivery e-tilang juga sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun ada kerumitan atau kesulitan yang dialami oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwajib mengenai e-tilang ini, tetapi hal itu diupayakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak yang mengeluarkan inovasi e-tilang ini agar masyarakat tidak kecewa. Hampir sebagian masyarakat Surabaya pun setuju dengan adanya kebijakan e-tilang tersebut karena hal ini membuktikan bahwa upaya dari pemerintah untuk mengadakan kebijakan e-tilang tersebut cukup mendapat banyak antusias yang baik dari masyarakat Surabaya.

Layanan delivery e-tilang juga sudah melalui fase uji coba dan juga proses pengenalan delivery tilang kepada masyarakat. Tetapi sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak yang berwajib masalah mengenai e-tilang Surabaya ini sangat kurang sehingga masyarakat minim mengetahui adanya kebijakan e-tilang ini, maka diperlukan sosialisasi yang lebih meluas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini seperti TV atau mungkin melalui media website seperti youtube dari para petinggi negara tentang penerapan e-tilang ini kepada masyarakat agar bisa menjangkau setiap daerah. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami ataupun mengetahui apa kebijakan e-tilang itu. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan efesien akan memicu masyarakat untuk menyadari dan mengetahui tentang keberadaan dari penerapan e-tilang tersebut. Layanan inovasi delivery tilang ini sangat mudah diamati oleh masyarakat karena banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat maka dikatakan kualitas pelayanan publik pada layanan e-tilang di Surabaya ini sudah sangat baik dan mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, L. Z. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>
- Arifin, M., Prasetya, K., Vivaldi, J., Sander, A., Khothimah, K., & Ardhana, R. (2020). *Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya Mahasiswa Administrasi Negara, FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*. 1–17.
<https://econpapers.repec.org/paper/osfosfxxx/6xdf8.htm>
- Chaerani Nur, N. (2021). Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan. *Amsir Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.41>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan). *Penelitian Kualitatif*.
- Dahyar, D. (2019). Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik. *Makassar: Leisyah*, 254.
<https://id1lib.org/book/11116335/d0caf>
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik, Inkludif, dan Kolaborasi. *UGM Press*, 300.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rrtjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pelayanan+publik+efektif&ots=CtCMuo8Tm&sig=mI__DIE14yRwJrHllbuARsJYtDg
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7>
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. *Gava Media*, 250. <http://eprints.binadarma.ac.id/3820/>

- Indrajit, R. E. (2017). Electronic Government in Action: Strategi Implementasi di Berbagai Negara. *Aptikom*, 1(4).
- Kamaruddin, S., H. J., & Ahmad, M. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. *ResearchGate*, June, 168. <https://books.google.co.id/books?id=U06rDwAAQBAJ&hl=id&sitesec=reviews%0D>
- Katharina, R., & Jaweng, R. N. E. (2020). *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*. https://www.google.co.id/books/edition/Pelayanan_Publik_Pemerintahan_Digital_In/HVYrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teknologi+dan+informasi+pemerintahan&printsec=frontcover
- Lestari, I. D., Wardani, D., & Wibawani, S. (2020). Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 2(2). <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.54>
- Maghnun, I. A. M. (2018). E-Tilang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A method sourcebook. CA, US: Sage Publications.
- Nikmah, K., Dominicus, A., & Rodiana, A. (2019). Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 196. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>
- Niswah, C. M. dan F. (2018). Analisis Kesiapan Inovasi E-Tilang Melalui Cameraclosed Circuit Television (Cctv) Di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. *Publika*, 6(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/22756>
- Nurany, F. (2018). Quality Analysis Of Surabaya City Police Metropolitan Services On Http :// Polrestabessurabaya . Com / Website Using Egovqual Method. *Proceedings of the 2018 InCoPS*, 209–213.
- Ombudsman, A. (2020). *ACT Ombudsman Annual Report 2018-19 | ACT Ombudsman*. <https://www.ombudsman.act.gov.au/reports/annual-reports/act-ombudsman-annual-report-2018-19#sec-4-3>
- Prabowo, E. N. (2019). *Penerapan hukum terhadap e-tilang dalam upaya penertiban lalu lintas skripsi*. 1(3). <https://erepository.uwks.ac.id/4741/>
- Ratnawati, S. (2009). *Model Pengembangan Sistem Pelayanan Dengan Menggunakan Citizen'S Charter Untuk Meningkatkan Pelayanan Yang Berbasis Masyarakat*. Cakrawala. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v4i1.113>
- Saputro, H. E. (2016). Kualitas Pelayanan Publik. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v2i1.163>
- Saputro, Y. (2021). *Mekanisme E-Tle (Electronic Traffic Law Enforcement) Sebagai "Panopticon" Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Surabaya*. <https://repository.unair.ac.id/108923/>
- Suherman, D. (2020). Penyelenggaraan E-Goverment di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101–111. <https://doi.org/10.15575/jpan.v12i2.10300>
- Wirtz, B. W., & Daiser, P. (2018). E-Government. *Handbuch Staat*, 981–995. https://doi.org/10.1007/978-3-658-20744-1_88
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut*, 14(1), 1–10. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/393>
- Yusuf, I. M., Astuti, R. S., Kismartini, Afrizal, D., & Saputra, J. (2021). The Role of

Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System: A Case Study of Surabaya, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2472–2479.
<http://ieomsociety.org/proceedings/2021rome/743.pdf>

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI LON MALANG KABUPATEN SAMPANG

Rina Nur Azizah^{1*}, Nurhaliza Fardayanti²

^{1,2}Universitas Madura, Indonesia

*Corresponding author: rina_nurazizah@unira.ac.id

Abstract

Lon Malang beach tourism has several problems in the tourism development process, including inadequate facilities and infrastructure. Tourism planning is the process of making plan, strategy, recreational purpose development, and the study of tourism uniqueness visited in a temporary period. According to Paturusi (2008:27), tourism planning is a decision-making process related to the future of tourism destination. This is a dynamic process of goal setting, which systematically considers and evaluates selected alternatives. According to Oka A. Yoeti (1997:1), there are five indicators of tourism planning aspects, namely: tourists, transportation, tourism attraction, marketing, and human resources. This research uses descriptive qualitative with data analysis technique model from Creswell (2014) which consists of six steps of data analysis: First, processing and preparing data for analysis. Second, reading the entire data. Third, coding the data. Fourth, applying the coding process to describe the settings (domain), people (participants), category, and the theme being analyzed. Fifth, Indicating how the description and theme will be restated in the narrative/report. Finally, interpreting the data analysis. The results shows that five indicators are included, such as tourists, transportation, attractiveness, marketing and human resources. They are still inadequate in planning the tourism development of Lon Beach Malang in Sampang. The conclusion from the planning of tourism development is applied well because there are several factors that can hinder the planning of future tourism development.

Keywords: Tourism, Planning

I. Pendahuluan

Sumber daya alam adalah aset utama yang harus dikelola dengan sedemikian rupa karena kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia, kini dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbang pendapatan bagi negara. Selain mampu melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Secara regulatif, Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya Sustainable Tourism Industry. Undang- undang sebelumnya belum mampu mengatasi permasalahan ataupun menjawab tantangan mengenai pariwisata Indonesia. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kepariwisataan, mendefinisikan pariwisata merupakan macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Disamping itu juga pariwisata sangat memiliki nilai lebih dalam menunjang kemajuan di Indonesia karena dari segi pariwisata sendiri dapat menjadi ketertarikan wisatawan

domestik ataupun asing untuk sekedar menikmati keindahan pariwsata yang disajikan. Jika melihat kenyataan pariwsata di Indonesia seharusnya sangat memerlukan pengembangan dan pengelolaan yang lebih dapat berkembang dengan baik. Sehingga dalam pengembangannya sendiri dapat benar-benar terealisasi sebagaimana untuk meningkatkan kesehjeteraan masyarakat dan menunjang pembangunan nasional. Dengan perkembangan pariwsata sendiri dapat membuka peluang lebih terhadap lapangan pekerjaan dan kesempatan yang terbuka untuk membuka lahan di sektor-sektor lain. Pariwsata yang dapat dikembangkan dengan baik akan menghasilkan nilai objek yang luar biasa kepada pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwsata yang tersebar di setiap daerah dituntut untuk menunjang kebutuhan yang diperlukan dan dikembangkan terhadap objek pariwsata.

Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat pariwsata yang bagus dan tidak kalah menarik dengan provinsi yang lain. Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dimana potensi pariwsata di kabupaten Sampang cukup menjanjikan untuk prospek ke depan. Keasrian alam yang masih belum tercemar oleh bangunan membuat nilai lebih dalam potensi pariwsata. Kabupaten Sampang memiliki potensi yang dapat dikembangkan antara lain: wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata kuliner. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwsata memiliki tugas untuk mengawal Pariwsata yang ada di kabupaten Sampang. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwsata yaitu menerapkan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwsata. Tugas Umum Seksi Pariwsata dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwsata Kabupaten Sampang tertuang dalam pasal 11 ayat 2 Point D “mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata, destinasi pariwsata dan kawasan strategis pariwsata kabupaten”.

Objek pariwsata di Kabupaten Sampang yang akan dikembangkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwsata salah satunya adalah objek wisata alam Pantai Lon Malang yang terletak di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobenah, Kabupaten Sampang yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Pantai Lon Malang merupakan destinasi wisata alam yang memiliki keunikan dengan keindahan alamnya yang berupa pasir putih yang melintang dan air laut yang sangat jernih serta pohon cemara yang tumbuh dikawasan pantai dengan merasakan suasana yang sejuk dan nyaman.



Gambar 1.1 Halaman Pantai Lon Malang

Wisata pantai Lon Malang memiliki beberapa masalah mendasar pada objek wisata dalam proses pengembangan wisata, diantaranya fasilitas sarana dan prasarana masih kurang memadai, dimana fasilitas yang tersedia untuk para wisatawan yaitu kamar mandi jauh dari kata layak karena kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah tidak terurus, kualitas SDMnya masih rendah dalam pelayanan parawisata dan apresiasi masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan berbagai bidang masih rendah, serta pada area wisata masih terdapat banyak sampah yang berserakan,tumbuh-tumbuhan liar yang tidak ditebas sehingga merusak keindahan tempat wisata itu sendiri, Aksesibilitas jalan untuk menuju pantai Lon Malang jauh dari arah kota karena letaknya yang berada di jalur Pantai Paling Utara (PANTURA) yaitu pada Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan akses jalannya kurang baik banyak yang berlubang dan rusak dan ditambal kurang rata sehingga sangat berpengaruh serta mengganggu dalam keselamatan wisatawan untuk berkunjung ke wisata pantai Lon Malang tersebut. Usaha promosi kurang giat dilakukan sehingga pengunjung yang datang masih didominasi wisatawan lokal dari daerah Kabupaten Sampang.

Dari kondisi tersebut dibutuhkan perencanaan pengembangan parawisata pantai Lon Malang yang baik oleh Instansi terkait yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata agar menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan mampu bersaing dengan destinasi wisata yang lain di Kabupaten Sampang.

II. Landasan Teori

Menurut Abe (2005: 27), perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. Definisi perencanaan menurut Terry (dalam Riyadi, 2005: 3), "Perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-umsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan".

Menurut Sastryuda (2010:6-7) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.

4. Pendekatan kewilayahan, faktor berkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Perencanaan pariwisata merupakan proses membuat perencanaan, strategi serta mengembangkan untuk tujuan rekreasi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut Paturusi (2008:27), perencanaan pariwisata adalah suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu destinasi atau atraksi wisata. ini merupakan suatu proses dinamis dalam penentuan tujuan, yang secara bersistem mempertimbangkan berbagai alternatif dan terpilih dan evaluasinya. Menurut Oka A. Yoeti (1997:1) yaitu aspek-aspek perencanaan pariwisata yang terdapat 5 Indikator, yaitu: wisatawan, transportasi, daya tarik wisata, pemasaran, sumber daya manusia.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan lokasi ini sebagai locus penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu :

- a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, karena instansi tersebut diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan tanggung jawab dalam perencanaan pengembangan dan mengelola tempat wisata di Kabupaten Sampang.
- b. Tempat Wisata Pantai Lon Malang yang berada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobenah Kabupaten Sampang, yang merupakan salah satu tempat wisata yang perlu dikembangkan.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap aspek-aspek perencanaan pariwisata menurut Oka A. Yoeti (1997:1) adalah wisatawan, transportasi, daya tarik wisata, pemasaran, sumber daya manusia untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap menganalisa dalam Perencanaan Pengembangan Parawisata Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Creswell (2014) yang terdiri dari enam langkah proses analisis data sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, manscaning materi, mengetik data lapangan, memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Memulai coding semua data. Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas (Rossman & Rllis, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat (atau paragraph) atau gambar tersebut dalam kategori, kemudian menglabeli kategori ini dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah invivo).

4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa dalam setting (ranah). Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi atau penelitian naratif.
5. Tuntukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitas pendekatan yang paling popular adalah dengan menyampaikan. Pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bias meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual, gambar, atau table untuk membuat menyajikan membahas ini. Mereka dapat menyajikan suatu proses (sebagaimana dalam grounded theory), menggambarkan secara spesifikasi lokasi penelitian (sebagaimana dalam etnografi), atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah table (sebagaimana dalam studi kasis dan etnografi).
6. Terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi data. Mengajukan pertanyaan yang akan membuat peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan. (Lincoln dan Guba, 1985). Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi bias berupa makna yang berasal dari perbandingan antar hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.

IV. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

1. Wisatawan

Pada Indikator pertama melalui kegiatan penelitian untuk mengetahui karakteristik wisatawan dan asal wisatawan sehingga lebih mudah dalam memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke tempat Wisata Pantai Lon Malang . Dalam hal ini sangat menentukan langkah apa yang akan diambil sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari wisatawan yang berkunjung di Wisata Pantai Lon Malang yang berada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Untuk karakteristik dan asal wisatawan yaitu kebanyakan wisatawan yang berkunjung didominasi oleh kaum muda-mudi bahkan juga keluarga yang menikmati waktunya untuk berlibur dan sekedar berfoto.

2. Transportasi

Merupakan sarana berupa angkutan umum baik udara, laut dan darat yang tersedia dan dapat digunakan oleh wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara untuk mencapai tujuan wisata. Hal ini sangat menentukan kenyamanan wisatawan salam berkunjung karena saat mereka merasa nyaman dengan perjalanan yang mereka lalui tidak dipungkiri mereka bias kembali lagi serta merekomendasikannya kepada orang lain sebagai rekomendasi destinasi wisata. Untuk mengenai ketersediaan kendaraan umum sangat minim untuk beroperasi menuju ketempat wisata dikarenakan mayoritas wisatawan menggunakan kendaraan pribadi dengan biaya yang hemat, sedangkan pada akses jalannya masih kurang baik karena terdapat beberapa jalan yang rusak dan ditambal tidak rata.

3. Daya Tarik Wisata

Merupakan suatu aspek utama dalam pariwisata yang akan dijual agar memberikan kepuasan kepada wisatawan atau pengunjung perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang

dibutuhkan antara lain akomodasi penyediaan makanan, minuman, hasil pengarajin masyarakat berupa souvenir dan fasilitas umum yang mendukung untuk kebutuhan utama sehingga dapat memudahkan kenyamanan para wisatawan. Mengenai daya tarik wisata yaitu pada keindahan panorama alam yang sangat eksotis pada Wisata Pantai Lon malang, sedangkan dalam penerapan fasilitas sarana dan prasarana masih kurang memadai.



Gambar 4.1 Beberapa Fasilitas Yang sudah Rusak

4. Pemasaran

Merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk memperkenalkan produk-produk pariwisata yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan, melalui kegiatan promosi untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung datang kedaerah tujuan pariwisata yang ditawarkan. Dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang masih kurang dan belum giat dilakukan dan hanya sebatas website Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sehingga harus meningkatkan kecanggihan media sosial dalam mempromosikan adanya Tempat Wisata Pantai Lon Malang.

5. Sumber Daya Manusia

Merupakan Tenaga kerja yang berkecimpung di bidang pariwisata sebagai pelaku usaha pariwisata sebaiknya tersedia cukup untuk dan professional. Karena dalam pengelolaannya suatu kegiatan sumber daya manusia menentukan hasil kerja dalam memaksimalkan potensi yang ada dalam hal kegiatan pariwisata. Untuk mengenai Sumber Daya Manusia di Wisata Pantai Lon Malang masih kurang baik dalam kualitas dan kuantitasnya dan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sangat membutuhkan pelatihan atau pembekalan untuk mengembangkan dalam mengelola tempat Wisata secara efektif dengan menyesuaikan adanya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yaitu PERBUB Nomor 53 Tahun 2019 tentang kedudukan, susuna organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DISPORABUDPAR sehingga dapat mencapai suatu tujuannya.

b. Pembahasan

1. Wisatawan

Melalui kegiatan penelitian untuk mengetahui karakteristik wisatawan, asal wisatawan yang dapat memudahkan dalam memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang berkunjung di Wisata Pantai Lon Malang. Dalam hal ini sangat menentukan langkah apa yang akan di ambil sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari wisatawan yang berkunjung di Wisata Pantai Lon Malang yang berada di Desa Bira

Tengah, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Maka Berdasarkan hasil penelitian melalui Wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai indikator pertama tentang wisatawan peneliti akan memaparkan hasil penelitian dimana dalam karakteristik wisatawan itu sendiri menikmati keindahan panorama alam yang ada pada wisata serta ada juga yang sekedar berfoto untuk mengabadikan momen ketika liburan serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan karena wisatawan masih membuang sampah sembarangan sehingga di area kawasan tempat wisata menjadi kotor serta dapat mengganggu keindahan tempat wisata, mayoritas wisatawan yang berkunjung di dominasi oleh keluarga dan kaum pemuda-pemudi yang ingin berlibur untuk menikmati waktunya untuk refresh serta menikmati liburan bersama keluarga dan ada juga yang sekedar mencari spot yang indah untuk berfoto. Sedangkan asal wisatawan tersebut masih berdominasi dari masyarakat lokal yaitu mayoritas berasal dari Kabupaten Sampang namun ada juga dari Kabupaten Pamekasan, Sumenep bahkan dari Bangkalan jumlah wisatawan yang berkunjung paling banyak jika hari weekend atau hari lebaran karena ada kebiasaan atau ciri khas masyarakat madura saat pulang kampung.

2. Transportasi

Merupakan sarana fasilitas angkutan umum baik udara, laut dan darat yang tersedia serta dapat digunakan oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun manca Negara, hal ini sangat menentukan kenyamanan wisatawan dalam berkunjung karena saat mereka merasa nyaman dengan perjalanan yang mereka lalui tidak dipungkiri mereka bisa kembali lagi serta merekomendasikannya kepada orang lain sebagai rekomendasi destinasi wisata. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai akses jalan dan ketersediaan kendaraan umum ke tempat Wisata Pantai Lon Malang dapat disimpulkan bahwa mengenai angkutan umum jurusan Sampang ke Desa Bira Tengah Kecamatan Sampang yaitu menuju lokasi tempat wisata masih ada namun sangat jarang beroperasi dan pada saat ini mayoritas masyarakat untuk berkunjung ke Wisata Pantai Lon Malang menggunakan kendaraan pribadinya yaitu mobil dan sepeda motor dengan menempuh waktu yang lebih singkat untuk langsung menuju ke lokasi Wisata Pantai Lon Malang serta biaya yang digunakan pun sangat hemat. Sedangkan untuk masalah akses jalan dari Sampang sampai Robatal cukup bagus karena sudah ada perbaikan jalan, namun untuk jalan dari daerah Ketapang menuju Sokobanah jalannya banyak yang rusak, sempit dan berlubang akibat bekas galian pipa air dan mengelupas berganti batu kerikil serta ditambah kurang rata sehingga dapat menghambat perjalanan dan wisatawan merasakan ketidaknyamanan serta dapat mengancam keselamatan bagi para wisatawan.

3. Daya Tarik Wisata

Merupakan suatu aspek utama dalam pariwisata yang akan dijual agar memberikan kepuasan kepada para wisatawan atau pengunjung perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, antara lain akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, serta tempat penjualan hasil pengrajin masyarakat berupa souvenir atau cendera mata dan fasilitas umum yang baik untuk menunjang kegiatan wisata serta dapat meningkatkan daya tarik atau jumlah wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai banyaknya pengunjung wisata tidak dapat dipungkiri faktor utama adalah apa yang bisa menjadi daya tarik wisata untuk mengunjungi tempat wisata yaitu pada pesona alam atau keindahan panorama alamnya dimana tempat Wisata Pantai Lon Malang tersebut memiliki ciri khas yang sangat bagus pada pasir putih yang membentang, air pantai yang sangat jernih, pepohonan yang sangat rindang sehingga dapat menambahkan suasana yang sejuk dan adem walaupun berada dipesisir pantai serta pada sore hari wisatawan dapat

melihat dan mengabadikan moment yang sangat indah saat matahari terbenam atau sunset untuk berfoto sehingga banyak fotografer yang mengambil spot-spot yang bagus di area wisata tersebut untuk dipost ke akun media sosialnya. Namun dalam penyediaan dan penerapan fasilitas sangat disayangkan karena masih terlalu jauh dari kata nyaman, dimana fasilitas yang tersedia untuk para wisatawan seperti keperluan kamar mandi dikatakan sangat kurang layak karena kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah tidak terurus dan rusak sehingga tidak dapat digunakan, untuk fasilitas kamar mandi pun wisatawan masih harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh warga sekitar yang bekerjasama dengan dinas terkait bahkan dalam fasilitas tempat beribadah yaitu musholla juga kurang layak karena ditempat wudhupun masih susah untuk mendapatkan air yang digunakan wisatawan untuk berwudhu serta kebersihannya juga kurang dijaga karena musholla itu tempat yang suci, dan tidak adanya tempat penginapan wisata, dalam penyediaan tempat makan dan minuman masih terbatas sehingga wisatawan tidak bisa menikmati kepuasan dengan waktu yang lama untuk berlibur bahkan merasa kecewa saat mengunjungi tempat Wisata Pantai Lon Malang tersebut.

4. Pemasaran

Merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk memperkenalkan produk-produk pariwisata yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan , melalui kegiatan promosi untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung yang datang kedaerah tujuan pariwisata yang ditawarkan serta dapat menarik investor-investor untuk mendukung adanya kegiatan kepariwisataan untuk menunjang dan dapat membantu kesejahteraan pada derah setempat serta pada masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai kegiatan pemasaran atau promosi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Pariwisata yaitu masih sangat kurang giat dilakukan. Hal ini dari sekian informasi yang didapat dari informan banyak yang tidak mengetahui tentang promosi yang dilakukan khususnya dalam kegiatan mempromosikan tempat Wisata Pantai Lon Malang dan masyarakat banyak yang belum mengetahui daerah lokasinya mereka mengira bahwa wisata tersebut yaitu terdapat diluar daerah yaitu di Daerah Kota Malang karena kata akhirnya "Malang" namun kata tersebut berupa singkatan dan mempunyai arti karena sejarah pantai Lon malang tersebut sebelum dijadikan tempat wisata merupakan tempat irigasi air persawahan masyarakat sekitar menuju laut "Solon" yang berarti saluran irigasi dan "malang" berarti melintang. Untuk promosi yang dilakukan yaitu berupa brosur serta saat mengadakan event diluar daerah dan masih sebatas website Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dan ini sangat jarang masyarakat untuk mengaksesnya serta pengetahuan masyarakat dan wisatawan masih sebatas informasi dari orang keorang dan yang sekarang banyak menggunakan informasi melalui whatsapp.

5. Sumber Daya Manusia

Merupakan tenaga kerja yang berkecimbung di bidang pariwisata sebagai pelaku usaha pariwisata sebaiknya tersedia cukup dan professional. Karena dalam pengelolaan suatu kegiatan, sumber daya manusia yang professional sangat menentukan hasil kerja dalam memaksimalkan potensi yang ada, dalam hal ini potensi Wisata Pantai Lon Malang yang ada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobeah Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang disampaikan oleh beberapa informan mengenai Sumber Daya Manusia di berada di Dinas pariwisata maupun di lapangan yaitu tempat Wisata Pantai Lon Malang masih sangat kurang memadai dari segi kualitasnya dan membutuhkan perhatian khusus dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk memperbaiki Sumber

Daya Manusia yang siap untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata menyesuaikan adanya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang berujuan untuk mengembangkan pelatihan dan pengarahan untuk menjadikan Sumber Daya Manusia yang sangat berkualitas sangatlah dibutuhkan guna penyadaran atau pemahaman orientasi kedepan dan dengan adanya peran serta dari masyarakat yang sadar adanya kegiatan masyarakat yang lebih dikenalnya dengan istilah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang berfungsi dalam mengelola kegiatan wisata yang berkualitas. Dan mengembangkan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk menyadarkan adanya kegiatan wisata yang nantinya dapat membuka peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat sehingga dapat membantu kinerja program-program kegiatan pengembangan kepariwisataan dapat terlaksana dengan baik dan kondusif sesuai dengan tujuan yang akan dicapainya.

Dengan adanya kegiatan pariwisata yaitu dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat sekitar, karena masyarakat disekitarlah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus memberikan pelayanan yang diperlukan oleh para wisatawan. karena yang terpenting sikap dan sifat penduduk sekitar sangatlah berpengaruh dan memberikan kesan positif untuk kualitas pelayanan kujungan terhadap wisatawan berupa keramahtamahan, keakraban, murah senyum, saling sapa untuk menghangatkan suasana wisata di pantai Lon Malang. Serta pada masyarakat sekitar akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk berwirausaha terkait dengan kegiatan kepariwisataan, seperti pengelolaan atraksi wisata, guide lokal, pengelolaan homestay, wisata kuliner sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran untuk memperbaiki perekonomian masyarakat tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Wisatawan

Terkait karakteristik wisatawan mayoritas dari kalangan pemuda serta asal wisatawan yang berkunjung mayoritas dari masyarakat lokal karena paling banyak pengunjung yaitu saat hari lebaran dan hal ini merupakan ciri khas orang madura yang lagi pulang kampung atau mudik untuk menikmati liburan bersama keluarga.

2. Transportasi

Untuk kendaraan angkutan umum sudah minim dan jarang beroperasi dan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi yang biayanya lebih hemat dan dapat menikmati kepuasan dan kenyamanan saat diperjalanan. Sedangkan pada masalah akses jalan menuju tempat wisata dari arah jalan raya Sampang kota kedaerah Robatal sudah bagus karena ada perbaikan jalan.

3. Daya Tarik Wisata

Dalam hal penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam Wisata Pantai Lon Malang masih sangat kurang memadai dan jauh dari kata nyaman, dimana fasilitas yang tersedia untuk para wisatawan seperti untuk keperluan kamar mandi atau toilet kondisinya rusak dan kebersihannya tidak dijaga sehingga tidak dapat untuk dipergunakan lagi serta pada kondisi area wisata tidak terjaga kebersihannya karena hal ini kurang adanya kesadaran bagi wisatawan yang membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan wisata menjadi kotor dan dapat merusak keindahan tempat Wisata Pantai Lon Malang.

4. Pemasaran

Kebutuhan akan perbaikan promosi yang gencar karena dalam hal ini yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata masih sangat kurang giat dilakukan dikarenakan pada masyarakat masih minim mengetahui adanya Wisata Pantai Lon Malang dan lokasinya bukan dari Kota Malang melainkan berada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobenah Kabupaten Sampang.

5. Sumber Daya Manusia

Untuk penyambutan wisatawan dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang berada didinas maupun yang berada di lapangan tempat wisata masih sangat jurang memadai, hal ini membutuhkan perhatian khusus guna penyadaran dan pemahaman orientasi pariwisata yang berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan pada wisatawan.

Saran

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang perlu terus meningkatkan pelatihan dan pembekalan kepada sumber daya manusia yang terlibat dalam mendukung kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di daerah wisata seperti kebersihan, kenyamanan dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan.
2. Untuk menunjang pengembangan obyek wisata, aksesibilitas jalan menuju lokasi ke tempat wisata perlu adanya perbaikan untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat atau wisatawan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan melalui media sosial untuk mengenalkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata kepada masyarakat luas. Selain mengenalkan kepada masyarakat luas, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menarik investor-investor untuk berkontribusi aktif dalam usaha peningkatan daya tarik wisatawan dan dapat bersaing dengan objek wisata yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Creswell, John W. 2014. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran Ed.4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat, Marcella. 2011. *Strategi perencanaan dan pengembangan objek wisata (studi kasus pantai pengandaran kabupaten ciamis Jawa Barat)*. Jurnal Politeknik Negeri Bandung.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Pengelolaan Resort And Leisure 2015]* Soemarno. 2008. Erlangga . PT. Pradya Paramita. Profil Pariwisata Kota Padang 2014. Pemanfaatan Kelestarian Kawasan Agrowisata Bagi [12 April 2015]

Yoeti, Oka A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Pradnya Paramita*: Jakarta.

_____, 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Pradnya Paramita*: Jakarta.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Herlambang Bagus Pangarsa*
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: herlambangbgsp@gmail.com

Abstract

This research uses the theory from Lester and Stewart to determine the implementation of the policy, while determining the factors that influence the implementation of the policy uses four indicators of the implementation policies from Van Meter and Van Horn. The results obtained from the study show that the implementation of the policy is successfully implemented. The factors that affect the whole can be considered well-maintained, although in terms of communication there are several shortcomings, namely the lack of socialization to the community, as well as in terms of resources, especially infrastructure, namely the website application is still error or slow. The tendency factor for implementing the policy has been implemented well because each officer has carried out his functions and duties according to the procedure. The characteristics of the implementing agency are clear, and there is a clear Standard Operating Procedure (SOP) as a guide.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, Low-Income Communities

I. Pendahuluan

Kebijakan pembangunan di Indonesia salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung dipengaruhi oleh aksesibilitas atau jangkauan masyarakat miskin terhadap informasi tentang program-program pengentasan kemiskinan. Programnya cenderung efektif apabila didukung oleh data penerima bantuan yang tepat sasaran. Program yang sifat kegiatannya cenderung terpusat ini menimbulkan kekurangakuratan data penerima bantuan. Data yang terpusat cenderung kurang valid, untuk itu perlu dilakukan definisi kemiskinan dan pemutakhiran data. Dengan demikian, pendefinisian kemiskinan dimaksud dalam program menjadi urgent.

Bappenas dalam Erna Setijaningrum (2017) mendefinisikan kemiskinan secara lebih komprehensif, dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Berbagai aspek

penting yang melatarbelakangi perlunya pengentasan kemiskinan, antara lain aspek kemanusian, aspek ekonomi, aspek sosial dan politik serta aspek keamanan. (dalam Iqbal Hasbi, 2008)

Tantangan besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan/program dalam upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya yaitu jumlah penduduk setiap negara dari tahun ke tahun terus bertambah, begitu juga jumlah penduduk di Indonesia. Berikut ini jumlah penduduk Indonesia yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik :

Tabel 1
Jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)
Tahun 2014 s/d 2018

Data jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)				
2014	2015	2016	2017	2018
252.20	255.50	258.70	261.90	265.00

Sumber : Data BPS Tahun 2014-2018 (diakses pada 02 Mei 2016)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 265.00 juta jiwa. Semakin banyaknya penduduk tersebut didukung pula dengan tingginya angka kemiskinan di tahun 2018 yang mencapai 25,9 juta jiwa atau sebesar 9,80 %. Hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu permasalahan yang timbul akibat adanya kemiskinan adalah meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal inilah yang cukup menjadi perhatian dan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan merupakan prioritas yang perlu diterapkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Pusat merancang sebuah kebijakan untuk membantu melaksanakan upaya tersebut yang dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan, yaitu Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data yang tertera sekarang di halaman website DTKS menunjukkan Rumah Tangga DTKS berjumlah 27.703.976 juta, data penerima Program Sembako berjumlah 18.737.074 KPM, Program Keluarga Harapan berjumlah 10juta KPM, sedangkan Penerima Bantuan KIS sebanyak 96.800.000 juta jiwa. DTKS tersebut bisa digunakan sebagai sumber data utama dalam program pengentasan kemiskinan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Mantan Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa beliau meminta agar DTKS terus dikaji dengan berbagai upaya untuk meningkatkan koordinasi dan mencari solusi dari tantangan pengelolaan data. Namun nyatanya masih terdapat permasalahan dilapangan.

Menurut data yang diperoleh dari Ratna Sari Dewi (2020) di Jakarta terdapat warganya mengembalikan bantuan sosial karena ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, kemudian di bali juga teridentifikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki datanya tetap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan.

Permasalahan pengentasan kemiskinan yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah sudah cukup banyak, dapat dilihat dari kritikan dari berbagai macam sumber salah satunya yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam CNBC (2020). Kritik

yang terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintahan Pusat. Beliau mengatakan bahwa setiap kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah tidak sinkron. Kemudian persoalan pendataan juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengakatakan bahwa Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bantuan, jangan menggunakan data dari DTKS Kementerian Sosial yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena seiring berjalananya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang menalami perubahan (CNBC, 2020).

Presiden Joko Widodo (BBC,2020), mengakui masih terdapat persoalan data penerima dalam penyaluran bantuan sosial. Beliau mengatakan bahwa memang ada satu sampai tiga yang berkaitan dengan perbaikan data, tapi untuk kedepannya diharapkan akan lebih baik lagi.

Data yang diperoleh dari penelitian Resi Aryasa dan Tim (2020) mengungkapkan bahwa yang menjadi masalah dari proses penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat adalah data penerima bantuan yang seharusnya data tersebut setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi sesuatu yang membutuhkan data tersebut, pemerintah sudah siap dengan data yang akurat.

Pemerintah daerah juga mengalami banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidaktepatan sasaran, double data penerima, kemudian masalah data yang tidak update sementara bantuan harus segera dilakukan. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendataan di tiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial tersebut.

Di Pemerintahan Kota Surabaya yang melaksanakan proses input data DTKS yaitu pihak Kecamatan/Kelurahan masing-masing wilayah di Surabaya. Berdasarkan pengamatan di lapangan peneliti menemukan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM)nya kurang memadai, dilihat dari usia dan kurang menguasai teknologi sekarang sehingga proses pendataan sedikit terhambat. Untuk itu memang diperlukan petugas pendataan yang kompeten.

Data dari penelitian terdahulu oleh Resi Aryasa dan Tim (2020) menjelaskan bahwa berapa kendala yang ditemukan di Pemerintah daerah antara lain: (1) Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih dengan lainnya. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW, namun data tersebut tidak update. (3) Banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran yang dulunya tidak mampu sekarang mampu namun tidak melaporkan perubahan data tersebut. (4) kurang pemahaman masyarakat tentang informasi bantuan apa saja yang diberikan pemerintah.

Dari permasalahan yang diuraikan terkait DTKS yang mengikuti pola dari pusat, faktanya data yang diinput oleh petugas kurang valid atau tepat sasaran, sehingga Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya. Yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan. Program tersebut merupakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan bersifat transparant serta memerlukan keterkaitan antar instansi tanpa ada overlapping antar pelaksana program.

Terkait itu Pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Data MBR akan digunakan sebagai acuan

dalam berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi dalam Sonora Surabaya (2020) mengatakan, "Data MBR tersebut digunakan sebagai acuan Pemkot Surabaya untuk intervensi berbagai bidang bantuan, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, Kita juga mengevaluasi dari program MBR kemarin, sekarang kita buat baru, sehingga ada bantuan yang langsung bisa dirasakan masyarakat secara cepat, karena saat ini menggunakan satu data MBR."

Jumlah MBR di kota Surabaya saat ini pada tanggal 6 Januari 2021 tercatat sebanyak 872.184 jiwa (262.875 KK). Data MBR tersebut bisa diakses secara publik melalui laman e-pemutakiran data (<https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr>), sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan intervensi dari pemerintah bisa melihat terlebih dahulu namanya masuk atau tidak dalam database MBR tersebut.

Data MBR sendiri digunakan untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Perwali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Pemanfaatan, dan pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dimana jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data terdiri dari data pasif yang berupa data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota, dan data aktif yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial, dan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Surabaya yang sudah terlebih dahulu di survey oleh satuan tugas Dinas Sosial dan pelaksanaanya dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait.

Data MBR yang diperoleh peneliti khususnya di Kecamatan Tandes yang mana sebagai studi kasus penelitian ini berjumlah cukup banyak total ada 2189 KK. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Menurut peneliti Data MBR yang diperoleh ada beberapa yang tidak sesuai saat di survey. Petugas Surveyor lapangan Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan bahwa ada ketidaksesuaian data MBR seperti warga yang tadinya tercatat sebagai MBR namun saat disurvei keadaannya tidak tergolong masyarakat miskin, warga tersebut memiliki rumah bagus, kemudian mobil lebih dari satu dan lain sebagainya. Ada juga yang para warganya tidak jujur saat disurvei, dengan tujuan agar mendapatkan intervensi dari pemerintah. Namun, adanya proses survey data MBR tersebut membantu agar data tersebut lebih akurat dan update.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya?

Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan,

Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.

2. Untuk menggambarkan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Magister Administrasi Publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan publik, terutama dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi pelaksana program.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah kota Surabaya optimalisasi dan kesesuaian implementasi kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki arti yang beraneka ragam, namun menurut Santoso dalam Winarno (2007), ia menganggap bahwa kebijakan publik itu memiliki akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Sepaham dengan pendapat ini adalah pendapat dari George C. Edward III dan Sharkansky dalam Ekowanti (2004) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program tindakan yang dilakukan pemerintah.

Jadi dapat disimpulkan Implikasi dari beberapa pengertian dan teori-teori yang dipaparkan diatas, adalah pertama bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan suatu tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. Ketiga, bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Keempat bahwa kebijakan itu bersifat positif dalam arti suatu tindakan harus dilakukan, dan negatif dalam arti keputusan tersebut bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. Kelima, bahwa kebijakan itu didasarkan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa. Keenam, kebijakan itu dilaksanakan pada waktu tertentu untuk menyikapi suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Lester dan Stewart dalam Winarno (2007) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana berupa pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Selanjutnya, van Meter dan van Horn dalam Nawawi (2007), merumuskan proses implementasi sebagai “policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions” (implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

Sedangkan model implementasi yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) menitikberatkan pada perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam prosedur-prosedur implementasi kebijakan. Hasil atau tujuan yang diharapkan adalah prestasi kerja dalam suatu organisasi. Jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dihubungkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu : (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber-sumber kebijakan; (c) Ciri-ciri atau sifat lembaga pelaksana; (d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, (e) Sikap para pelaksana; (f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

A. Model van Meter dan van Horn

van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) didalam teori implementasi kebijakan atau program, bertitik tolak dari suatu argumen, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini lebih jauh mengemukakan, bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah:

a. Standar dan Tujuan

Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Standard dan tujuan ini bisa diartikan sebagai visi dan misi dari tempat penulis melakukan penelitian. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu tujuan kebijakan yang jelas, terencana dan terukur, sehingga dari ketentuan tersebut dapat terwujud.

b. Sumber Daya

Dalam Nawawi (2007) suatu implementasi kebijakan, dibutuhkan adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources), maupun sumber daya material (material resources), dan sumber daya metoda (method resources). Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek atau pelaksana implementasi kebijakan, juga termasuk objek atau pihak yang terdampak dari kebijakan publik yang diterapkan.

c. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Kast dan Rosenzweig dalam Nawawi (2007) mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atas dan bawah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Definisi tersebut memberikan petunjuk bahwa organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Beberapa faktor termasuk dalam bagian model ini, banyak karakteristik lembaga administratif yang mempengaruhi

kinerja kebijakan telah diidentifikasi oleh para ahli politik birokratik. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007), ada beberapa karakteristik yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain :

- (1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan,
- (2) Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses dalam badan pelaksana
- (3) Sumber daya lembaga politik, yaitu dukungan antara eksekutif dan legislatif
- (4) Vitalitas suatu organisasi
- (5) Tingkat komunikasi terbuka, yaitu bebas komunikasi horizontal dan vertikal, dan secara relatif tingginya tingkat kebebasan dalam komunikasi dengan orang-orang diluar organisasi atau dalam organisasi
- (6) Kaitan lembaga formal dan informal dengan pembuatan kebijakan atau tubuh kebijakan.

d. Sikap Pelaksana

Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Walgito dalam Nawawi (2007) mengungkapkan pendapat Thourndike, Skinner dalam Hergentahn bahwa perilaku manusia sebagian besar adalah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari, termasuk kaitannya dalam mempelajari aktivitas administrasi dalam organisasi dan manajemen. Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yang berupa pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yang berupa preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Menurut van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007), intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang akan tujuan dari program tersebut.

e. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksana

Winarno (2007) berkata bahwa implementasi akan berjalan dengan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan ke bawah didalam suatu organisasi, para komunikator dapat saja menyimpangkan atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja ataupun tidak. Pada tahun 1960, David K Barlo mengembangkan komponen-komponen komunikasi (Herbert G. Hicks), Silalahi dalam Nawawi (2007) yang terdiri dari : (1) Sumber, (2) Membuat sandi, (3) Pesan, (4) Saluran atau media, (5) Penerima, (6) Menguraikan sandi, (7) Pengertian, (8) Umpang balik, (9) Kegaduhan.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan variabel yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan karena akan berpengaruh terhadap output dari sebuah kebijakan. Winarno (2007) mengungkapkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk jadi pertimbangan dalam mempengaruhi yuridiksi dimana implementasi dilaksanakan :

- 1) Apakah sumberdaya ekonomi didalam wilayah yuridiksi pelaksana tersedia secara cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi ?
- 2) Sejauh mana kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan ?
- 3) Apakah sifat opini publik yang penting berhubungan dengan isu kebijakan?
- 4) Apakah elit membantu atau berlawanan dengan implementasi kebijakan ?

- 5) Apakah karakter/sifat-sifat pengikut dari wilayah organisasi pelaksana; apakah terdapat partisian yang mendukung kebijakan ?
- 6) Sejauh mana kelompok kepentingan swasta dimobilisasi dalam mendukung atau menentang kebijakan ?

Dengan demikian dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan, menggunakan 6 variabel diatas.

3. Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menimbang adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan. Proses pendataan tersebut agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka telah diatur Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tujuan dari Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum, bantuan sanksi denda administrasi kependudukan serta pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR berdasarkan Perwali Nomor 58 Tahun 2019 adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan. Masalah kemiskinan juga erat kaitannya dengan keterbatasan asset dan akses yang dimiliki oleh lapisan masyarakat MBR ini (Susanto dalam Ayuko, 2019)

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya dapat dibantu oleh kelurahan atau Perangkat Daerah terkait.

Penerbitan SKM yang dilakukan Kepala Dinsos berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) melalui fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait. Penerbitan SKM dilakukan melalui sistem paling lama 2 (dua) hari kerja dan tidak dipungut biaya apapun. SKM hanya berlaku untuk 1 orang anggota keluarga dan masa berlaku paling lama 2 bulan sejak terhitung tanggal penerbitan.

Jangka waktu pengumpulan data MBR untuk data aktif paling lama 2 hari kerja sejak data tersebut diketahui, sedangkan untuk data pasif dilaksanakan secara bertahap sampaidengan ditetapkan Keputusan Walikota. Data pasif tersebut akan dilakukan pemutakhiran data oleh Dinas Sosial yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait. Pemutakhiran data tersebut akan dilakukan apabila terdapat perubahan status dalam data pasif antara lain karena meninggal, pindah, dan adanya peningkatan ekonomi keluarga, serta dilakukan setelah kelurahan dan bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat memasukkan perubahan data dalam sistem. Kemudian, untuk data aktif yang pengumpulan

datanya dilakukan oleh Dinsos yang pelaksananya dibantu oleh kelurahan atau perangkat daerah terkait setelah itu mereka akan memasukkan hasil pemutakhiran dan pengumpulan data MBR pada sistem sesuai dengan formulir Pemutakhiran Data MBR.

Hasil pemutakhiran dan pengumpulan data yang diperoleh dari kelurahan atau perangkat daerah terkait sistem, kemudian akan dilakukan pengelolaan data dengan pemeringkatan MBR oleh Dinsos dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Pemeringkatan tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi. Metode PMT dilakukan dengan model perhitungan yhats (estimasi konsumsi), dimana hasil perhitungannya akan dikelompokkan dalam desil (desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4) dan penyebutannya adalah MBR. Data MBR tersebut akan ditetapkan secara berkala oleh Kepala Dinsos yang nantinya dijadikan sebagai bahan penetapan MBR oleh Walikota.

Pemanfaatan data MBR dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada MBR, Perangkat daerah wajib menggunakan data MBR untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah. Data MBR juga dapat digunakan untuk pelayanan pihak lainnya, Kepala Dinsos dapat menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah masuk data MBR. Data yang tercantum berupa No KK dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota yang statusnya keluarga yaitu suami/istri dan anak. Setiap individu yang telah tercantum dalam KK dapat memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah.

Proses pelaporan data, bahwa setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan intervensi wajib memasukkan data hasil intervensi pada sistem, yang dilakukan paling sedikit 1 bulan sekali. Pelaporan data yang dilakukan Perangkat Daerah, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan. Hasil pengolahan data tersebut dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepala Dinas Sosial.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya dan studi kasus di wilayah Kecamatan Tandes. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah pejabat struktural, staff, petugas validasi dan surveyor serta warga kecamatan Tandes. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan meliputi Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW dan SKPD lainnya. Adapun yang diatur dalam kebijakan tersebut proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota

Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya bisa dibantu RT/RW untuk pengajuan warga yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, kemudian hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR. RT/RW juga diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. dan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik.

Banyak yang akhirnya yang terbuka untuk membantu sesama dengan mengajukan permohonan warga sekitar yang kurang mampu. Petugas surveyor Dinas Sosial juga selalu menjaga komunikasi dengan RT/RW jika ada yang ditanyakan atau kurang paham terkait proses pengajuan MBR. Sedangkan pada penerbitan SKM adanya perubahan pertama Peraturan Walikota Surabaya nomor 53 tahun 2020 dan perubahan kedua Perwali Surabaya nomor 24 tahun 2021 yang isinya menghapus SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga yang Dinsos hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan SKM saja.

Penerbitan SKM dilakukan Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) kota surabaya yang memenuhi kriteria. Pelaksanaan pengumpulan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Faktor – faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dimana terdapat enam faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan tersebut. Berikut penjelasannya:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam studi implementasi, tujuan dan sasaran yang dilakukan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa Tujuan kebijakan yaitu untuk memperbaiki pendataan terkait masyarakat tidak mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan bantuan dan tepat sasaran karena datanya selalu diupdate. Dan kita menggunakan sistem penilaian mana warga yang lebih berhak mendapatkan intervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementerian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang setelah disurvei oleh surveyor yang dihitung berdasarkan skoring di sistem aplikasi. Nantinya yang masuk kategori MBR akan diberikan intervensi pemerintah. Mengenai pencapaian pelaksanaan kebijakan dan masyarakat didapati bahwa pencapaian pelaksanaan sudah cukup baik untuk pelayanan skm sekarang sudah menggunakan sistem online. Jadi untuk respon dan pelayanan dari Dinas Sosial lebih tanggap dan cepat. Dalam pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun ada disuatu wilayah terdapat kendala yaitu saat proses verifikasi kelurahan yang kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus dikerjakan sehingga untuk verifikasi data MBR jadi terlambat. Kurangnya petugas survey di kecamatan Tandes juga membuat proses pengajuan warga jadi terhambat. Berikut

sebagai penunjang terdapat tabel 1.2 ukuran target dan realisasi pendataan MBR dan survei SKM.

Tabel 1.2
Ukuran Target dan Realisasi Pendataan MBR dan Survei SKM

Tahun	Target		Realisasi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
2018	4992	100%	4992	100%
2019	4990	100%	4989	99%
2020	4996	100%	5002	101%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk tahun 2008 realisasi pendataan MBR dan survei SKM mencapai target 100%, sedangkan untuk tahun 2019 hanya 99% dari target, dan untuk tahun 2020 melebihi target pencapaian yaitu 101%.

b. Sumber Daya

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa saat ini jumlah dan kemampuan staf validasi dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas surveyor menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena semakin banyaknya masyarakat yang harus di survey di masa pandemi seperti ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan dikarenakan setelah diusulkan nama warga tersebut belum termasuk MBR di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas surveyor yang survey ke rumah warga. Untuk sarana prasarana berupa aplikasi berbasis website sudah cukup baik walaupun kadang ada masalah server masih dimaklumi. Ditemukan di lapangan khususnya wilayah manukan kulon petugasnya dirasa kurang sehingga proses pelaksanaannya lama. Kembali lagi ke individu masing-masing tergantung kemampuannya ada yang agak gagap teknologi ada yang langsung bisa.

Namun untuk kedepannya, agar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dan lebih baik lagi, perlu adanya penyegaran dan penambahan personil, atau dengan menyiasati jumlah pegawai yang ada, yaitu melakukan rolling antar pegawai agar pegawai tidak jenuh dengan pekerjaannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga jumlah staf yang menangani harus sesuai dengan beban kerja. Kekurangan jumlah pegawai dapat berakibat fatal terhadap implementasi kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan dapat tidak berjalan, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penambahan jumlah personil merupakan hal yang harus dilakukan agar kebijakan MBR dapat berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya, fasilitas fisik dan alokasi anggaran adalah salah satu sumber daya yang penting untuk menunjang pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial. Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, rincian alokasi anggaran tidak mengetahui secara detail. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem aplikasi berbasis website yang sudah bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Namun terkait alokasi anggaran ini masyarakat juga tidak mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Menurut

masyarakat, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang mana websitenya kadang ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

c. Komunikasi Antar Unit Organisasi

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan cara Komunikasi antara Organisasi dan Pelaksana Kebijakan menggunakan sistem aplikasi berbasis website sehingga SKPD lain bias mengambil data untuk melakukan intervensi dari pemerintah. Komunikasi antar pelaksana juga berjalan cukup baik, sering diadakannya rapat dan menghubungi via WA untuk memonitoring pelaksanaan kebijakan dengan melakukan sharing dan feedback terkait kendala di lapangan khususnya pekerjaan surveyor.

Penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi utama membuat komunikasi diantara semua pihak, baik dengan masyarakat ataupun SKPD berjalan dengan baik dan cepat, sehingga permasalahan yang dihadapi mampu terselesaikan secara cepat. Komunikasi yang terdapat dalam Dinas Sosial berlangsung cukup baik dengan koordinasi yang sering dilakukan. Hal ini mampu menciptakan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan MBR ini.

Jadi, komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong MBR. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah paham mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerintah seperti PKH padahal hanya update database warga. Adanya warga yang gagap teknologi, umur yang sudah tua, dan warga yang tidak update informasi Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi terkadang tidak dipahami dengan baik, sehingga petugas Dinsos harus mengulang dan menjelaskan kembali kepada masyarakat. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar.

Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Sosial dengan berbagai cara komunikasi yang diberikan saat ini telah mampu membantu masyarakat dalam memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mempermudah komunikasi sekarang Pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi "Wargaku". Aplikasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada warga surabaya dan sebagai media komunikasi karena bisa diakses dimanapun kapanpun. Upaya ini dirasa akan mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), didapati bahwa mulai proses skoring, survey data sampai

menilai mampu tidak mampu tetap wewenang Dinas Sosial. Kelurahan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bahwa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain yang berada dibawah wewenang Dinsos contohnya terkait pemberian data, misal Disnaker membutuhkan data MBR, tinggal mengambil di database epemutakiran data, dimana masing-masing dinas sudah mendapatkan akses user dan password sehingga tidak perlu mengirim surat atau sebaginya. Jadi artinya sudah terbangun di dalam sistem tanpa harus izin dll. Intinya mempercepat birokrasi. Di sistem kita itu sudah bagus contohnya ada warga yang membutuhkan SKM otomatis sudah sinkron di sistem di aplikasi diktii sudah terbaca bahwa sudah memiliki SKM. Kecuali data yang lebih spesifik harus berkoordinasi atau bersurat ke Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58 ini. Mulai 2021 ini itu perubahan kedua. Contoh evaluasi terkait warga surabaya yang berNIK Surabaya tapi beliau berkedudukan di luar Kota Surabaya jadi tetap diberikan pelayanan dengan memberikan reverensi. Sehingga Dinsos terus memberikan evaluasi yang terbaik supaya pemerintah juga tepat sasaran dalam memberi bantuan dan melayani warga yang tidak mampu semaksimal mungkin.

Menurut masyarakat Karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Sosial, Pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, contohnya pelayanan pengurusan SKM dari proses pendaftaran sampai terbitnya SKM cukup cepat hanya 2-3 hari, Petugas yang ada di dinas sosial juga ramah, menjelaskan dengan baik apabila saya kurang paham terkait informasi MBR dengan detail terkait alur proses pengajuan, Pelaksanaan kebijakan cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan dan masing-masing tugas pelaksana kebijakan, kalau misal gatau atau salah paham juga langsung dibenarkan oleh petugas surveyor yang mendampingi kami para RT/RW.

e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mencapai tujuan kebijakan sikap yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan mengerjakan tugas apapun yang diberikan pimpinan, serta pencapaian target. Dalam pengambilan keputusan sikap yang baik berdasarkan dari instruksi pimpinan yang sebelumnya sudah dikordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Untuk petugas survey lapangan sikap pelaksana yang dilakukan harus benar-benar melakukan survey dan data yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.

Dapat dilihat dari beberapa pendapat dari masyarakat menjelaskan bahwa sikap pelaksana yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut pelaksana sendiri sudah melakukannya sesuai aturan yang berlaku, dan bekerja/melayani sebaik mungkin demi kepuasan masyarakat. Menurut pendapat masyarakat sendiri pemerintah juga sudah memberikan pelayanan yang baik, memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik

Berdasarkan data hasil wawancara kepada informan, menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata

Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu dilihat dari kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan ekonominya rendah bisa dibilang tidak mampu, contohnya warga yang kurang mampu bisa langsung diusulkan jadi MBR.

Aspek sosial berpengaruh juga, dengan mendahulukan warga yang memang benar membutuhkan bantuan pemerintah. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga bisa membantu melapor kepada RT/RW. untuk terkait pengaruh partai politik, pihak Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi, intinya mereka juga membantu, memberikan usulan pada Dinas Sosial tetapi kembali lagi pada penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan laporan RT/RW, dan lain sebagainya.

V. Kesimpulan dan Saran

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan meliputi Dinas Sosial, Kelurahan, RT/RW dan SKPD lainnya. Adapun yang diatur dalam kebijakan tersebut proses pengumpulan data yang dilakukan berupa data pasif dan data aktif. Data pasif yang dimaksud adalah data MBR yang telah ditetapkan oleh Walikota Surabaya, sedangkan yang data aktif berupa data yang diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM) oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, dan hasil pendataan Dinsos yang pelaksanaanya bisa dibantu RT/RW yang sebelumnya sudah diberi pembekalan melalui sosialisasi oleh petugas surveyor. pengajuan warga yang masuk kategori MBR kemudian menunggu verifikasi dari kelurahan, hasil verifikasi tersebut di survey oleh petugas surveyor dari Dinsos, kemudian di skoring sehingga hasilnya bisa ditentukan warga tersebut masuk menjadi kategori MBR atau tidak.

Penghapusan SKBK (Surat Keterangan Bantuan Kesehatan) sehingga Dinsos hanya memiliki wewenang untuk menerbitkan SKM saja. Penerbitan SKM dilakukan Kepala Dinas Sosial berdasarkan pengajuan dari warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga (KK) kota surabaya yang memenuhi kriteria. Pelaksanaan pengumpulan Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan yaitu untuk memperbaiki pendataan terkait masyarakat tidak mampu diharapkan adanya data MBR ini, pemerintah kota surabaya bisa lebih mudah menyalurkan

bantuan dan tepat sasaran karena datanya selalu diupdate. Dan kita menggunakan sistem penilaian mana warga yang lebih berhak mendapatkan instervensi dari pemerintah. Intinya supaya tepat kita sinkronkan data yang dari Kementerian Sosial. Sasaran kebijakan itu warga yang setelah disurvei oleh surveyor yang dihitung berdasarkan scoring di sistem aplikasi. Nantinya yang masuk kategori MBR akan diberikan intervensi pemerintah. Mengenai pencapaian pelaksana kebijakan dan masyarakat didapati bahwa pencapaian pelaksanaan sudah cukup baik untuk pelayanan SKM sekarang sudah menggunakan sistem online. Jadi untuk respon dan pelayanan dari Dinas Sosial lebih tanggap dan cepat. Dalam pelayanan pengurusan SKM juga cukup baik. Ada yang mengurus SKM pendidikan dari pengajuan sampai SKMnya terbit kurang lebih waktunya 2-3 hari, sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun ada disuatu wilayah terdapat kendala saat proses verifikasi kelurahan yang kurang cepat, dikarenakan mungkin banyak tugas lain yang harus dikerjakan sehingga untuk verifikasi data MBR jadi terlambat. Kurangnya petugas survey di kecamatan Tandes juga membuat proses pengajuan warga jadi terhambat. Untuk hasil target pendataan ditahun 2018 mencapai target, 2019 kurang dari target, sedangkan 2020 melebihi target.

b. Sumber Daya

Jumlah dan kemampuan staf validasi dan surveyor sudah cukup bagus dilihat dari pencapaian target setiap harinya hasilnya tercapai. Namun alangkah baiknya setelah melihat keadaan di lapangan untuk petugas surveyor menurut hasil observasi peneliti dirasa kurang karena semakin banyaknya masyarakat yang harus di survey di masa pandemi seperti ini banyak warga yang terdampak, sehingga ditemukan ada beberapa kendala yang masih terjadi di lapangan seperti warga yang benar-benar membutuhkan intervensi namun belum dapat bantuan dikarenakan setelah diusulkan nama warga tersebut belum termasuk MBR di database. Bisa jadi dikarenakan pihak validasi dari kelurahan yang terlambat atau kurangnya petugas surveyor yang survey ke rumah warga. Terkait Alokasi anggaran pelaksana dan masyarakat tidak mengetahui secara detail, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem aplikasi berbasis website yang sudah bisa diakses oleh seluruh warga Surabaya. Menurut masyarakat, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang mana websitenya kadang ada gangguan tapi masih bisa ditolerir.

c. Komunikasi Antar Unit Organisasi

Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Surabaya. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara Dinsos dan pelaksana kebijakan sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti server dalam sistem aplikasi kadang sering lemot jika banyak yang buka. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos dengan masyarakat/RT dan RW dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi untuk mempermudah RT/RW dalam mengajukan warganya yang tergolong MBR. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan di masing-masing kelurahan. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam proses komunikasi dengan masyarakat adalah masih ada yang salah mengira MBR itu salah satu program bantuan pemerintah seperti PKH padahal hanya update database warga. Adanya warga yang gagap teknologi, umur yang sudah tua, dan warga yang tidak update informasi Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi terkadang tidak dipahami

dengan baik. Terlepas itu komunikasi lainnya berjalan dengan lancar. Menyikapi permasalahan tersebut untuk mempermudah komunikasi sekarang Pemerintah Kota Surabaya membuat aplikasi "Wargaku". Aplikasi tersebut untuk memberikan pelayanan kepada warga surabaya dan sebagai media komunikasi karena bisa diakses dimanapun kapanpun. Upaya ini dirasa akan mampu meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat kota Surabaya.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Dimulai dari proses scoring, survey data sampai menilai mampu tidak mampu tetap wewenang Dinas Sosial. Kelurahan tugasnya memverifikasi data yang sudah diinput RT/RW. Bawa hasil dari pelaksanaan MBR ini juga diperiksa BPK dan Kejaksaan terkait kebenarannya. komunikasi yang terjalin antara pelaksana lain yang berada dibawah wewenang Dinas Sosial. Terkait evaluasi, pemerintah juga melakukan evaluasi dari perwali 58 ini. Mulai 2021 ini itu perubahan kedua. Sehingga Dinsos terus memberikan evaluasi yang terbaik supaya pemerintah juga tepat sasaran dalam memberi bantuan dan melayani warga yang tidak mampu semaksimalmungkin. Menurut masyarakat Karakteristik badan pelaksana yaitu Dinas Sosial, Pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, contohnya pelayanan pengurusan SKM dari proses pedaftaran sampai terbitnya SKM cukup cepat hanya 2-3 hari, Petugas yang ada di dinas sosial juga ramah, menjelaskan dengan baik apabila saya kurang paham tertkait informasi MBR dengan detail terkait alur proses pengajuan, Pelaksanaan kebijakan cukup mudah. informasi terkait pelaksanaan dan masing-masing tugas pelaksana kebijakan, kalau misal gatau atau salah paham juga langsung dibenarkan oleh petugas surveyor yangdim mendampingi kami para RT/RW.

e. Kecenderungan Pelaksana Kebijakan

Untuk mencapai tujuan kebijakan sikap yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan mengerjakan tugas apapun yang diberikan pimpinan, serta pencapaian target. Dalam pengambilan keputusan sikap yang baik berdasarkan dari instruksi pimpinan yang sebelumnya sudah dikoordinasikan , supaya semua ikut andil dalam pengambilan keputusan yang sesuai. Untuk petugas survey lapangan sikap pelaksana yang dilakukan harus benar-benar melakukan survey dan data yang dimasukkan wajib sesuai fakta yang ada sehingga data yang dimasukkan valid.

Sikap pelaksana yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut pelaksana sendiri sudah melakukannya sesuai aturan yang berlaku, dan bekerja/melayani sebaik mungkin demi kepuasan masyarakat. Menurut pendapat masyarakat sendiri pemerintah juga sudah memberikan pelayanan yang baik, memberi tanggapan yang baik, dan sangat membantu apa yang dibutuhkan masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi Politik

Dilihat dari kondisi ekonomi, Sangat berpengaruh jika keadaan ekonominya rendah bisa dibilang tidak mampu, contohnya warga yang kurang mampu bisa langsung diusulkan jadi MBR. Aspek sosial berpengaruh juga, dengan mendahulukan warga yang memang benar membutuhkan bantuan pemerintah. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu RT untuk memberikan informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data MBR. namun semua itu wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Dan setalah terdaftar

MBR nantinya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk dukungannya kelompok masyarakat. LSM pernah ikut membantu juga, Ibu-ibu PKK atau perwakilan dari panti asuhan juga bisa membantu melapor kepada RT/RW. untuk terkait pengaruh partai politik, pihak Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi, intinya mereka juga membantu, memberikan usulan pada Dinas Sosial tetapi kembali lagi pada penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan laporan RT/RW, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan kegiatan sosialisasi untuk masyarakat agar tertib administrasi khususnya kalangan tidak mampu untuk memperbaiki data kependudukan sehingga saat nantinya mendapatkan intervensi bisa lancar dikarenakan kebutuhan administrasinya sudah beres.
2. Penambahan jumlah petugas/staf khususnya surveyor untuk menunjang pelaksanaan kebijakan MBR yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya. Perlu adanya pelatihan untuk pegawai-pegawai kelurahan agar mereka memiliki kompetensi yang semakin baik.
3. Perlu adanya perbaikan server aplikasi sehingga saat masyarakat banyak yang menggunakan, tidak menjadi lama dan eror. Dan perlu adanya perubahan sistem, supaya memudahkan masyarakat untuk bisa lebih banyak mendapatkan intervensi.
4. Rekomendasi penelitian selanjutnya bisa menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor dengan mix teori dari beberapa ahli.
5. Dengan adanya keterbatasan peneliti diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan penjelasan lebih spesifik dan jika dibutuhkan, bisa menggunakan mix kualitatif dan kuantitatif sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekowanti, Mas Roro Lilik. (2004). Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.
- Setijaneringrum, Erna, 2017, Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surabaya. Vol 3 No. 1, Hal-16.
- Nawawi M.Si, MPA, Prof, DR, H. Ismail. (2007). Administrasi Organisasi dan Manajemen : Kajian Paradigma, Konsep, Teori, dan Perilaku. Surabaya : VIV Gravika Surabaya.
- Resi Ariyasa dan tim, 2020, Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol II No.1, Hal 97
- S.A. Ayuko dan Ikaputra. 2019. Kajian Teoritik Hubungan Antara Pemilihan Lokasi Huni dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan Vol 17 No 1.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori & Proses. Edisi revisi, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Bbc.com. 2020. Virus corona: Data penerima bansos 'amburadul, Pak RT ketiban pulung'. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52651056>, diakses 22 Januari 2021)
- CNBC. 2020. Kekacauan Bansos Corona, Masalah Klasik Big Data. (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508133813-20-501305/kekacauan-bansoscorona-masalah-klasik-big-data>, Diakses pada 22 Januari 2021)

- Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (<https://epemutakhiranda.surabaya.go.id/mbr#> (diakses 06 Januari 2021)
- Data terupdate dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (<https://dtks.kemensos.go.id/>, diakses 22 Januari 2021)
- Prakiraan penduduk beberapa negara 2000-2014 (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>, diakses 02 Mei 2016)
- R. S. Dewi, 2020. Berita - Ombudsman RI. (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--evaluasi-penyaluran-bantuan-sosial-bansostahap-satu-covid-19-> , Diakses pada 22 Januari 2021)
- Sonora Surabaya. 2020. Surabaya Gunakan Data MBR untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan(<https://sonorasurabaya.com/surabaya-gunakan-data-mbr-untuk-percepat-pengentasan-kemiskinan/>, diakses 06 Januari 2021)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

INOVASI PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK SUROBOYO BUS RAPID TRANSIT RUTE UTARA - SELATAN

Sela Febrina*
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: selafena@gmail.com

Abstract

Improving the service quality is required to fulfill the community necessities for secure mass transportation, and to acquire comfortable, safe, and affordable services. Through public transportation innovation in Bus Rapid Transit (BRT), Suroboyo Bus is expected to be able to motivate the public enthusiasm to change over the use of public transportation services. It is also expected to increase public satisfaction toward the services in mass transportation. Furthermore, the study aims to figure out how the innovation of public transportation service in BRT (Bus Rapid Transit) which is called as Suroboyo Bus with north to south route. This is qualitative descriptive study using interview, documentation, and observation analysis in the data collection techniques. The study uses the theory of transportation service innovation from Rogers in Yogi Suwarno (2008). The results indicate the innovation of public transportation services that have been implemented by the Surabaya government in collaboration with the Transportation Office and Sanitary and Open Space Cleanliness Office. This program has been conducted well, however, it requires some improvements because it has lack of bus stops resulting in the limitation of places that can be passed by Suroboyo Bus. Moreover, the number of Suroboyo Bus fleets should be increased.

Keywords: Bus Rapid Transit, Cooperation, Public Transportation, Service Innovation

I. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan pemerintah dan aparatur pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dalam penilaian kualitas pelayanan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau, mudah, dan terukur. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, biro jasa pelayanan, biaya pelayanan khusus, pengawasan penyelenggaraan, tingkat kepuasan masyarakat, penyelesaian pengaduan, dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu kota yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi di Indonesia adalah kota Surabaya, dengan luas wilayah 326,36 km² dan jumlah penduduk 2.599.796 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan meningkat pula jumlah kendaraan pribadi yang menyebabkan Kota Surabaya memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Maka tidak heran apabila kemacetan menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh kota-kota besar. Banyaknya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong pertambahan penggunaan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor dan mobil. Hal ini terjadi karena tidak adanya transportasi umum yang aman, nyaman dan

tepatis waktu, akibatnya, kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari khususnya pada jam-jam sibuk.

Berdasarkan hasil survei Tempo.Co Surabaya Standard Castrol Magnatec Stop-Start Index, menyebutkan Surabaya sebagai kota termacet keempat di dunia, dengan rata-rata 29.880 kali berhenti dan berjalan untuk setiap kendaraan setiap tahunnya. Selain itu, bus memiliki tempat pemberhentian yang jelas dan tidak sembarangan mengangkut orang, sehingga dapat mempersingkat waktu tempuh. Surabaya sebagai kota metropolitan, membutuhkan moda transportasi publik yang bisa mengatasi permasalahan yang ada, salah satunya adalah kemacetan. Transportasi publik penting dalam sistem kota, karena angkutan umum merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, karena transportasi publik memiliki peran penting didalam menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Tidak hanya melancarkan aktivitas untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, adanya transportasi publik dapat meminimalisir angka kemacetan yang ada.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pembenahan secara bertahap di bidang transportasi, khususnya angkutan umum. Ini menjadi pekerjaan utama agar masyarakat dapat beralih secara perlahan dari transpotasi pribadi ke transportasi umum, guna mengatasi kepadatan kendaraan dijalan dan mengurangi kemacetan yang ada di kota Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus berupaya memperbaiki sarana transportasinya agar lebih layak jalan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus melakukan inovasi terhadap transportasi bus yang ada di Kota Surabaya. Pada tahun 2007 Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan inovasi dengan mengeluarkan bus sekolah. Bus sekolah memiliki tujuan untuk mengangkut anak sekolah yang beroperasi dijam berangkat sekolah dan pulang sekolah. Sasaran bus sekolah adalah anak sekolah bukan masyarakat umum.

Tidak berhenti disitu Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus meningkatkan inovasi, pada Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Surabaya kembali melakukan inovasi dan meluncurkan Suroboyo bus yang diperuntukan untuk masyarakat umum dan Suroboyo Bus Tumpuk. Suroboyo Bus merupakan sarana transportasi yang baru guna menunjang kegiatan masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang. Dengan adanya inovasi Suroboyo Bus ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan padatnya lalu lintas di titik tertentu di Kota Surabaya. Selain untuk mengurangi kemacetan, transportasi publik BRT Suroboyo bus ini juga mendukung upaya ramah lingkungan, karena hal unik yang membedakan Suroboyo Bus dengan bus yang lain adalah dalam pembayarannya. Masyarakat diharuskan memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati layanan Suroboyo Bus. Masyarakat diharuskan menyerahkan sampah untuk mendapatkan layanan Suroboyo Bus, dengan menukar sampah plastik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah

II. Landasan Teori

Pelayanan merupakan terjemahan dari kata service yang berarti layanan. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai perihal atau cara meladeni dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat diartikan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayan publik.

Inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang

menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain. Dalam melakukan proses inovasi, inovasi pelayanan publik memiliki aspek untuk mengetahui keoptimalan sebuah inovasi. Indikator inovasi pelayanan publik menurut Rogers dalam Yogi Suwarno (2008) : Keuntungan relatif (*relative advantage*); Kesesuaian (*compatibility*); Kerumitan (*complexity*); Kemungkinan dicoba (*trialability*) dan Kemudahan diamati (*observability*)

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif mengacu pada pendapat Moleong (2000) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau participant observation (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif dengan menampilkan gambar situasi khusus, kegiatan sosial atau hubungan informasi sosial yang sedang diselidiki ataupun diteliti. Sesuai dengan ciri-ciri dan tujuan penelitian deskriptif. "Bawa tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki". Pendapat lain penelitian deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional yang akurat. (H. Sudjarwo, 2001). Tujuan penelitian untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik tentang inovasi pelayanan transportasi publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara-Selatan Suroboyo bus.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan Kota Surabaya merupakan Kota terbesar kedua setelah Jakarta dan satu-satunya Kota yang menerapkan Inovasi Pelayanan Transportasi Publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara-Selatan, khususnya dalam melakukan pembayaran dengan cara menukarkan sampah botol plastik.

IV. Hasil dan Pembahasan

Inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah bagi perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan kenyataan yang semakin berkembang dalam situasi pelayanan publik saat ini, BRT adalah moda transportasi massal berbasis bus yang mempunyai desain, pelayanan dan infrastruktur yang dikustomisasi untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyingsirkan hal-hal seperti penundaan kedatangan dan keberangkatan yang sering ditemui pada sistem bus biasa. BRT menawarkan mobilitas, biaya terjangkau, jalur khusus, halte yang tertutup, sistem pembayaran di halte bus dan sistem informasi yang baik bagi penumpangnya.

Bagian ini menyajikan dan menganalisa temuan di lapangan yang berhubungan dengan Inovasi Pelayanan Transportasi Publik. Deskripsi pada bagian ini menguraikan Inovasi Pelayanan Transportasi Publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara - Selatan Suroboyo oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menunjuk Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Kota Surabaya untuk menjalankan inovasi tersebut. Inovasi ini dapat dianalisis dengan teori atribut inovasi oleh Rogers dalam Yogi Suwarno (2008) sebagai jawaban atas permasalahan dan kebutuhan

pelayanan publik. Adapun atribut inovasi yang ada dalam inovasi pelayanan Transportasi Publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara - Selatan Suroboyo, sebagai berikut:

Keuntungan relatif (*relative advantage*)

Masyarakat antusias dalam menggunakan transportasi publik Suroboyo Bus. Semua lapisan masyarakat antusias dan turut terlibat dalam dalam menggunakan Suroboyo bus, mulai dari anak kecil, remaja hingga orang tua. Selain itu, yang ikut menggunakan Suroboyo Bus adalah pelajar, pekerja dan ibu rumah tangga. Semua lapisan masyarakat antusias dan turut terlibat dalam menggunakan Suroboyo Bus, mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang tua. Selain itu, yang ikut menggunakan Suroboyo Bus adalah pelajar, pekerja, dan ibu rumah tangga

Hasil temuan di lapangan tentang Suroboyo Bus dapat disimpulkan bahwa, pandangan masyarakat terhadap inovasi ini sangat positif serta masyarakat sangat antusias dengan adanya inovasi pelayanan transportasi Suroboyo Bus, hal ini dibuktikan pada saat Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Suroboyo Bus pada 7 April 2018 masyarakat Kota Surabaya antusias terhadap adanya inovasi transportasi publik yang ada di Kota Surabaya, sehingga jumlah penumpang yang berpartisipasi pada Juli 2019 sebanyak 1.047.296 penumpang.

Masyarakat turut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk menanggulangi sampah plastik. Dalam hal ini, masyarakat terlibat langsung menanggulangi sampah, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah botol plastik untuk dapat menggunakan transportasi publik, dan sampah tersebut ditukarkan untuk mendapatkan 1 tiket yang berlaku selama 2 jam. Selain itu, hal unik lainnya yang akan selalu diingat oleh pengguna Suroboyo Bus yaitu adanya kursi khusus untuk wanita. Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor budaya Suroboyo bus yaitu adanya keunikan tentang pembayaran menggunakan sampah botol plastik menjadi daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi publik Suroboyo Bus ini.

Kesesuaian (*compatibility*)

Masyarakat merasakan manfaat dari adanya transportasi publik Suroboyo Bus. Dalam proses penelitian, penulis menemukan tanggapan masyarakat yang merasakan adanya manfaat dari Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Seperti memiliki transportasi publik yang aman, nyaman, bersih, dan terjadwal. Dari adanya inovasi ini, masyarakat dapat menggunakan transportasi yang murah untuk keliling Kota Surabaya, hanya dengan menggunakan sampah botol plastik saja.

Hasil analisa di lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya inovasi Suroboyo Bus telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan pengguna Suroboyo bus yang turut merasakan manfaat dari fasilitas Suroboyo Bus yang aman, nyaman, dan bersih

Kerumitan (*complexity*)

Adanya teknologi membuat pelayanan semakin baik, dan melalui sampah botol plastik dapat membantu pemerintah dalam upaya ramah lingkungan. Dalam pelayanan inovasi transportasi publik Suroboyo Bus, pemerintah telah mempermudah masyarakat Kota Surabaya agar dengan mudah mendapatkan informasi tentang Suroboyo Bus melalui sebuah aplikasi yang bernama GOBIS. Melalui aplikasi tersebut pengguna dapat mengetahui keberadaan bus, halte yang akan dilalui oleh Suroboyo Bus, dan informasi lainnya terkait Suroboyo Bus. Selain itu, membayar menggunakan sampah botol plastik membuat masyarakat Kota Surabaya antusias dalam menggunakan transportasi publik ini, dikarenakan selain membantu upaya ramah lingkungan, inovasi ini dapat menghemat

pengeluaran masyarakat Kota Surabaya. Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan transportasi publik Suroboyo Bus tidak memiliki tingkat kerumitan dalam pelayanannya. Hal ini dikarenakan adanya aplikasi Suroboyo Bus (GOBIS) yang membantu dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan Suroboyo Bus.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan yang menjabarkan aktivitas operasional atau tahapan suatu proses kerja sehingga pihak yang terlibat di dalamnya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dalam pelaksanaan layanan inovasi Suroboyo Bus yang ada saat ini, telah berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, seperti membayar menggunakan sampah botol plastik, mentaati semua kondisi instruksi dari *helper/crew* Suroboyo Bus, menjaga kebersihan di dalam Suroboyo Bus.

Mekanisme di dalam pelaksanaan Suroboyo Bus terkait layanan sudah memudahkan pengguna Suroboyo Bus, karena sudah terdapat di aplikasi dan sudah tertera di dalam Suroboyo Bus, sehingga hal ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait layanan Suroboyo Bus. Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Standar operasional prosedur (SOP) sudah jelas, hal ini dikarenakan dalam pembuatan inovasi transportasi publik, Pemerintah Kota Surabaya sudah merencanakan inovasi ini dengan sangat baik.

Kemungkinan dicoba (*triability*)

Pembayaran inovasi Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik membantu mengurangi pengeluaran masyarakat Kota Surabaya untuk transportasi mereka. Dengan botol plastik, masyarakat dapat menggunakan alat transportasi murah untuk dapat mengantarkan mereka ke tempat yang dituju, seperti sekolah, kantor. Selain itu, nilai dari adanya inovasi ini juga dapat dirasakan, karena membayar menggunakan sampah botol plastik merupakan upaya ramah lingkungan dan untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Surabaya. Hasil analisa di lapangan dapat disimpulkan bahwa Suroboyo Bus memiliki nilai tambah dan berhasil membantu masyarakat secara ekonomi, dan sekaligus membantu pemerintah dalam upaya ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan melalui pembayaran berupa sampah botol plastik yang digunakan oleh pengguna untuk dapat menggunakan transportasi publik Suroboyo Bus.

SOP dalam pelaksanaan layanan Suroboyo Bus mengandung 13 point, salah satunya seperti membayar menggunakan sampah botol plastik, mentaati instruksi dari *helper/crew* Suroboyo Bus, menggunakan kursi prioritas sesuai dengan peruntukannya, berhak mendapatkan karcis/tanda bukti menggunakan Suroboyo Bus, dan berhak mendapatkan informasi terkait perjalanan menggunakan Suroboyo Bus. Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pengguna yang akan menikmati layanan Suroboyo Bus telah mengikuti mekanisme layanan Suroboyo Bus, Hal ini didukung melalui pengguna yang akan menggunakan layanan Suroboyo Bus akan menukar sampah botol plastik untuk mendapatkan 1 tiket perjalanan Suroboyo Bus yang berlaku selama 2 jam.

Kemudahan diamati (*observability*)

Temuan di lapangan, inovasi Suroboyo Bus mendapat apresiasi dan antusias dari masyarakat Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan inovasi ini cukup unik, yaitu dengan membayar menggunakan sampah botol plastik masyarakat dapat menggunakan transportasi ini untuk kegiatan mereka sehari-hari. Misal untuk berangkat ke kantor, ke sekolah, atau hanya sekedar untuk keliling Kota Surabaya. Membayar menggunakan sampah botol plastik menjadi daya tarik untuk masyarakat mencoba transportasi ini, karena hanya mengumpulkan 10 gelas plastik air minum atau 5 botol plastik air minum

ukuran 600 ml atau 3 botol plastik air minum ukuran 1.5 L sebagai ganti karcis tiket naik bus, kita sudah dapat menggunakan Suroboyo Bus.

Pada akhirnya tujuan dari partisipasi publik adalah untuk mendidik dan memberdayakan pengguna Suroboyo Bus untuk turut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam upaya ramah lingkungan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Surabaya turut berpartisipasi menggunakan Suroboyo Bus. Hal ini dapat dibuktikan melalui jumlah penumpang yang menggunakan Suroboyo Bus meningkat setiap bulannya. Seperti pada bulan Mei 2019 sebanyak 74.505 penumpang, di bulan Juni sebanyak 82.548 penumpang.

Respon yang diterima masyarakat dari adanya Suroboyo Bus sangat baik. Masyarakat antusias menggunakan Suroboyo Bus karena fasilitas yang disediakan sangat nyaman, mulai dari kebersihan bus, keamanan, adanya *AC (Air Conditioner)*, dan kursi khusus untuk wanita. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat mencoba dan menggunakan Suroboyo Bus untuk kegiatan sehari-hari. Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa inovasi program Suroboyo mendapatkan respon yang positif masyarakat. Hal ini didukung melalui adanya respon yang positif dari masyarakat pengguna Suroboyo Bus

V. Kesimpulan dan Saran

BRT (Bus Rapid Transit) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik di bidang transportasi. Inovasi Pelayanan Transportasi Publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara – Selatan Suroboyo bus merupakan sebuah inovasi Pemerintah Kota Surabaya yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Kota Surabaya. Kerjasama kedua Dinas tersebut melalui pembayaran Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Kota Surabaya, sedangkan untuk Suroboyo Bus sendiri dikelola oleh Dinas Perhubungan. Inovasi transportasi publik BRT (Bus Rapid Transit) Suroboyo Bus mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Surabaya pada saat peluncuran pada tanggal 7 April di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Inovasi Pelayanan Transportasi Publik BRT (Bus Rapid Transit) Rute Utara - Selatan Suroboyo Bus yang menggunakan pengukuran inovasi oleh Yogi Suwarno (2008) dengan 5 indikator menunjukkan bahwa empat indikator inovasi terpenuhi yaitu: Pandangan masyarakat tentang adanya sebuah inovasi dan pelayanan transportasi publik Suroboyo bus sangat positif, dan bermanfaat langsung kepada para pelajar dan karyawan. Pemerintah Kota Surabaya telah mempermudah masyarakat Kota Surabaya agar mendapatkan informasi tentang Suroboyo Bus melalui sebuah aplikasi yang bernama GOBIS, Suroboyo Bus juga memiliki nilai tambah dan berhasil membantu masyarakat secara ekonomi, dan sekaligus membantu pemerintah dalam upaya ramah lingkungan.

Saran

Perwujudan optimal dari Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan transportasi publik adalah menjadi hal yang vital di kota Surabaya. Terlebih kota Surabaya sebagai kota metropolitan. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi tentang inovasi pelayanan transportasi publik Suroboyo Bus sebagai berikut:

1. Perlu adanya tambahan halte pada rute Utara-Selatan Suroboyo Bus agar masyarakat bisa menggunakan transportasi Suroboyo Bus ke banyak tempat.
2. Perlu tambahan armada bus agar masyarakat Kota Surabaya tidak menunggu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Aminah, Siti. *Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*. Universitas Airlangga : Jurusan Ilmu Politik FISIP
- Mata-mata Politik. 2020. Problematika Bus Suroboyo : Sampah Menumpuk Hingga Calo Tiket. Diakses pada 16 April 2020, dari <https://www.matamatapolitik.com/problematika-bus-suroboyo-sampah-menumpuk-hingga-calo-tiket-original-news-polling/>
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 1993. Keputusan MenPAN Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Layanan Umum, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan MenPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Daerah Kota Surabaya tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
- Republik Indonesia. 2014. UU nomor 23 tahun 2014 tentang inovasi daerah
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja
- Republik Indonesia. 2017. PP nomor 38 tahun 2017 yang menjelaskan mengenai tentang inovasi daerah
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Tempo.co. (2020, 17 Agustus). Surabaya Termacet Keempat, Risma: ApaUkurannya?. Diakses pada 5 Februari 2015, dari <https://nasional.tempo.co/read/640167/surabaya-termacet-keempat-risma-apa-ukurannya/full&view=ok>

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PERTANIAN MINAPADI DI DESA BANJARASRI KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO

Alfredo Putra Pratama¹, Sri Wahyuni^{2*}, Agus Wahyudi³

^{1,2,3}Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: srwh_yuni@yahoo.com

Abstract

Sidoarjo has experienced land use changes, especially in the agricultural sector. Banjarasri is one of the areas that tends to decline in rice production. Increasing market demand optimizes agricultural land and becomes very effective through the implementation of Minapadi farming system. Minapadi combines rice and fish cultivation in one area, so that it can increase farmers' income because it is effective and efficient in terms of time and yield. The purpose of this study is to describe and analyze community empowerment program through Minapadi farming in Banjarasri. The study uses qualitative research method with a narrative approach using community empowerment theory. Data collection techniques use interview, observation, and documentation. The result shows that the economic improvement in Banjarasri community is obtained through a community empowerment program, namely Minapadi agricultural system. The first recommendation is suggested by Banjarasri government to develop Minapadi tourism village so that the community will be more prosperous. The second recommendation is also suggested by the government to invite the farmers in implementing community empowerment. Furthermore, community empowerment in the Minapadi agricultural system is effective in improving the community-level economy even though only a few farmers do this program.

Keywords: community empowerment, agriculture.

I. Pendahuluan

Maraknya peralihan lahan dari lahan produktif pertanian ke dalam bentuk lain seperti perumahan, perhotelan, dan apartemen menjadikan sektor pertanian harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah kendala luas wilayah pertanian yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, baik secara jumlah, luas, dan kualitas wilayah pertanian. Jumlah penduduk yang semakin meningkat seharusnya kebutuhan pangan ataupun pasokan pangan juga harus ada peningkatan produktivitasnya. Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena kebutuhan pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Fakta yang terjadi dilapangan justru peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan produksi pertanian yang ada. Oleh karena itu hal ini menjadi tantangan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan sebuah wilayah yang tahan terhadap pangan. Sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam (UU NO. 22, 1999) dan (PP No. 25, 2000), maka pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan dipusat dan daerah yang dijabarkan dalam program pembangunan sistem ketahanan

pangan, diletakkan sesuai dengan peta kewengangan pemerintah. Peralihan lahan produktif pertanian lebih masif digunakan untuk tingginya pembangunan pemukiman dan juga perumahan yang tiap tahunnya semakin melonjak jauh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anny mulyani, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, 2016) yang menyebutkan bahwa laju konversi lahan sawah nasional diperkirakan sebesar 96. 512 Ha (Sembilan puluh enam ribu lima ratus dua belas hektar). Dengan tingkat laju tersebut, diperkirakan akan terjadi penyusutan lahan sawah dari lahan sawah yang ada sekarang seluas 8,1 (delapan koma satu) juta Ha menjadi hanya sekitar 5,1 (lima koma satu) juta Ha pada tahun 2015. Tingkat konversi lahan sawah di luar Jawa lebih tinggi daripada di pulau Jawa. Di luar Jawa mencapai 132 (seratus tiga puluh dua) ribu Ha per tahun sedangkan dipulau jawa sebesar 56 (lima puluh enam) ribu Ha per tahun. Koversi lahan sawah di luar Jawa digunakan untuk pembangunan sarana publik dan perumahan sedangkan di pulau Jawa lebih dominan untuk pembangunan perumahan. Hal ini tentunya akan mengancam ketahanan pangan nasional (Anny mulyani, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, 2016).

Perlindungan terhadap lahan pertanian telah ditetapkan dalam (Undang-Undang Nomor 41 pasal 17, 2009) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Secara umum dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 3 (tiga) strategi yaitu yang pertama memperkecil peluang terjadinya alih fungsi, Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya alih fungsi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran dapat dilakukan pemberian insentif kepada pemilik sawah yang memiliki potensi untuk dirubah. Dari sisi permintaan dapat dilakukan pengendalian lahan sawah dengan cara mengembangkan pajak tanah yang progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada lahan terlantar, dan mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya dengan membangun rumah susun. Yang kedua mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan yang ketiga instrumen pengendalian alih fungsi lahan.

Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten yang terus mengalami alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan mengakibatkan luas lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo khususnya padi sawah cenderung mengalami penurunan. Lahan yang paling banyak mengalami ahli fungsi adalah jenis lahan sawah menjadi lahan kering dan lahan non – pertanian, seperti digunakan untuk bangunan dan lainnya. Pembangunan daerah berpengaruh besar terhadap peningkatan permintaan untuk mengalih fungsi lahan pertanian menjadi non – pertanian yang juga menyebabkan penurunan luas lahan pertanian. Hal ini terlihar dari tahun 2013 – 2016, luas lahan pertanian yang semula 18.000 (delapan belas ribu) Ha menjadi 12.500 (dua belas ribu lima ratus) Ha (Dinas Pertanian, Perkebunan, 2011). Di Kabupaten Sidoarjo dalam menyikapi banyaknya alih fungsi yang terjadi saat ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan beberapa peraturan yang akan mengendalikan yaitu, yang pertama (Perda No. 6, 2009) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029 di Kabupaten Sidoarjo dan yang kedua (Undang-Undang No. 41, 2009) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain beras sebagai kebutuhan pokok yang mendukung ketahanan pangan dari sektor pertanian, ikan juga menjadi komoditi unggulan disektor perikanan. Ikan sebagai sumber protein hewani mulai dilirik masyarakat karena sangat bermanfaat untuk kebutuhan nutrisi masyarakat dan bagus bagi kesehatan. Setiap tahunnya angka produksi dan permintaan pasar selalu mengalami peningkatan berdasarkan data dari KKP RI. Tingkat komsumsi ikan juga mengalami peningkatan, sebagai upaya mengatasi luas lahan pertanian yang semakin menurun, pemenuhan kebutuhan beras sebagai makanan pokok, dan permintaan ikan komsumsi yang semakin meningkat dapat dilakukan intensifikasi yang berguna dengan mengoptimalkan lahan yang ada yaitu dengan cara menerapkan pertanian

terpadu seperti mengintegrasikan aspek pertanian dan aspek perikanan dengan penerapan budidaya minapadi yang salah satunya terdapat di Desa Banjarasri.

Desa Banjarasri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Desa Banjarasri terletak dipinggiran Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 245,75 (dua ratus empat puluh lima koma tujuh lima) Ha, serta sudah berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Pasuruan. Sejarah terbentuknya Desa Banjarasri ini tidak beda jauh dengan istilah jawa kuno dimana kata banjar mempunyai arti barisan yang lurus sedangkan kata asri mempunyai arti baik. Sehingga jika diartikan dalam bahasa adalah sebuah desa yang mempunyai barisan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini memang dibenarkan bahwa desa tersebut dilewati oleh dua aliran sungai yang sangat berfungsi untuk keberlangsungan pertanian khususnya untuk irigasi serta berfungsi juga untuk keberlangsungan perikanan air tawar, sehingga penduduk setempat banyak bergerak dibidang pertanian baik tanaman padi maupun perikanan. Namun semakin majunya perkembangan zaman penduduk melakukan peningkatan taraf hidupnya dengan mengembangkan penggabungan pertanian dan perikan dalam satu lahan yang biasanya disebut sistem pertanian Minapadi. Lahan pertanian di Desa Banjarasri memiliki luas lahan sekitar 115,92 (seratus lima belas koma Sembilan puluh dua) Ha, sebagian besar masyarakat desa berpenghasilan sebagai petani sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) orang. jika musim hujan datang lahan pertanian sering tergenang air dikarenakan curah hujan dan saluran irigasi di Desa Banjarasri kurang baik dengan mengakibatkan tanaman padi menjadi rusak sehingga petani menalami kerugian yang sangat besar. Bahkan rumah – rumah warga tergenang banjir sampai 1 bulan tidak surut – surut air-nya dikarenakan saluran irigasi kurang baik. Untuk mengurangi kerugian yang sangat besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Desa Banjarasri dan masyarakat menerapkan sistem pertanian minapadi.

Montazeri, menyebutkan bahwa minapadi adalah salah satu teknologi lahan pertanian untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagai antisipasi anomali iklim, karena minapadi ini adalah budidaya terpadu yang dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah, yaitu peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan kondisi padi 10%, peningkatan keragaman hasil pertanian karena menghasilkan ikan, meningkatkan kesuburan tanah dan air (mengurangi pupuk 30%), juga dapat mengurangi hama penyakit wereng coklat pada tanaman padi (Montazeri, 2012). Menurut Surtida, minapadi mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia, dimulai dari abad ke-9 di Jawa barat (Sutrida, 2000). Demikian juga, Cruz mengemukakan bahwa umumnya petani telah mengembangkan sistem pertanian yang sekarang digunakan (Cruz, 2017). Sistem budidaya padi yang diperlakukan secara luas di lahan irigasi di Jawa Barat meliputi 3 (tiga) macam sistem, yaitu : sistem minapadi, sistem penyelang dan sistem palawija-ikan. Sedangkan di Jawa Timur juga telah dilakukan pengintegrasian antara padi dan ikan yang lebih dikenal dengan sebutan sawah tambak. Dengan demikian, minapadi bukan hal yang baru dikalangan petani padi dan petani ikan (Nurhayati, A., Lili, W., Herawati, T., & Riyantini, 2016). Mina padi merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi (Integrated Fish Farming/IFF), sebagai penyelang diantara dua musim tanam padi, atau pemeliharaan ikan sebagai pengganti palawija di persawahan (Bobihoe J, 2015).

Minapadi telah banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan petani, menahan ahli fungsi lahan pertanian. Budidaya minapadi juga mampu menyerap tenaga kerja dan menambah lahan produksi ikan guna mencapai target produksi ikan lokal. Keuntungan bagi petani minapadi adalah keuntungan panen ganda dari ikan dan padi. Sistem pertanian minapadi akan memberikan keuntungan kepada petani selama 30 – 40 (tiga puluh sampai empat puluh) hari memelihara ikan disawah bersama padi sebesar RP. 15.400.000,- / 5 Ha (lima belas juta empat ratus ribu per lima hektar) atau Rp. 3.080.000 / Ha (tiga juta delapan puluh ribu per hektar) produktifitasnya sistem pertanian minapadi

lebih tinggi daripada non minapadi. Budidaya minapadi sebagai budidaya pangan sehat, berupaya menjadi dasar petani untuk mengarahkan pada pola-pola perlakuan pertanian organik merupakan salah satu budidaya tanaman dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh atau dihasilkan secara alami tanpa campuran pupuk kimia dan penggunaan pestisida kimia industri.

Ditinjau dari ilmu ekologi, sistem teknologi pertanian minapadi memberikan kemampuan untuk memberikan impack produktivitas lahan pertanian dan juga dapat berfaedah secara sisi ekologis, ekonomi dan sosial. Secara ekologis sistem budidaya minapadi ini sangat ramah lingkungan, dan juga sangat memberikan efek positif bagi lingkungan. Sistem minapadi secara tidak langsung memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan tanaman padi dan juga perkembangan ikan yang hidup di dalamnya. Kotoran ikan nantinya akan menjadi pupuk yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi, sehingga produksi padi mampu meningkat secara signifikan. Ditinjau dari aspek sosial, sistem mina padi memberikan peluang bagi masyarakat agar mereka mampu bertani secara produktif sehingga penghasilan secara ekonomi pun juga akan meningkat. Selain itu, dari aspek ekonomi sistem minapadi dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi guna mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu teknologi sistem budidaya minapadi menjadi alternatif dan terobosan baru untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan.

Terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam menerapkan sistem minapadi ini (Sasa, J. J., Partohardjono, S., & Fagi, 2003). Hal ini sangat bergantung pada ketersediaan irigasi di daerah tersebut, benih ikan yang tersedia dengan kualitas yang bagus, adanya pasar yang mendukung untuk pemasaran produk ikan dan padi yang dihasilkan, curah hujan dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Pengolahan minapadi ini memanfaatkan kearifan lokal yang sudah ada di suatu daerah, dengan cara memanfaatkan unsur-unsur yang ada di alam (Nurhayati, A., Lili, W., Herawati, T., & Riyantini, 2016). Selain kesesuaian lahan, jaringan irigasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem minapadi (Cahyaningrum W, 2014). Lantarsih berpendapat bahwa jenis tanah yang baik yang digunakan dalam sistem minapadi adalah tanah yang sifatnya tidak porous, yaitu tanah lempung (Lantarsih, 2012). Perubahan iklim yang terjadi saat ini membuat sistem minapadi sebagai pilihan yang bijak dalam mengoptimalkan lahan pertanian padi. Oleh karena itu, review dan analisis tentang keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam penerapan minapadi sangat penting.

Menurut Nurhayati, (2016) dalam minapadi terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara padi, ikan, air dan tanah untuk mencapai kondisi keseimbangan ekologis (Nurhayati, A., Lili, W., Herawati, T., & Riyantini, 2016). Ikan memakan tumbuh-tumbuhan kecil (gulma) yang tumbuh di sekitar tanaman padi sehingga persaingan antara padi dan gulma dalam menyerap nutrisi dapat dikurangi. Ikan tidak hanya memakan tumbuh-tumbuhan kecil (gulma) yang hidup di sekitar tanaman padi tetapi ikan juga memakan binatang-binatang kecil yang merupakan hama padi. Hal ini berakibat pada turunnya populasi hama dan penyakit tanaman padi. Minapadi membuat pertanian menjadi sesuatu yang menarik terutama bagi generasi muda. Mengurangi tingginya urbanisasi, karena generasi muda dapat memajukan desanya dengan terjun dalam bidang pertanian sehingga mengurangi ketergantungan dalam mencari pekerjaan di kota. Keuntungan lain dengan adanya minapadi yaitu terciptanya pemberdayaan masyarakat dan keharmonisan dalam kelompok pemberdayaan masyarakat yang di maksud adalah masyarakat desa dapat mengembangkan sistem minatani untuk di terapkan di lahan sawahnya yang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat

II. Landasan Teori

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti tenaga, upaya, kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Selain itu pemberdayaan

juga berasal dari bahasa Inggris "empower" yang mengandung dua pengertian yang pertama adalah to give power or authority to/ memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada lain, sedangkan pengertian yang kedua yaitu to give ability to or enable/ upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Sulistiyani, 2004). Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata empowerment, yaitu mewujudkan potensi yang telah dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses atau metode untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas sosial. Melalui kegiatan tertentu yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan menurut Rusmiyati menyatakan bahwa pemberdayaan adalah cara orang, organisasi, dan komunitas dapat mengontrol kehidupan mereka, atau bahwa pemberdayaan dianggap sebagai proses yang membuat orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam acara dan lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka (Rusmiyati, 2011). Selanjutnya menurut Adisasmita, pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pedesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti: 1.) Aspek masukan atau input seperti sumberdaya manusia, dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi. 2.) Aspek proses seperti pelaksanaan monitoring, dan pengawasan. 3.) Aspek keluaran dan output seperti pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisien (Raharjo Adisasmita, 2006)

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi yang membebaskan mereka dari ketergantungan fisik dan mental (Ali, 2007). Pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, seperti yang dikemukakan oleh Fahrudin, bahwa pemberdayaan berlangsung harus melalui tahap-tahap yang meliputi: 1.) Tahap persiapan (engagement) dalam tahapan ini yang harus dilakukan adalah persiapan petugas dan lapangan. 2.) Tahap pengkajian (assessment) yaitu pendefinisian kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki klien. 3.) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing) pada tahap ini diusahakan partisipasi kelompok sasaran untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. 4.) Tahap memformulasikan rencana aksi, pada tahapan ini petugas menulis usulan gagasan kelompok sasaran. 5.) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, pada tahapan ini program yang telah direncanakan dan dilaksanakan harus ada kerjasama antara agen pemberdaya dengan masyarakat. 6.) Tahap evaluasi, yaitu tahap untuk menilai dan proses pengawasan dari petugas masyarakat. 7.) Tahap terminasi (disanggangan), yaitu berakhirnya kegiatan pemberdayaan dan saat dilakukan pemutusan hubungan secara formal (Fahrudin, 2011).

Sumaryadi, mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 1.) Otorisasi selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. 2.) Kegiatan pelatihan merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam pekerjaan pembangunan fisik saat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. 3.) Dalam proses pelaksanaannya, upaya pemberdayaan harus mampu memaksimalkan penggunaan sumber daya terutama dalam hal penggalangan dana dari pemerintah, swasta dan sumber lainnya. 4.) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu menjadi penghubung antara kepentingan makro pemerintah dan kepentingan mikro masyarakat. 5.) Pemberdayaan masyarakat perlu untuk mencapai keseimbangan pendapatan dan pengeluaran dalam setiap kegiatan yang dikelolanya. Bahkan jika orientasinya adalah bisnis, dalam pemberdayaan masyarakat, keuntungan yang diperoleh juga didistribusikan dalam rencana atau bentuk pembangunan lainnya. (Sumaryadi, 2005).

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana, individu, kelompok, maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendirian mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan ini mengartikan

pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari kedepannya. Pemberdayaan yaitu berupa output dan outcome, output yang dimaksud adalah hasil langsung dari pemberdayaan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dari outcome adalah dampak perubahan yang diharapkan setelah dilakukannya pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara transparan dan penuh tanggungjawab antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah membuat masyarakat lebih bisa mengadopsi pelatihan yang diberikan karena adanya semangat kerjasama dari pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah sangatlah penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena mereka lebih tau potensi lokal dari daerah tersebut, sumberdaya yang didukung serta kebutuhan yang diperlukan.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif menggunakan teori pemberdayaan masyarakat (Adisasmita, 2006). Dengan fokus penelitian yaitu, Peningkatan SDM (Pendidikan atau pelatihan & Pendampingan atau monitoring), Ekonomi Produktif (pendanaan & pendapatan), dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. lokasi penelitian mengambil lokasi di Sidoarjo khususnya di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. peneliti mengambil dilokasi tersebut dengan alasan, karena belum ada yang meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Subjek dan Sumber Informasi yaitu, Informan Kunci (Kepala Desa Banjarasri), Informan Utama (petani yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi), dan Informan Pendukung (Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Perencanaan, Kepala Dusun, Karang Taruna, Ibu PKK). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 4 (empat) alur yaitu: pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, 2014). Instrument penelitian melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada informan dengan menggunakan interview guide.

IV. Hasil dan Pembahasan

Memaparkan dan menganalisis temuan dilapangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Untuk melihat pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo penulis menggunakan 3 (tiga) indikator pemberdayaan masyarakat menurut (Adisasmita, 2006) yaitu:

1. Aspek Masukan Atau Input

Aspek masukan atau input adalah aspek dimana konsep yang masih mentah akan dimasukkan ke transformasi yang bertujuan menjadi konsep yang matang digunakan. Dalam pemberdayaan masyarakat bahan mentah yang dimaksud adalah hanya konsep dari pemberdayaan masyarakat tersebut belum pelaksanaannya sedangkan yang dimaksud

bahan yang matang adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut contohnya pemberdayaan masyarakat minapadi.

Sumber daya manusia merupakan proses pembentukan sistem manajemen untuk memastikan potensi yang dimiliki manusia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan/organisasi (L. Mathis, Robert & H. Jackson, 2011). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia ini adalah masyarakat Desa Banjarasri lebih spesifiknya adalah petani yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi, Kepala Desa Banjarasri, sekertaris desa, Kepala dusun, ibu PKK, karang taruna.

Tabel 1 Data Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terlibat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sistem Pertanian Minapadi Di Desa Banjarasri

Nama	Jumlah orang
Petani yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi	327 Orang
Kepala Desa Banjarasri	1 Orang
Sekertaris Desa	1 Orang
Kepala Dusun	1 Orang
Ibu PKK	43 Orang
Karang Taruna	28 Orang

Sumber : Diolah penulis, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan data sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Petani yang menjalankan pemberdayaan dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri belum semuanya menjalankannya hanya 327 orang saja dari 420 orang di karenakan takut akan kegagalan. Dana dalam arti luas diartikan sebagai suatu modal dalam menjalankan usaha. Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu untuk permodalannya (Arinta, 1996). Dalam pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo segala pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakannya dibebankan kepada petani dengan dananya pribadi

Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai sebagai alat utama / alat langsung untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan (Moenir, 2006). Ada beberapa jenis sarana / peralatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi antara lain: lahan sawah, saluran irigasi, pembuatan caren, traktor, cangkul, serokan ikan, pupuk organik, pakan ikan, jaring untuk melindungi dari hama, jaring dibuat saat panen ikan, alat penggilingan padi.

Tabel 1.2 Data Sarana / Peralatan Yang Digunakan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sistem Pertanian Minapadi

Sarana / Peralatan	Keterangan
Lahan sawah	500m ² – 1 Hektar
Saluran irigasi	1 m x 2 m
Caren	Kedalaman 15 - 20 cm
Traktor	2 buah
Cangkul	4 buah
Serokan ikan	6 buah
Pupuk organik	1 Hektar sawah dibutuhkan setidaknya 300Kg
Pakan ikan	1 Hektar sawah setidaknya dibutuhkan 500Kg
Jaring untuk melindungi dari hama	1,8x1,8 m
Jaring untuk memanen ikan	50 cm x 70 cm
Penggilingan padi	2 buah

Sumber : Diolah penulis, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sarana / peralatan yang ada sudah tersedia dengan lengkap maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam sistem sistem pertanian minapadi harus berjalan dengan baik dan lancar. Data terdiri dari fakta - fakta dan angka – angka yang akan diolah menjadi informasi yang akan dituju. Data yang diperoleh oleh peneliti saat terjun langsung ke lapangan 75% petani yang menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi sudah mendapatkan hasilnya yang berdampak positif pada perekonomiannya sisanya belum mendapatkan hasil dikarenakan menerapkannya belum seluruhnya masih setengah-setengah (Williams, B. K., & Sawyer, 2007)

Rencana dalam arti luas merupakan suatu proses mempersiapkan secara matang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Rencana dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan, karena tujuan rencana adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyangish, 2014). Rencana selanjutnya dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri adalah dengan merencanakan membuat desa wisata dalam sistem pertanian minapadi yang terbukti sukses diterapkan di Desa Wisata Minapadi Dusun Cibuk Kidul Desa Margoluwi, Kecamatan Sayegan, kabupaten sleman. Rencananya Desa wisata yang di kembangkan di Desa Banjarasri adalah dengan memberi pengetahuan baru ke pengunjung mengenai proses tentang minapadi, rumah warga disewakan menjadi homestay untuk pengunjung yang ingin menginap, toko-toko untuk menjual hasil dari pengelolaan minapadi, warung / café dengan menyajikan view pemandangan sawah yang indah untuk pengunjung yang ingin bersantai.

Teknologi merupakan suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya dibidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dan tertentu (Webster, 2004). Teknologi inovasi dalam pertanian di Indonesia yang telah dikembangkan dan terbukti sukses dalam

penerapannya yaitu teknologi pertanian minapadi yang terbukti efektif dan maksimal hasilnya, salah satu penerapan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi yang sukses adalah di Desa Wisata Minapadi Dusun Cibuk Kidul Desa Margoluwhi, Kecamatan Sayegan, kabupaten sleman.

Pada aspek masukan input memiliki sub indikator yaitu : sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi. Dari aspek sumber daya manusia bekerjasama dengan baik antar sesama maka pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi akan berjalan dengan baik dan sukses, dari aspek dana dibebankan uang pribadi dikarenakan dana dari dinas tidak jadi keluar, dari hal tersebut petani tidak menjadi kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi, dari aspek peralatan/sarana sangat lengkap jika salah satu peralatan tidak ada maka penerapannya kurang maksimal, Dari aspek data Sekitar 25% petani dari keseluruhan petani di Desa Banjarasri sebanyak 420 orang mereka belum menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi, dari aspek rencana yaitu merencanakan desa wisata minapadi merupakan hal yang bagus di karenakan bisa menambah penghasilan warga Desa Banjarasri, dari aspek teknologi di dalam pertanian yaitu dengan menerapkan sistem pertanian minapadi yang merupakan sebuah inovasi teknologi di dalam pertanian.

2. Aspek Proses

Aspek proses adalah suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu kegiatan sehingga hasil yang akan dicapai tersebut mampu menjalankan prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan perlu adanya suatu proses yang tepat dan matang agar setiap kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan / program ditetepkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kegiatan yang menjadi kenyataan guna mencapai tujuan yang ditetapkan semula (Abdullah, 2014). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri terus berjalan dengan baik dan lancar, masyarakat mulai mendapatkan keuntungan dari pemberdayaan masyarakat minapadi tersebut, dari hasil pemberdayaan masyarakat dengan sistem pertanian minapadi Budidaya ikan dalam dilakukan dengan cara mengelilingi bagian pinggir tanaman padi dengan kedalaman 70-80 cm dengan kisaran pemilihan bibit ikan sekitar 2 (dua) minggu. Ikan yang digunakan biasanya ikan bandeng, ikan nila, ikan mujair, ikan gurami, ikan mas, udang, dan lain-lain. Tetapi yang sering dibudidayakan adalah ikan bandeng dan udang karena ikan bandeng dan udang sebagai symbol Kabupaten Sidoarjo, apalagi kalau ikan bandeng dan udang sering dibuat oleh-oleh di Kabupaten Sidoarjo. Setiap panen ikan yang dihasilkan berkisaran 250Kg – 300Kg (dua ratus lima puluh kilogram sampai tiga ratus kilogram) per 3 (tiga) bulan sekali dalam luas lahan sawah 1 (satu) Hektar. Hasil ikan biasanya ada yang dijual ikan segar basah ada juga dikelola terlebih dahulu menjadi ikan asap ataupun keripik ikan. Ikan segar basah biasanya dipasarkan pada pagi dini hari di pengepul ikan disekitaran desa adapun juga dijual ke pasar, kebanyakan mereka mengambil untuk dijual harga eceran.biasanya ditaruh dalam cool box sendiri untuk mengatasi ikan yang belum terjual sehingga ikan akan tetap awet apabila ditempatkan didalam cool box. Berikut hasil panen ikan bandeng yang terdapat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Hasil Panen Ikan Bandeng dan Udang

Sumber : Diolah penulis, 2020

Hasilnya juga bisa dikelola terlebih dahulu oleh masyarakat antara lain membuat keripik ikan, ikan asap, dll untuk dijual di pusat oleh-oleh di Sidoarjo bahkan bisa juga dijual hingga luar Sidoarjo maupun mancanegara dengan itu masyarakat mendapatkan keuntungan lebih besar lagi daripada dijual ke pengepul-pengepul disekitaran tanpa dikelola terlebih dahulu. Berikut hasil dari pengelolaan ikan bandeng asap yang terdapat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2 Hasil Ikan Bandeng Asap

Sumber : Diolah penulis, 2020

Padi dalam minapadi dengan pola jajar legowo 2:1 (dua banding satu) bibit padi yang direkomendasikan untuk ditanam berumur 17-20 (tujuh belas sampai dua puluh) hari setelah penyemaian. Padi yang cocok dalam sistem pertanian minapadi adalah jenis padi yang memiliki akar dalam sehingga tidak mudah roboh saat ikan bergerak, batang kuat, tahan terhadap genangan terutama pada awal pertumbuhan, serta berdaun tegak agar mudah mendapatkan sinar matahari, salah satu jenis padi yang cocok digunakan dalam sistem pertanian minapadi adalah veritas padi ciherang dengan tinggi tanaman padi 107-115 (seratus tujuh sampai serratus lim belas) cm dengan umur tanaman padi 116-125 (serratus enam belas sampai seratus dua puluh lima) hari dengan bentuk gabah Panjang ramping dengan warna gabah kuning bersih dengan anakan produktif 14-17 (empat belas sampai tujuh belas) batang, veritas padi ciherang ini banyak disenangi dikarenakan memiliki rasa nasi yang enak dan punel. Padi dalam sistem pertanian minapadi panen 4x (empat kali) dalam setahun / 3 (tiga) bulan sekali.



Gambar 1.3 Veritas Padi Chiherang

Sumber : Diolah penulis, 2020

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan yang akan dituju dengan membuat pengukuran memalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan (Ai Rohayati, 2014). Monitoring juga dapat dipahami sebagai tenaga pendamping/fasilitator, pada dasarnya pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan serta mengembangkan perencanaan kegiatan. Yang memonitoring dalam pemberdayaan masyarakat melaui sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri adalah Kepala Desa bersama prangkat desa yang lainnya 2 (dua) kali dalam seminggu mengecek bahkan bisa lebih jika ada kendala-kendala dilapangan yang sedang terjadi. Kendala-kendala yang terjadi biasanya mengenai saluran irigasi yang sering tersumbat sehingga tidak bisa mengaliri air disawah.

Pengawasan didefinisikan sebagai sebagai cara suatu organisasi untuk mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien yang akan dituju, serta lebih mendukungnya visi dan misi suatu organisasi (fahmi, 2014). Pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi adalah prangkat desa, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dan juga dibantu karang taruna yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut dan hasilnya nanti dilaporkan ke perangkat desa dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo agar dievaluasi sehingga menjadi lebih baik lagi.

Pada aspek proses terdapat sub indikator yaitu : pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dan lancar dari proses pelaksanaan terus berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat (petani) terbukti dengan masyarakat mulai mendapatkan keuntungan dari pemberdayaan masyarakat minapadi tersebut dan meningkat taraf perekonomiannya., dari proses monitoring adalah Kepala Desa bersama prangkat desa karena itu sudah tanggung jawab mereka memonitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi ini agar berjalan dengan baik, dan dari aspek pengawasan karang taruna dimintain tolong agar mengawasi dilapangan berjalannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi tersebut. Tetapi tetap dari pihak karang taruna memberi laporan ke pemerintah Desa Banjarasri.

3. Aspek Keluaran Atau Output

Aspek keluaran atau output adalah suatu proses yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang berasal dari suatu kegiatan. Ada juga yang mengatakan bahwa aspek keluaran atau output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek.

Pencapaian sasaran adalah hasil yang telah dicapai oleh individu maupun kelompok dalam melakukan suatu kegiatan. Pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi ini sudah mencapai sasaran dengan tepat ke masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dengan bertani yang dulu petani hanya begitu-gitu saja hanya menanam padi tanpa inovasi dalam bertani bahkan kalau musim hujan sering mengalami gagal panen dikarenakan sawah mereka digenangi oleh air sehingga padi menjadi rusak. Dulu sebelum diterapkannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi masyarakat Desa Banjarasri berpenghasilan dibawah rata-rata, kebutuhan keluarganya sering kekurangan dikarenakan mereka hanya menggantungkan dari bertani saja, tetapi sekarang masyarakat Desa Banjarasri taraf perekonomiannya sudah meningkatkan dikarenakan diterapkannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi mereka bisa bertani padi dan ikan dalam satu lahan sawah yang menjadi lebih efektif dan efisien dari segi waktu maupun hasilnya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu individu maupun organisasi (Mardiasmo, 2016). Pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi berhasil diterapkan di Desa Banjarasri menjadi lebih efektif dan efisien dalam segi waktu ataupun hasilnya juga, dengan meningkatnya taraf perekonomian masyarakatnya yang sebelumnya kekurangan memenuhi kebutuhan keluarganya tapi sekarang sudah bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Masyarakat sangat bersyukur dan senang dengan diterapkannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi dikarenakan sangat membantu sekali dan berguna juga bagi penerus lainnya.

Efisiensi adalah adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi adalah ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya (Hasibuan, 2005). Sebelum dikembangkannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi masyarakat rata-rata hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) namun setelah dikembangkan menjadi lebih efisien dalam segi waktu, biaya, dan hasil, yaitu memiliki omset Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) per bulan / 1 Hektar (satu hektar).

Pada aspek keluaran atau output terdapat sub indikator yaitu : pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi sudah berjalan dengan baik, pada pencairan sasaran sudah mencapai sasaran dengan tepat ke masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dengan bertani yang dulu petani hanya begitu-gitu saja hanya menanam padi tanpa inovasi dalam bertani, pada efektivitas menjadi lebih efektif dalam segi waktu dikarenakan waktu dalam sistem pertanian minapadi tersebut 3 bulan sekali dengan hasil panen 2x (dua kali) lipat yaitu menanam padi dan ikan dalam satu lahan sawah yang sama, yang sebelumnya hanya menggantungkan menanam padi saja yang hasilnya kurang maksimal, dan pada aspek efisiensi kerja keras dan kerja sama dari semua lini yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi sehingga berhasil dalam pelaksanaannya, dari sebelum dikembangkan petani rata-rata hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) namun setelah dikembangkan petani memiliki omset Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) per bulan/ 1 Hektar (satu hektar).

V. Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tangkulangin, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator aspek masukan input memiliki sub indikator yaitu: sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi. Dari aspek sumber daya manusia bekerjasama dengan baik antar sesama maka pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi akan berjalan dengan baik dan sukses, dari aspek dana dibebankan uang pribadi dikarenakan dana dari dinas tidak jadi keluar, dari hal tersebut petani tidak menjadi kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi, dari aspek peralatan/sarana sangat lengkap jika salah satu peralatan tidak ada maka penerapannya kurang maksimal, Dari aspek data Sekitar 25% petani dari kesuluruhan petani di Desa Banjarasri sebanyak 420 orang mereka belum menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi, dari aspek rencana yaitu merencanakan desa wisata minapadi merupakan hal yang bagus di karenakan bisa menambah penghasilan warga Desa Banjarasri, dari aspek teknologi di dalam pertanian yaitu dengan menerapkan sistem pertanian minapadi yang merupakan sebuah inovasi teknologi di dalam pertanian
2. Indikator aspek proses terdapat sub indikator yaitu : pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan sudah berjalan dengan baik dan lancar dari proses pelaksanaan terus berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat (petani) terbukti dengan masyarakat mulai mendapatkan keuntungan dari pemberdayaan masyarakat minapadi tersebut dan meningkat taraf perekonomiannya., dari proses monitoring adalah Kepala Desa bersama prangkat desa karena itu sudah tanggung jawab mereka memonitoring pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi ini agar berjalan dengan baik, dan dari aspek pengawasan karang taruna diminta tolong agar mengawasi dilapangan berjalannya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi tersebut. Tetapi tetap dari pihak karang taruna memberi laporan ke pemerintah Desa Banjarasri.
3. Indikator aspek keluaran atau output terdapat sub indikator yaitu : pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi sudah berjalan dengan baik, pada pencapaian sasaran sudah mencapai sasaran dengan tepat ke masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dengan bertani yang dulu petani hanya begitu-gitu saja hanya menanam padi tanpa inovasi dalam bertani, pada efektivitas menjadi lebih efektif dalam segi waktu dikarenakan waktu dalam sistem pertanian minapadi tersebut 3 bulan sekali dengan hasil panen 2x (dua kali) lipat yaitu memanen padi dan ikan dalam satu lahan sawah yang sama, yang sebelumnya hanya menggantungkan memanen padi saja yang hasilnya kurang maksimal, dan pada aspek efisiensi kerja keras dan kerja sama dari semua lini yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian minapadi sehingga berhasil dalam pelaksanaannya, dari sebelum dikembangkan petani rata-rata hanya berpenghasilan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) namun setelah dikembangkan petani memiliki omset Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) per bulan/ 1 Hektar (satu hektar).

Saran

Sehubungan dengan terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi di Desa Banjarasri, Kecamatan Tangkulangin, Kabupaten Sidoarjo. Berikut rekomendasi yang diberikan penulis kepada pemerintah desa guna mengantisipasi

dampak negatif dan terus mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi:

1. Bagi pemerintahan Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, kabupaten Sidoarjo agar dapat mengembangkan desa wisata minapadi agar masyarakatnya lebih makmur lagi.
2. Bagi pemerintah desa agar membujuk/mengajak semua petani yang ada di Desa Banjarasri menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pertanian minapadi dikarenakan tidak semua petani menerapkan pemberdayaan masyarakat minapadi ini padahal pemberdayaan masyarakat dalam sitem pertanian minapadi ini sangat bagus dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Ai Rohayati. (2014). Pengaruh kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior: Studi Pada Yayasan Masyarakat Madani Indonesia. *Smart-Study & Management Research*, 11(1), 20–38.
- Anny mulyani, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, & F. A. (2016). Analisis Koversi Lahan Sawah : Penggunaan Data Spesial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi Yang Mengkhawatirkan. *Tanah Dan Iklim*, 40(2), 121–133.
- Arinta, K. (1996). *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Citra Aditya Bakti.
- fahmi, irham. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta.
- Hasibuan, M. S. . (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- L. Mathis, Robert & H. Jackson, J. (2011). *Human Resource Management* (10th ed.). Salemba Empat.
- Listyangish. (2014). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. BPFG Univesitas Gajah Mada.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. ANDI.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (U.-P. Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- PP No. 25. (2000). *Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom*.
- UU NO. 22. (1999). *PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Webster, M. (2004). *Merriam Webster's Collegiate Dictionary*. Merriam Webster Incorporated.
- Williams, B. K., & Sawyer, S. C. (2007). *Using Information Technology: Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi* (Nur Wijayaning Rahayu & Th. Arie Prabawati (ed.); 7th ed.). ANDI.

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Basic Industry dan Chemicals yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)

Maulia Mustafani¹, Chasan Azari^{2*}, Setya Prihatiningtyas³
^{1,2,3} Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: chasan.azhari@hangtuah.ac.id

Abstract

The company value is the expectation of stakeholders. If it has good value, the stakeholders will have good welfare. There are two factors that affect the company value, namely external and internal factors. This study indicates the company value as dependent variable which is measured using price book value. This measurement compares stock price with the book value. The independent variables are financial performance and intellectual capital. Financial performance is measured using the current ratio, dept to equity ratio, and return on equity ratio. Whereas, intellectual capital uses the measurement of value-added intellectual coefficient (VAIC). The purpose of the study is to determine and examine the effect of financial performance and intellectual capital on the company value in basic and chemical industries listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2017 to 2019. There are twenty-seven basic and chemical industries that have been selected using a census method. The data using descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis. The result of the study indicates financial performance and intellectual capital simultaneously affect the company value. However, financial performance which is measured using CR and ROE, shows significant negative effect on the company value. Furthermore, financial performance which is measured using ROE, has significant positive effect on the company value. The result also indicates that intellectual capital has negative effect on the company value.

Keywords: *current ratio, dept to equity ratio, return on equity, intellectual capital, company value*

I. PENDAHULUAN

Nilai perusahaan dapat tercipta apabila perusahaan dapat memaksimalkan kemakmuran stakeholder (Kariyoto, 2018). Stakeholder yang dimaksud adalah pemangku kepentingan termasuk buruh dan manajemen, kreditur, supplier, pemilik saham, pemerintah, bahkan masyarakat sekitar perusahaan. Melalui nilai perusahaan investor dapat menilai apakah suatu perusahaan memiliki prospek yang bagus kedepannya. Dari nilai perusahaan dapat dilihat apakah perusahaan tersebut berhasil mencapai tujuan perusahaan atau tidak. Perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Menurut Kariyoto (2018) tujuan perusahaan dibagi menjadi 2 yaitu memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) dan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*maximize wealth of stockholders*).

Nilai perusahaan juga tercermin pada masing-masing perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia melalui harga sahamnya. Dari 9 sektor yang ada di BEI sektor *basic industry and chemicals* memimpin pertumbuhan sebesar 66,51% selama tahun 2017-2019. Harga saham sektor *basic industry and chemicals* sejak tahun 2017-2019 secara umum mengalami kenaikan harga saham dimana kenaikan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kinerja keuangan dan modal intelektual. kinerja keuangan mencakup informasi

mengenai keuangan yang sering dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja perusahaan. Selain sebagai informasi, kinerja keuangan juga sebagai alat pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan, serta sebagai indikator keberhasilan suatu perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain kinerja keuangan mencerminkan tingkat kesehatan suatu perusahaan. Perusahaan harus mampu memaksimalkan seluruh aset yang dimilikinya. Tidak hanya aset berwujud saja, perusahaan juga bisa memanfaatkan aset tidak berwujud sebagai sebuah solusi dalam mengatasi suatu masalah. Aset tidak berwujud atau *Intangible Asset* merupakan aset yang dapat diperbarui dan memiliki umur ekonomi lebih panjang. Menurut Barney (1991) dalam Prasetyo (2015) menerangkan bahwa bahwa aset tidak berwujud dapat diperlakukan sebagai aset yang strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan karena sifatnya yang berharga, sulit ditiru, langka dan sukar untuk disubtitusi dengan hal lain. perusahaan juga harus menyampaikan informasi-informasi terkait dengan nilai lebih yang dimiliki perusahaan seperti inovasi, penemuan, pengetahuan, perkembangan karyawan, dan hubungan yang baik dengan para konsumen yang biasa disebut dengan *Knowledge Capital* (Modal Pengetahuan) atau *Intellectual Capital* (Modal Intelektual).

II. LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja keuangan merupakan suatu tolak ukur dari kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Rasio Keuangan

Rasio keuangan menurut Kasmir (2012) adalah aktivitas membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dan satu komponen dalam laporan keuangan, atau antara komponen yang ada di antara laporan keuangan. Menurut Fahmi (2018), ada 3 rasio yang dominan dan paling sering dijadikan rujukan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan oleh para investor yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Menurut Fahmi (2018) rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pentingnya rasio ini karena apabila perusahaan gagal dalam membayar kewajiban jangka pendeknya maka akan menyebabkan kebangkrutan.

Current Ratio

Peneliti memilih *current ratio* sebagai indikator yang mewakili rasio likuiditas. *Current ratio* ini membantu investor dalam menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan aset yang dimilikinya (Hanafi dan Halim, 2016). *Current ratio* dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan (Kasmir, 2014). Tingkat likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak baik eksternal ataupun internal. Berikut adalah rumus dari *current ratio* :

Current Assets ×100%

Current Liabilities

2. Rasio Solvabilitas

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Dari rasio solvabilitas dapat diketahui apakah perusahaan tersebut memiliki komposisi hutang yang besar atau tidak, sebab perusahaan yang baik memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada hutangnya (Harahap, 2013).

Dept to Equity Ratio

Penulis menggunakan dept to equity ratio dalam penelitian ini. Dalam DER terdapat ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada dalam jumlah yang cukup proporsional. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mendapat pendanaan dari pemberi utang, jadi perusahaan tidak mendapat pendapatan dari perusahaannya sendiri. Robert Ang (1997) juga menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai DER menunjukkan jika total hutang lebih besar dibandingkan dengan laba perusahaan, sehingga akan berdampak pada beban perusahaan pihak eksternal ataupun internal perusahaan. Berikut adalah rumus dari DER:

$$\frac{\text{Total liabilities}}{\text{Total equity}}$$

3. Rasio Profitabilitas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Rasio ini berperan penting dalam mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Fahmi, 2018).

Return on Equity

Menurut Sutrisno (2001) ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi pemegang saham perusahaan. Menurut Harmono (2009) ROE dapat memberikan gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur menggunakan profitabilitas perusahaan yang dalam kondisi baik, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor. Semakin banyak investasi yang dilakukan oleh investor maka akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Berikut adalah rumus dari ROE :

$$\frac{\text{EAT}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Signaling Theory

Teori ini mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang dimaksud dapat berupa informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Menurut Bringham dan houston (2014), teori sinyal merupakan perilaku manajemen perusahaan, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada investor tentang pandangan manajemen terhadap prospek masa depan perusahaan. Teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan pelaporan dapat meningkatkan nilai perusahaannya melalui pelaporan tersebut. Teori sinyal memberikan bukti bahwa informasi yang dimiliki oleh perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan seperti investor. Laporan keuangan yang dapat diandalkan adalah laporan yang memberikan informasi positif sehingga membuat investor semakin tertarik dengan saham perusahaan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Modal Intelektual

Stewart dalam Ulum (2009) menjelaskan bahwa modal intelektual adalah materi intelektual, pengetahuan, informasi, hak pemilik intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. modal intelektual adalah aset tidak berwujud yang tidak dijelaskan secara langsung dalam laporan keuangan dapat berupa informasi dan sumber pengetahuan yang membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Stewart (2003) mengklasifikasikan modal intelektual menjadi 3 yaitu :

1. Human Capital

human capital mewakili cadangan pengetahuan pribadi dari sebuah organisasi yang diwakili oleh karyawan. Menurut Pulic (1998) *human capital* (VAHU) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

$$VA = OUT - IN$$

VA	: <i>Value added</i>
OUT	: Total pendapatan
IN	: Beban usaha kecuali gaji dan tunjangan karyawan

$$VAHU = VA/HU$$

HU	: Gaji dan tunjangan karyawan
----	-------------------------------

2. Structure capital

Mencakup semua pengetahuan non-manusia dalam organisasi. Hal Ini termasuk database, bagan organisasi, strategi, rutinitas, dan hal lain yang membuat nilai perusahaan lebih berharga dari pada nilai material. Menurut Pulic (1998) *structure capital* (STVA) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

$$STVA = SC/VA$$

$$SC : \text{Structure capital } (SC = VA -$$

$$HU)/VA : \text{Value added}$$

3. Customer Capital

Pengetahuan yang melekat dalam saluran pemasaran dan hubungan pelanggan yang dikembangkan oleh organisasi selama proses bisnis. Menurut Pulic (1998) *customers capital* (VACA) dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

$$VACA = VA/CE$$

$$CE : \text{Total asset} - \text{intangibel assets / ekuitas}$$

Sehingga diperoleh nilai VAIC yang dihitung dari ketiga komponen tersebut dengan persamaan :

$$VAIC = VAHU + SCVA + VACA$$

Resources Based Theory

Resource Based Theory di pelopori oleh Penrose (1959) dalam Ulum (2009) yang mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan adalah bersifat heterogen, jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap tiap perusahaan. Hal ini akan menimbulkan persaingan kompetitif antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya karena perbedaan kemampuan serta sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Menurut Barney (1991) dalam Manurung (2019) kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya merupakan pandangan dari *Resource Based Theory*. Apabila perusahaan tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif ini akan tercapai apabila perusahaan dapat menerapkan strategi penciptaan nilai yang dimilikinya yang sulit atau bahkan tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain (Barney, 1991 dalam Manurung, 2019).

Nilai Perusahaan

Sartono (2010) menyebutkan bahwa nilai perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan sebagai aktivitas operasi. Setiap kelebihan nilai penjualan atas nilai likuidasi adalah nilai organisasi manajemen yang menjalankan bisnis. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam menghitung nilai perusahaan menurut Fahmi (2018) :

PBV : MARKET PRICE PER SHARE/BOOK PRICE PER SHARE

Hipotesis

H : Ada pengaruh kinerja keuangan dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017- 2019. Dalam penelitian ini metode sampel yang digunakan adalah metode sensus dimana seluruh bagian populasi dijadikan sebagai sampel atau biasa disebut sampling jenuh (Sugiyono, 2002). Diperoleh Sebanyak 27 perusahaan *basic industry and chemicals* yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah hasil data yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan.

Uji Asumsi Klasik

Jenis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi terdistribusi normal atau tidak normal. Nilai signifikansi uji One Sample Kolmogorov Smirnov apabila diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal.

Uji Autokorelasi Digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam Penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson dan run test.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang digunakan untuk

menjelaskan hubungan antara variabel dependen / respon (Y) dengan dua atau lebih variabel / prediktor independen (X1, X2, ... Xn). Adapun rumus regresi linear berganda adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan	:	n :
N		ilai Perusahaan
X1	:	Kinerja
Keuangan	:	Modal
X2	:	Intelektuale
	:	Residual (error)
Uji Hipotesis		
Uji t		

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sendiri. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Jika probabilitas $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengukur seberapa dalam kemampuan model regresi ini dapat menjelaskan variasi dari variabel bebas. Nilai dari R^2 itu sendiri adalah 0 dan 1.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,985	,230		4,290	,000
CR	-,110	,038	-,347	-2,877	,006
DER	-,191	,071	-,312	-2,691	,009
ROE	7,534	,919	,742	8,200	,000
IC	-,008	,003	-,267	-2,801	,007

a. Dependent Variable: PBV

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 22

1. Variabel *current ratio* memiliki t hitung $2,877 > t$ tabel $2,00172$ dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Nilai negatif menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel *current ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Variabel *dept to equity ratio* memiliki t hitung $2,691 > 2,00172$ dan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Nilai negatif menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel DER berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

3. Variabel *return on equity* memiliki t hitung $8,200 > 2,00172$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel ROE berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Variabel *intellectual capital* memiliki t hitung $2,801 > 2,012$ dan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Nilai negatif menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga dapat dinyatakan bahwa IC berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. *Current ratio* dan *dept to equity ratio* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan basic industry and chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
2. *Return on equity* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan basic industry and chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
3. Modal Intelektual berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019
4. Secara simultan kinerja keuangan dan modal intelektual berpengaruh terhadap nilai perusahaan *basic industry and chemicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan terdapat hasil uji yang bernilai negatif disarankan menggunakan Tobin's Q untuk perhitungan pada nilai perusahaan sehingga dimungkinkan akan mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian ini.
2. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan khususnya faktor modal intelektual sebagai aset tidak berwujud yang dapat menambah nilai perusahaan.
3. Bagi investor, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan acuan untuk dasar pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, Robert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Media StaffIndonesia
- Barney, J. B. 1991. *Firm Resources And Sustained Competitive Advantage*. Journal of Management. 17: 99 – 12.
- Brigham, E.F., Dan J.F. Houston. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan; Teori dan Soal Jawab*. Bandung:Alfabeta
- Hanafi, M. M dan Halim, A. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ke-5 Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

- Harahap, S.S. 2013. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja. GrafindoPersada.
- Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kariyoto. 2018. *Manajemen Keuangan : Konsep dan Implementasi*. Malang : UB Press.Kasmir.
2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Manurung, E.A. 2019. *Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Prasetyo, F. 2015. *Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Pulic, A. 1998. *Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy*. Paper dipresentasikan di 2nd McMaster Word Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential.
- Sartono, A. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Sutrisno. 2001. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Ulum, I. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**ANALISIS REAKSI PASAR PRA DAN PASCA PUBLIKASI
*UNQUALIFIED OPINION***
**(Studi Pada Perusahaan yang Tergabung dalam *Jakarta Islamic Index (JII)*
Tahun 2017-2019)**

Lailatul Qomaria^{1*}, Chasan Azari², Yanda Bara Kusuma³

¹Universitas Hang Tuah, Indonesia

²Universitas Hang Tuah, Indonesia

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Indonesia

*Corresponding autor: lailatulqomariaa@gmail.com

Abstract

The audit in financial statement is required to show the quality of financial statement in a company before being published on the market. The best audit opinion required by the market is the Unqualified Opinion, because it describes financial statement which is presented completely and independently from a material. The completeness of financial statement is very essential to provide a positive signal to the Market, so that the market place is able to give positive feedback. However, the market reaction is not always positive towards the Unqualified Opinion Publication. It is proven by the previous studies related to insignificant effect of Market Reaction toward Unqualified Opinion Publication. As the result, inconsistency is occurred. Market Reaction can be measured by using Actual Return, Abnormal Return, and Trading Volume Activity toward Unqualified Opinion Publication. Furthermore, the study aims to find out the differences of Market Reaction before and after Unqualified Opinion Publication on Jakarta Islamic Index (JII) from 2017 to 2019. This is a Comparative Quantitative and Descriptive study with paired sample t-test for twenty days (ten days prior to publication and other ten days post-publication). The study takes the sample from ten companies that are suitable in term of the criteria. The result indicates insignificant difference of Market Reaction before and after Unqualified Opinion Publication in term of the significance value of Actual Return ($0.835 > 0.05$), Abnormal Return ($0.122 > 0.05$), and Trading Volume Activity ($0.802 > 0.05$). Thus, the overall significance value H_0 is accepted, whereas, H_a is rejected. Moreover, mean of each variable shows a difference, however, it is categorized as low/ insignificant difference. After the hypothesis testing is applied, it reveals that there is no difference before and after Market Reaction of Unqualified Opinion Publication.

Keywords: unqualified opinion, actual return, abnormal return.

I. PENDAHULUAN

Sinyal sangat dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi dengan publik yang baik mengenai informasi perusahaan agar publik dapat menemukan perbedaan kualitas perusahaan dengan kategori perusahaan berkualitas baik (*high quality firms*) dan perusahaan yang berkualitas buruk (*low quality firms*) (Keogh, 2020). Informasi keuangan dapat diakses dari kualitas Laporan Keuangan, karena Laporan Keuangan memuat aktivitas keuangan dan kekayaan perusahaan. Kualitas tersebut tertera setelah dilakukannya koreksi atau audit yang dilakukan oleh auditor. Pengauditan terhadap laporan keuangan sungguh diperlukan agar tidak ada peluang laporan keuangan memuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Mayoritas dari laporan keuangan yang belum diaudit akan kurang dipercaya oleh beberapa pihak perihal kewajarannya (Agoes, 2017:13).

Jenis dari opini auditor yang diklasifikasikan oleh Mulyadi (2002:416) terdiri dari lima jenis, yaitu Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*), Opini Audit Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Opini Audit Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Opini yang terbaik adalah Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat/opini ini dapat diberikan oleh auditor setelah auditor meyakini terhadap bukti-bukti audit yang telah terkumpul bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan fatal atau kekeliruan material.

Besarnya pengaruh opini audit pada investor dalam pengambilan keputusan juga akan berpengaruh pada reaksi pasar. Reaksi pasar merupakan respon atau timbal balik yang ditunjukkan oleh pasar terhadap suatu informasi yang dipublikasikan oleh para perusahaan. Reaksi pasar terdiri dari 3 elemen penting pada pasar yaitu Perusahaan, Investor, dan Lembaga Penunjang (BEI). Perhitungan reaksi pasar dapat dihitung dari nilai *Actual Return*, *Abnormal Return* dan Volume perdagangan Saham (*Trading Volume Activity*). Menurut Hartono (2008:195) *Actual Return* atau pengembalian yang didapatkan menggunakan data masa lalu yang dapat berguna dalam pengukuran kinerja dari perusahaan. Hartono (2015:171) menjelaskan bahwa *abnormal return* adalah besar nilai perbedaan antara pengembalian yang diterima investor (*actual return*) terhadap pengembalian yang diharapkan investor (*expected return*) hingga menghasilkan nilai *actual return* yang sesuai ekspektasi dari investor atau tidak, sedangkan definisi dari volume perdagangan saham (*trading volume activity*) adalah instrumen pengukuran dari pasar modal (BEI) terhadap adanya suatu peristiwa di pasar modal. Jadi, reaksi dari pasar bisa dihitung menggunakan variabel *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan Volume Perdagangan Saham. Ketiga variabel tersebut memiliki indikator perhitungan yang sama, yaitu harga saham. Rumus perhitungan dalam mencari hasil *Actual Return* dan *Abnormal Return* adalah menggunakan nilai dari harga saham harian. Volume perdagangan saham pun erat kaitannya dengan harga saham, karena nilai volume perdagangan saham didasari oleh observasi pergerakan harga saham dimasa lalu (Tandelilin, 2017:399).

Fenomena besarnya pengaruh dari Publikasi *Unqualified Opinion* dapat tercermin pada analisis *trend* saham yang dilakukan pada 3 perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* periode 2019 selama 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah publikasi *Unqualified Opinion*, yaitu Bumi Serpong Damai Tbk., Erajaya Swasembada Tbk., dan Jasa Marga (Persero) Tbk. Kesimpulan

dari ketiga perusahaan tersebut adalah adanya eskalasi harga saham dalam waktu sebelum dan setelah publikasi dilakukan ke ranah publik. Namun, pergerakan reaksi pasar yang positif tidak selalu terjadi setelah publikasi dilakukan. Riset yang dilakukan oleh Arinda (2013), Atimi (2014), dan Hagul (2018), ketiganya memperoleh hasil penelitian yaitu tidak ditemukannya adanya pergerakan harga saham yang terpengaruhi secara signifikan oleh *Unqualified Opinion*.

Pernyataan yang dapat disimpulkan dari fenomena 3 analisis *trend* dan 3 hasil penelitian terdahulu yaitu terjadinya inkonsistensi hasil. Adanya perbedaan tersebut menjadi peluang bagi peneliti dapat melakukan penelitian kembali guna mencapai kesimpulan penelitian yang lebih baik. Besar pengaruh *Unqualified Opinion* dapat dibuktikan dengan cara membandingkan reaksi yang diberikan oleh pasar dimulai dari sebelum hingga setelah publikasi *Unqualified Opinion* oleh perusahaan-perusahaan tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Perbandingan yang dilakukan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah tidak ada perbedaan reaksi pasar dari sebelum dan sesudah publikasi, terjadi peningkatan reaksi pasar dari sebelum hingga setelah publikasi, atau bahkan sebaliknya akan terjadi penurunan reaksi pasar setelah pemberian sinyal positif dari perusahaan berupa laporan *Unqualified Opinion*.

II. LANDASAN TEORI

a. Manajemen Portofolio dan Investasi

Definisi investasi yang dinyatakan Tandelilin (2017:2) pada hakikatnya adalah konsistensi investor dalam menempatkan dana yang dimiliki saat ini yang bertujuan untuk mendapat keuntungan di masa mendatang. Penerapan investasi yang dideskripsikan oleh Tandelilin (2017:1) adalah komitmen seseorang dalam berkorban agar tidak menjadi konsumtif dimasa kini (*sacrifice current consumption*) sehingga dapat memperbesar tingkat konsumtif di di waktu mendatang. Dengan artian yang lain, investasi adalah suatu cara yang dipilih investor guna merencanakan pemenuhan kepentingan di masa depan saat terjadi beberapa masalah seperti inflasi. Penambahan nilai aset dari investasi yang dijalankan akan membantu investor memenuhi kebutuhan jangka panjang.

b. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal (*Signalling theory*) muncul dilatarbelakangi oleh *The Study of Information Economics* yang menangani keadaan asimetri informasi. fungsi primer dari studi tersebut adalah mengurangi dan membantu memberikan bagaimana menyikapi ketika terjadi asimetri informasi. Definisi dari asimetri informasi adalah kesenjangan pengetahuan yang diimani oleh manajemen-manajemen perusahaan dengan pihak investor. Pihak manajemen memiliki penjelasan yang sangat *detail* mengenai perusahaan, sedangkan informasi yang dimiliki investor sangat terbatas. Dalam hal ini, teori sinyal sangat dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi dengan publik yang baik mengenai informasi perusahaan agar lebih efektif (Keogh, 2020).

c. *Unqualified Opinion*

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*). *Unqualified Opinion* dicantumkan oleh auditor pada laporan keuangan jika laporan tersebut lengkap. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan harus sinkron dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting*

Principles). Audit juga harus memenuhi standar yang telah disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011: 150.1- 150.2), standar tersebut terdiri dari Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Setelah auditor menetapkan *Unqualified Opinion*, maka dapat dipastikan auditor tidak memiliki kesempatan yang memungkinkan auditor memodifikasi pada opini audit.

d. Actual Return

Return realiasi (*actual return*) adalah hasil keuntungan yang telah didapatkan oleh investor dengan pengukuran data historis perusahaan. *Actual Return* digunakan untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan. Konsep pengukuran kinerja perusahaan telah dijelaskan oleh Tandelilin (2010:372), yaitu memperhatikan pertumbuhan profitabilitas perusahaan sehingga memberikan *return* yang sesuai pada sisi investor. Berikut adalah formula *actual return* menurut Hartono (2015:63) :

Keterangan :

$R_{i,t}$ = *Actual return* pada periode ke-t
 P_t = Harga saham harian sekuritas i pada periode t
 $P_{i,t-1}$ = Harga saham harian sekuritas i pada periode t-1 (hari sebelumnya)

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

e. Abnormal Return

Hartono (2013:586) mengemukakan bahwa *Abnormal Return* muncul karena adanya informasi baru atau peristiwa baru yang mengubah nilai perusahaan dan investor bereaksi dalam bentuk penurunan atau peningkatan harga saham, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen yang dapat mengukur reaksi pasar dari adanya publikasi suatu informasi adalah *abnormal return*. Menurut Tandelilin (2017:243), return tak normal (*abnormal return*) dihasilkan dari operasi pengurangan return yang didapatkan atau return realisasi (*actual return*) terhadap return yang diharapkan (*expected return*). Selisih dari perhitungan tersebut akan menunjukkan hasil nilai return yang positif atau negatif. Berikut adalah formulasi dari *abnormal return* :

Keterangan :

$A R_{i,t}$ = *Abnormal Return* saham i pada periode ke-t
 $R_{i,t}$ = *Actual Return* saham i pada periode ke-t
 $E(R_{i,t})$ = *Expected Return* saham i pada periode ke-t

$$A R_{i,t} = R_{i,t} - E(R_{i,t})$$

f. Volume Perdagangan Saham

Suganda (2018:17) beranggapan bahwa volume perdagangan saham (*Trading Volume Activity*) merupakan indikator yang digunakan untuk pengamatan serta pengukuran reaksi pasar yang terjadi akibat adanya publikasi informasi. Husnan (2009:283) memberikan penjelasan terkait definisi volume perdagangan saham yang dapat dilihat hasilnya dengan cara membagi diantara total lembaran saham yang diperjualbelikan di waktu yang telah ditentukan dengan total dari saham terdaftar di BEI pada waktu yang telah ditentukan. Rumus perhitungan Volume Perdagangan Saham adalah :

$$TVA_{(it)} = \frac{\Sigma \text{ saham perusahaan yang diperdagangkan pada waktu ke-t}}{\Sigma \text{ saham perusahaan yang tercatat di BEI}}$$

g. Hipotesis dan Model Hipotesis

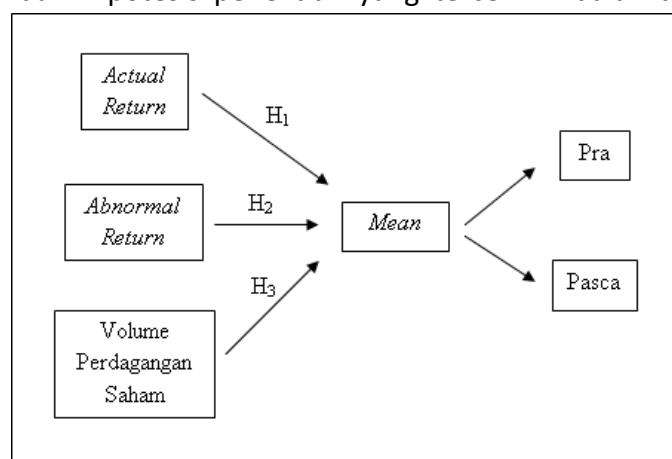
Hipotesis (jawaban sementara) yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat perbandingan mean dari pengembalian realisasi (*average actual return*) pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion* dari perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* tahun 2017- 2019.

H2 : Terdapat perbandingan mean dari pengembalian abnormal (*average abnormal return*) pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion* dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2017-2019.

H3 : Terdapat perbandingan mean dari volume perdagangan saham (*average trading volume activity*) pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion* dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2017-2019.

Berikut adalah gambaran dari hipotesis penelitian yang tercermin dalam bentuk permodelan



hipotesis :

Gambar 1 Model Hipotesis Sumber : Data diolah, 2021

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatifdeskriptif untuk membandingkan hasil dari *Actual Return*, *Abnormal Return* serta Volume Perdagangan Saham pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion* selama periode peristiwa 20 hari, yaitu 10 hari pra dan 10 hari pasca publikasi. Populasi yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan seluruh saham yang terdaftar dalam salah satu indeks yang berbasis syariah yaitu *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan rentang waktu 3 tahun berturut yaitu tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dari populasi penelitian yang digunakan adalah *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode yang menentukan sampel melalui kategori atau standar-standar ditentukan(Sugiyono, 2019:138). Kriteria tersebut adalah, a) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam JII selama tahun 2017-2019 b) perusahaan yang mempublikasikan *Unqualified Opinion* c) perusahaan tidak melakukan Aksi Korporasi (*Corporate Action*).

Berdasarkan kategori sumber data, penelitian menggunakan data sekunder dengan menggunakan situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tersedia pada link www.idx.co.id, finance.yahoo.com, google finance dan beberapa sumber atau situs lain yang diperlukan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan rincian sebagai berikut, a) Pengolahan data, meliputi perhitungan *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan Volume Perdagangan Saham beserta rata-rata tiap variabel tersebut b) Pengujian Normalitas dari tiap variabel pra dan pasca publikasi c) Pengujian Hipotesis menggunakan Uji *Paired Sample t-test* (Uji Beda Berpasangan).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan Data

Berikut adalah hasil perhitungan deskriptif statistik oleh SPSS dalam bentuk tabel, sehingga dapat disimpulkan nila-nilai dari perhitungan rata-rata *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan Volume Perdagangan Saham :

Tabel 1 Deskriptif Statistik Average Actual Return

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ARPra	30	-0.0667999	0.0235412	-0.004263203	0.0181434433
ARPasca	30	-0.0423937	0.0189821	-0.005065496	0.0134343658
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Output SPSS (Descriptive Statistics)

Berdasarkan hasil perhitungan data oleh SPSS pada tabel diatas, *mean* dari *Average Actual Return* pra publikasi adalah -0.004263203 dengan standar deviasi 0.0181434433, sedangkan *mean* dari pasca adalah -0.005065496 dengan standar deviasi 0.0134343658. Perhitungan menunjukkan bahwa standar deviasi pra publikasi *Unqualified Opinion* lebih besar dari standar deviasi pasca publikasi *Unqualified Opinion*.

Tabel 2 Deskriptif Statistik Average Abnormal Return

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AARPra	30	-0.0358950	0.0180063	-0.001350138	0.0120219574
AARPasca	30	-0.0935957	0.0136767	-0.007206684	0.0188510718
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Output SPSS (Descriptive Statistics)

Data hasil estimasi oleh SPSS pada tabel diatas menunjukkan *mean* dari *Average Abnormal Return* pra publikasi adalah -0.001350138 dengan standar deviasi 0.0120219574, sedangkan *mean* pasca publikasi adalah -0.007206684 dengan standar deviasi 0.0188510718. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi pasca publikasi *Unqualified Opinion* lebih besar dari standar deviasi pra publikasi *Unqualified Opinion*.

Tabel 3 Deskriptif Statistik Average Trading Volume Activity

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ATVAPra	30	0.0003065	0.0065341	0.002168290	0.0019262726
ATVAPasca	30	0.0003030	0.0092596	0.002101069	0.0019041039
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Output SPSS (Descriptive Statistics)

Pada hasil estimasi data oleh SPSS pada tabel diatas, diperoleh *mean* dari *Average Trading Volume Activity* pra publikasi adalah 0.002168290 dengan standar deviasi 0.0019262726, sedangkan *mean* dari pasca publikasi adalah 0.002101069 dengan standar deviasi 0.0019041039, menunjukkan bahwa standar deviasi pra *Unqualified Opinion* lebih besar dari standar deviasi pasca publikasi *Unqualified Opinion*.

h. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan pada salah satu alat statistik, yaitu *One-Sample Kolmogorov Smirnov* karena data akan diuji berurutan tiap variabel dan secara terpisah sesuai dari peristiwa publikasi. Hal tersebut dilakukan agar hasil dapat dijabarkan secara terperinci. Berikut adalah uji normalitas dari *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan *Volume Perdagangan Saham* :

Tabel 4 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dari Actual Return

		ARPra	ARPasca
N		30	30
Normal Parametersa	Mean	-0.004263203	-0.005065496
	Std. Deviation	0.018143443	0.013434366
Most Extreme Differences	Absolute	0.203	0.135
	Positive	0.102	0.097
	Negative	-0.203	-0.135
Kolmogorov-Smirnov Z		1.113	0.739
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.168	0.646
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Output SPSS (NPar Test)

Data pada tabel yang telah disajikan, nilai *Kolmogorov Smirnov* untuk *Average Actual Return* pra publikasi adalah 1.113 , yang nilai probabilitasnya adalah 0.168 atau >0.05. Nilai tersebut mendefinisikan bahwa hipotesis nol diterima dan *Average Actual Return* pra publikasi terdistribusi secara normal. Hipotesis nol dari *Average Actual Return* pasca publikasi juga diterima dan terdistribusi secara normal karena nilai *Kolmogorov Smirnov* nya adalah 0.739 dengan nilai probabilitasnya adalah 0.646 atau nilainya >0.05.

Tabel 5 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dari Abnormal Return

		AAPRra	AAPPasca
N		30	30
Normal Parametersa	Mean	-0.001350138	-0.007206684
	Std. Deviation	0.012021957	0.018851072
Most Extreme Differences	Absolute	0.118	0.232
	Positive	0.068	0.137
	Negative	-0.118	-0.232
Kolmogorov-Smirnov Z		0.648	1.271
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.795	0.079
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Output SPSS (NPar Test)

Tabel diatas menunjukkan nilai dari *Kolmogorov Smirnov* untuk *Average Abnormal Return* pra publikasi adalah 0.648 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.795 atau >0.05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima dan *Average Actual Return* pra publikasi terdistribusi secara normal. Nilai *Kolmogorov Smirnov* dari *Average Abnormal Return* pasca publikasi adalah 1.271 dengan nilai probabilitasnya adalah 0.079 atau nilainya >0.05, dapat diartikan bahwa hipotesis nol diterima serta data terdistribusi normal.

Tabel 6 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dari Average Trading Volume Activity

		ATVAPra	ATVAPasca
N		30	30
Normal Parameters	Mean	0.002168289	0.002101069
	Std. Deviation	0.001926273	0.001904104
Most Extreme Differences	Absolute	0.201	0.18
	Positive	0.201	0.18
	Negative	-0.167	-0.173
Kolmogorov-Smirnov Z		1.099	0.987
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.179	0.284
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Output SPSS (NPar Test)

Nilai dari *Kolmogorov Smirnov* untuk *Average Trading Volume Activity* pra publikasi menurut tabel diatas adalah 1.099 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.179 atau >0.05. Nilai tersebut memberi kesimpulan bahwa hipotesis nol diterima dan *Average Trading Volume Activity* pra publikasi terdistribusi secara normal. Nilai *Kolmogorov Smirnov* dari *Average Trading Volume Activity* pasca publikasi adalah 0.987 dengan nilai probabilitasnya adalah 0.284 atau nilainya >0.05, artinya hipotesis nol dapat diterima dan data terdistribusi normal.

i. Uji Hipotesis

Fungsi dari hipotesis adalah melakukan pengujian ada tidaknya perbandingan *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan Volume Perdagangan Saham dari sampel seputar waktu publikasi *Unqualified Opinion* selama 20 hari. Metode pengujian yang dipilih adalah uji beda berpasangan (*Paired Samples T-Test*) sehingga dapat diketahui perbandingan dengan mengukur *Actual Return*, *Abnormal Return*, serta Volume Perdagangan Saham pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion* yang dilakukan oleh sampel-sampel yangterpilih.

Tabel 7 Uji Paired Samples Test Actual return

	Paired Differences						t	df	Sig. (2-tailed)			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference								
				Lower	Upper							
Pair ARPra - 1 ARPasca	0.000 8 02293	0.02094 49107	0.00382 4	-0.0070 18665 2	0.0086 23251 2	0.2 1	2	19	0.835			

Sumber : Output SPSS (Paired Samples Test)

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji *Paired Samples Test* nilai *mean* dari *actual return* adalah

0.000802293 dengan nilai signifikansi yaitu 0.835. Nilai signifikansi yang dihasilkan $> \alpha$ atau $0.835 > 0.05$ yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbandingan yang signifikan antara *actual return* saham pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion*, atau dengan penjabaran yang lebih rinci yaitu, jumlah informasi yang dibutuhkan pasar dalam *Unqualified Opinion* sangat minim sehingga minim juga reaksi yang diberikan oleh pasar.

Tabel 8 Uji Paired Samples Test Abnormal Return

Paired Samples Test											
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference							
				Lower	Upper						
Pair1 AARPra – AARPasca	0.00585 65455	0.0201 488759	0.0036 786646	-0.00166 71684	0.01338 02594	1.592	29	0.122			

Sumber : Output SPSS (Paired Samples Test)

Tabel diatas mengungkapkan perolehan hasil uji *Paired Samples Test*, mean dari nilai *abnormal return* adalah 0.0058565455 dengan nilai signifikansi yaitu 0.122. Nilai signifikansi yang dihasilkan $> \alpha$ atau $0.122 > 0.05$ yang dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa tidak terdapat perbandingan signifikan diantara *abnormal return* saham pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion*, atau dengan penjabaran yang lebih rinci yaitu, jumlah informasi yang dibutuhkan pasar dalam *Unqualified Opinion* sangat minim sehingga minim juga reaksi yang diberikan oleh pasar.

Tabel 9 Uji Paired Samples Test Trading Volume Activity

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference							
				Lower	Upper						
Pair1 ATVAPra – ATVAPasca	0.0000 6722	0.001 4532637	0.0002 653284	-0.0004 754376	0.0006 098776	0.253	29	0.802			

Sumber : Output SPSS (Paired Samples Test)

Uji *Paired Samples Test* menurut tabel diatas menandakan nilai *mean* dari volume perdagangan saham sebesar 0.00006722 dengan nilai signifikansi yaitu 0.802 yang berarti $> \alpha$ atau $0.802 > 0.05$. berdasarkan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. nilai tersebut ditafsirkan bahwa tidak terdapat perbandingan signifikan diantara volume perdagangan saham pra dan pasca publikasi *Unqualified Opinion*, atau dengan penjabaran yang lebih rinci yaitu, jumlah informasi yang dibutuhkan pasar dalam *Unqualified Opinion* sangat minim sehingga minim juga reaksi yang diberikan oleh pasar.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perbedaan reaksi pasar yang dapat diukur dari *Actual Return*, *Abnormal Return*, dan Volume Perdagangan Saham dengan waktu pra dan pasca laporan *Unqualified Opinion* dipublikasikan. Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2017-2019. Berlandaskan pada analisis data beserta hasilnya dan pembahasan yang disertakan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa ringkasan konklusi penelitian, antara lain :

1. *Unqualified Opinion* tidak memberikan perbedaan yang nampak atau signifikan dari tolak ukur variabel *Actual Return* pra dan pasca *Unqualified Opinion* dipublikasikan dengan hasil dari Uji *Paired Samples Test* menunjukkan bahwa H_0 diterima/ H_1 ditolak. Peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh investor tidak hanya berasal dari *Unqualified Opinion*, sehingga terdapat analisis terhadap faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan investasi pada *Jakarta Islamic Index* periode 2017-2019.
2. *Unqualified Opinion* tidak memberikan perbedaan yang nampak atau signifikan dari tolak ukur variabel *Abnormal Return* pra dan pasca *Unqualified Opinion* dipublikasikan dengan hasil dari Uji *Paired Samples Test* menunjukkan bahwa H_0 diterima/ H_1 ditolak. Peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh investor tidak hanya berasal dari *Unqualified Opinion*, sehingga terdapat analisis terhadap faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan investasi pada *Jakarta Islamic Index* periode 2017-2019.
3. *Unqualified Opinion* tidak memberikan perbedaan yang nampak atau signifikan dari tolak ukur variabel Volume Perdagangan Saham pra dan pasca *Unqualified Opinion* dipublikasikan dengan hasil dari Uji *Paired Samples Test* menunjukkan bahwa H_0 diterima/ H_1 ditolak. Peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian, yaitu informasi yang dibutuhkan oleh investor tidak hanya berasal dari *Unqualified Opinion*, sehingga terdapat analisis terhadap faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan investasi pada *Jakarta Islamic Index* periode 2017-2019.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah saran yang ditujukan pada calon investor, perusahaan, dan peneliti selanjutnya agar terwujud manfaat dari penelitian yang telah dilakukan

ini. Berikut poin-poin saran dari peneliti :

1. Untuk calon investor perlu memperhitungkan kewajaran laporan keuangan, hal ini dilakukan untuk menghindari banyaknya praktik tren beli membeli harga saham yang telah dimanipulasi oleh oknum-oknum pada pasar.
2. Untuk perusahaan, dapat konsisten dalam pengelolaan laporan keuangan sehingga menghasilkan opini terbaik setelah laporan keuangan diaudit.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai upaya peneliti untuk meminimalisir keterbatasan penelitian terulang kembali dalam penelitian selanjutnya, maka peneliti mengusulkan saran-saran sebagai agenda yang diperlukan dalam penelitian di masa mendatang, yaitu:
 - a) Penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan populasi- populasi yang lain di Bursa Efek Indonesia selain dari *Jakarta Islamic Index* dan periode dapat diperbarui di penelitian selanjutnya.
 - b) Penentuan sampel di penelitian berikutnya dapat melibatkan opini audit dari jenis yang lainnya, sehingga dapat diketahui reaksi pasar yang dihasilkan setelah opini audit yang lainnya dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia.
 - c) Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah jenjang waktu yang ditentukan sehingga hasil perbedaan dapat lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik* (5th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Arinda, Doa Tri. 2013. *Pengaruh Pengumuman Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Harga Saham pada Perusahaan Jasa Keuangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI)*. Semarang : Universitas Dipenogoro.
- Atimi, Iffan Irsyad. 2014. *Pengaruh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Indeks (JII) Tahun 2010-2020)*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.
- Hagul, Adventus Alwin. 2018. *Pengaruh Pengumuman Laporan Adit Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan Jasa Keuangan Sektor Perbankan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI)*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.
- Hartono, Jogiyanto. 2008. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (5th ed.). Yogyakarta : BPFE.. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (8th ed.). Yogyakarta : BPFE. 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (10th ed.). Yogyakarta : BPFE. Husnan, Suad. 2009. *Dasar-dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 150.1-150.2. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Keogh, John G. 2020. *COVID-19: Regaining Citizen-Consumers Trust through effective Signalling*. Diakses pada tanggal 2 November 2020 pukul 09.32, <https://www.researchgate.net/publication/339987984 COVID19 Regaining Citizen-Consumers Trust through effective Signalling>.

Mulyadi. 2002. *Auditing (6th ed.)*. Jakarta : Salemba Empat.

Suganda, T. Renald. 2018. *Event Study: Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia (1st ed.)*. Malang : CV Seribu Bintang.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : CV Alfabeta.

Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi (1st ed.)*. Yogyakarta : PT Kanisius. 2017. *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan investasi*. Yogyakarta : PT Kanisius.